



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH

2023

 Plan Action

 Performance

 Result

 bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas Qudrah dan Iradah-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Manajemen kinerja merupakan ruh reformasi birokrasi. Melalui manajemen kinerja yang baik, aktivitas-aktivitas terobosan untuk memperbaiki kapasitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan birokrasi akan dapat berjalan dengan lebih efektif. Salah satu bagian dari manajemen kinerja adalah evaluasi dan pelaporan kinerja. Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh selama tahun 2023 dalam rangka meningkatkan kontribusi pada pembangunan bidang agama dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama. Hambatan dan permasalahan dengan segala dinamikanya yang terjadi serta rencana tindak lanjutnya harus segera dilaksanakan untuk mendukung berjalannya program prioritas Nasional sebagai indikator keberhasilan kinerja Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Kementerian Agama. LKj ini juga merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi publik Kementerian Agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Semoga laporan ini dapat menjadi gambaran utuh mengenai kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh dan dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Selain itu diharapkan Laporan ini menjadi media pertanggungjawaban Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh terhadap apa yang telah ditetapkan.

Banda Aceh, Januari 2024
Kepala

Azhari

Daftar isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi	1
C. Aspek Strategis	4
D. Struktur Organisasi	5
E. Sistematika Penyajian	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	9
B. Rencana Strategis	11
C. Rencana Kinerja	13
D. Perjanjian Kinerja	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Pengukuran Kinerja	23
B. Analisis Capaian Kinerja	24
C. Akuntabilitas Keuangan	143
BAB IV. PENUTUP	152
LAMPIRAN	

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman teknis penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Kementerian Agama serta analisis capaian kinerja keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 22/PMK.02/2021, tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan ini menjabarkan mengenai deskripsi dan capaian atas sasaran strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh 2020-2024, yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sasaran strategis beserta indikator kinerja tahun 2023. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai kinerja anggaran atas aspek manfaat tingkat lembaga (CSS) dan rata-rata nilai kinerja anggaran tingkat eselon II/program. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh adalah 108,24% dengan kategori Sangat Baik. Adapun capaian realisasi sasaran program yang dibiayai dari DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2023, dengan pagu awal sebesar Rp. 125,186,431,000,-. Dalam tahap realisasi terjadi beberapa kali revisi dan pemotongan anggaran sehingga pagu akhir anggaran menjadi Rp. 113,754,031,000,- dengan total realisasi akhir anggaran menjadi Rp. 112,458,154,067,- dengan persentase realisasi menyentuh angka 98.86%.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2023 merupakan indikasi bahwa sistem akuntabilitas kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh telah berjalan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku. Selain capaian yang sudah diperjanjikan, sepanjang tahun 2023. Dalam proses pencapaian target kinerja tersebut tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi, keterbatasan anggaran dan tingginya beberapa target yang ditetapkan merupakan kendala yang paling sering dihadapi, akan tetapi dengan adanya kerjasama koordinasi dengan berbagai pihak maupun *stakeholder* terkait, kendala-kendala tersebut dapat dihadapi dan pelaksanaan pencapaian target telah dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Kedudukan Tugas dan Fungsi
- Aspek Strategis
- Struktur Organisasi
- Sistematika Penyajian

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh sebagaimana visinya ““Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, terus berupaya memberikan kinerja terbaiknya. Sepanjang tahun 2023 berbagai capaian positif telah ditorehkan dalam berbagai hal.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh merupakan sebuah upaya penting dalam mengevaluasi serta menggambarkan kontribusi kantor tersebut terhadap pembangunan keagamaan di daerah ini. Aceh, sebagai provinsi dengan penerapan syariah, memberikan ciri khas tersendiri dalam pelaksanaan program keagamaan. Kementerian Agama di wilayah ini memiliki tanggung jawab yang besar, termasuk dalam bidang pendidikan agama, pembinaan keagamaan, dan pelayanan haji. LAKIN menjadi alat evaluasi yang esensial untuk mengukur efektivitas langkah-langkah yang diambil dalam memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat Aceh yang unik.

Aceh juga pernah mengalami konflik bersenjata dan bencana alam, yang membawa dampak signifikan pada stabilitas dan dinamika sosial. Oleh karena itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) menjadi instrumen vital untuk mengevaluasi sejauh mana Kementerian Agama mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi dalam proses rekonstruksi pasca-konflik serta pemulihan pascabencana. Dalam konteks ini, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) mencerminkan komitmen kantor wilayah untuk menjaga stabilitas dan mengembangkan kehidupan keagamaan yang kokoh di tengah perubahan situasional yang kompleks.

Dalam kerangka otonomi daerah, Kementerian Agama di tingkat provinsi memiliki peran sentral dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan karakteristik lokal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) menjadi alat evaluasi yang memberikan gambaran holistik terkait kemampuan kantor wilayah dalam mengakomodasi serta merespons kebutuhan khusus masyarakat Aceh. Dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN), Kementerian Agama tidak hanya memberikan akuntabilitas terkait pencapaian kinerja, tetapi juga menunjukkan transparansi dan efektivitas dalam menjalankan fungsinya dalam mengembangkan kehidupan keagamaan masyarakat Aceh di tingkat regional.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan

Kementerian Agama (Kemenag) di Indonesia memiliki kedudukan sebagai salah satu

kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sebagai salah satu lembaga pemerintahan, Kementerian Agama memiliki peran khusus dalam mengelola, mengoordinasikan, dan merumuskan kebijakan pemerintah di bidang agama.

Kemenag menjadi pintu gerbang utama bagi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang keagamaan. Dalam struktur pemerintahan, Kementerian Agama berada di bawah kabinet dan memegang tanggung jawab besar terhadap pengelolaan dan pengembangan aspek keagamaan di Indonesia. Sebagai kementerian, Kemenag juga memiliki keterkaitan dengan lembaga-lembaga agama dan organisasi keagamaan lainnya. Kementerian ini berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan komunitas keagamaan, memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Dengan kedudukan yang strategis ini, Kementerian Agama memainkan peran yang penting dalam menciptakan dan memelihara kehidupan keagamaan yang seimbang, harmonis, dan mendukung visi Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila. Selain itu, sebagai lembaga pemerintahan, Kemenag juga terlibat dalam membantu mencapai tujuan pembangunan nasional dengan mengelola sumber daya dan program di bidang keagamaan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang lebih luas.

Tugas

Tugas Kementerian Agama (Kemenag):

1. Perumusan Kebijakan Agama;

Kementerian Agama memiliki tugas utama dalam merumuskan kebijakan nasional di bidang agama. Ini mencakup penyusunan kebijakan terkait dengan pendidikan agama, pembinaan keagamaan, pelaksanaan ibadah haji dan umrah, serta aspek-aspek keagamaan lainnya. Tugas ini menjadikan Kemenag sebagai lembaga yang sangat berperan dalam membentuk arah kebijakan keagamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara Pancasila.

2. Pengelolaan Program Pendidikan Agama;

Kementerian Agama bertanggung jawab atas pengelolaan program pendidikan agama di Indonesia. Hal ini mencakup penentuan kurikulum, pengembangan materi ajar, dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan agama seperti madrasah, pesantren, dan sekolah agama lainnya. Tugas ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pendidikan agama di Indonesia sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai nasional.

3. Pembinaan dan Pengawasan Keagamaan;

Kemenag memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap praktik keagamaan di masyarakat. Ini mencakup pembinaan terhadap para pemuka agama, pengelolaan tempat ibadah, dan monitoring kegiatan keagamaan untuk memastikan keberlangsungan dan kesesuaian dengan norma-norma agama yang berlaku.

4. Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah;

Kementerian Agama memiliki tugas khusus dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi warga negara Indonesia. Ini mencakup perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan berbagai aspek yang terkait dengan pemberangkatan, pelayanan, dan kepulangan jamaah haji dan umrah.

5. Pemberdayaan Masyarakat Keagamaan;

Salah satu tugas Kemenag adalah melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang keagamaan. Ini melibatkan kegiatan pelatihan, workshop, dan program-program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

6. Koordinasi Antarlembaga Keagamaan;

Kementerian Agama berfungsi sebagai koordinator antarlembaga di bidang keagamaan. Tugas ini melibatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga agama, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai sinergi dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program keagamaan.

Melalui tugas-tugas ini, Kementerian Agama berperan penting dalam menciptakan kondisi keagamaan yang harmonis, mendukung pembangunan nasional, dan menjaga keberagaman serta toleransi antarumat beragama di Indonesia.

Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Provinsi. maka fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
2. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah serta Zakat dan Waqaf;
4. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

7. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian Agama di provinsi

Melalui berbagai fungsi ini, Kemenag berperan dalam menciptakan kondisi keagamaan yang harmonis, mendukung pembangunan nasional, dan menjaga keberagaman serta toleransi antarumat beragama di Indonesia.

C. Aspek Strategis

Provinsi Aceh sebagai provinsi paling ujung barat di negara Indonesia memiliki kebijakan unik di bidang agama karena menerapkan hukum syariah lebih lanjut daripada provinsi-provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu, aspek strategis Kementerian Agama Provinsi Aceh dapat mencakup hal-hal berikut:

1. Implementasi Hukum Syariah

- Menetapkan dan melaksanakan hukum syariah yang berlaku di Aceh.
- Memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan hukum syariah.

2. Pendidikan Agama Islam

- Mengembangkan program pendidikan agama Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Meningkatkan kualitas pendidikan agama di Aceh.

3. Regulasi dan Pengawasan

- Menetapkan regulasi dan kebijakan terkait dengan urusan keagamaan dan hukum syariah.
- Mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi keagamaan.

4. Pengembangan Lembaga Keagamaan

- Mendorong dan mengelola lembaga-lembaga keagamaan seperti majelis agama, pondok pesantren, dan institusi keagamaan lainnya.
- Menetapkan standar dan melibatkan lembaga-lembaga keagamaan dalam pembangunan masyarakat.

5. Perlindungan Hak-hak Keagamaan

- Memastikan perlindungan hak-hak individu dan kelompok dalam konteks agama, termasuk hak-hak minoritas agama.
- Menerapkan kebijakan yang mendukung toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

6. Kerjasama dengan Lembaga Agama dan Pemerintah Lokal

- Bekerjasama dengan lembaga keagamaan, seperti ulama dan kyai, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ajaran agama dan nilai-nilai keagamaan.

- Bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam pembangunan masyarakat.

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan program-program pembinaan keagamaan.
- Memberikan dukungan kepada inisiatif masyarakat yang berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi.

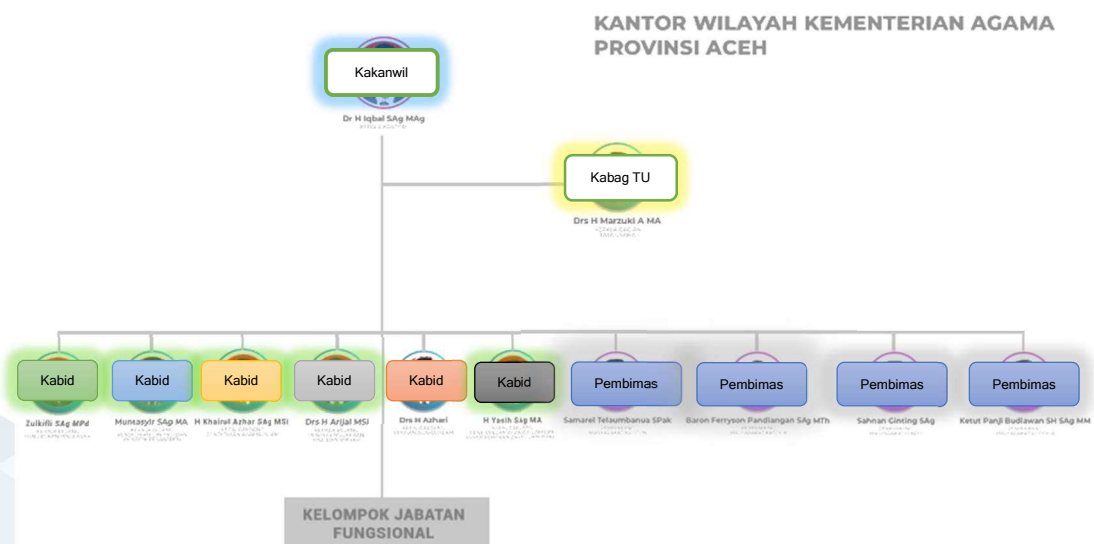
8. PENGELOLAAN ASPEK SOSIAL KEAGAMAAN

- Mengelola dan mengawasi aspek-aspek sosial keagamaan, termasuk perayaan hari besar keagamaan dan kegiatan keagamaan masyarakat.

Aspek-aspek ini mencerminkan konteks unik Aceh, di mana hukum syariah berlaku dan memiliki dampak signifikan pada kebijakan dan tugas Kementerian Agama Provinsi Aceh. Peran Kementerian Agama di Aceh mencakup penerapan dan pengembangan hukum syariah, pendidikan agama Islam, pengawasan dan regulasi keagamaan, serta berbagai upaya untuk mendukung pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dapat digambarkan sebagai berikut:



**Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh
Berdasarkan PMA Nomor 6 Tahun 2023**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

dibantu oleh 6 orang Eselon III-A, 4 orang Eselon III-B dan 23 orang kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Provinsi. maka fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
2. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah serta Zakat dan Waqaf;
4. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian Agama di provinsi.

Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag Provinsi Aceh

Secara keseluruhan jumlah aparatur sipil negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh berjumlah 178 orang, dengan rincian dan klasifikasi sebagaimana berikut :

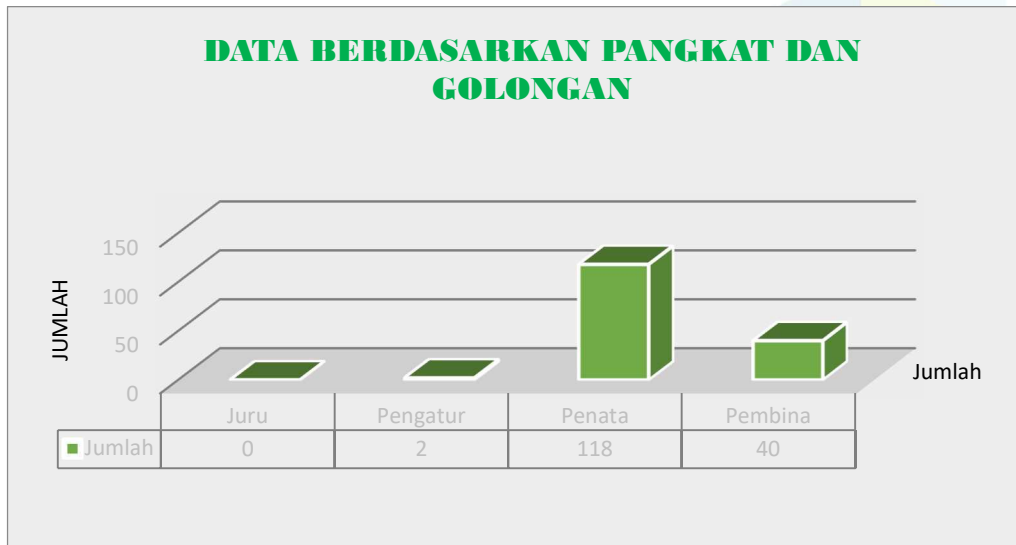
- Rekapitulasi Jumlah ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Berdasarkan Usia



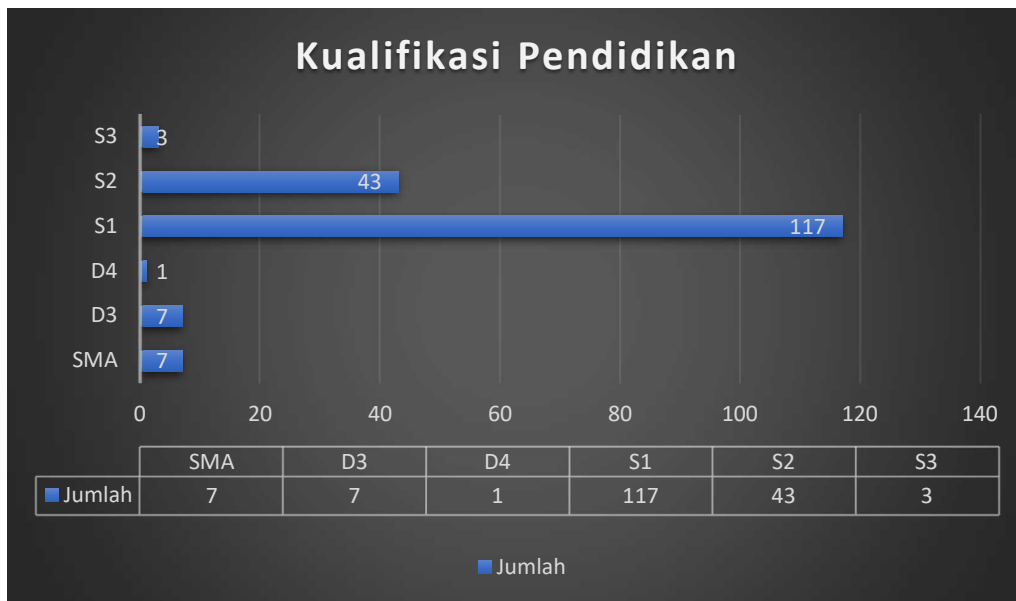
- Rekapitulasi Jumlah ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin



- Rekapitulasi Jumlah ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Berdasarkan Pangkat/golongan



- Rekapitulasi Jumlah ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan






E. Sistematika Penyajian

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 172 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama, Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan

	<p>kepada aspek strategis organisasi.</p>
	<p>Bab 2 Perencanaan Kinerja</p> <p>Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2020—2024 beserta perubahan terhadap rencana strategis tersebut berdasarkan hasil reviu dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2023.</p>
	<p>Bab 3 Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Bagian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Bagian 1, Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2023 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut. Bagian 2, Capaian Kinerja Lainnya. Bagian 3, Capaian Anggaran, yang menguraikan tentang anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.</p>
	<p>Bab 4 Penutup</p> <p>Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh selama tahun 2023 dan rekomendasi untuk perbaikankinerja di tahun-tahun selanjutnya.</p>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

● RPJMN

● Rencana Startegis

● Rencana Kinerja

● Perjanjian Kinerja

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan pemerintah Indonesia yang mencakup program dan kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka waktu tertentu. RPJMN biasanya memiliki periode pelaksanaan 5 tahun dan disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.



Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

■ Tema dan Agenda Pembangunan

*“ Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-
Royong ”*

7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024



7 Agenda RPJMN IV 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memainkan peran kunci dalam menetapkan arah pembangunan nasional di Indonesia dalam jangka waktu menengah. Dalam konteks ini, Kementerian Agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memastikan bahwa kebijakan keagamaan sejalan dengan visi pembangunan nasional yang tercakup dalam RPJMN. Salah satu tugas utama Kementerian Agama adalah mengawal dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang agama. RPJMN memberikan panduan strategis mengenai upaya penguatan nilai-nilai keagamaan, peningkatan kualitas pendidikan agama, serta perlindungan hak-hak keagamaan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, Kementerian Agama dapat mengembangkan program-program konkret, seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan agama, pelibatan masyarakat dalam kegiatan keagamaan, dan perlindungan kebebasan beragama.

Selain itu, RPJMN juga dapat mencerminkan komitmen pemerintah untuk mempromosikan toleransi antarumat beragama dan mengatasi konflik keagamaan. Kementerian Agama dapat diberdayakan untuk memainkan peran penting dalam membangun dialog antaragama, memfasilitasi kerjasama antarumat beragama, dan membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang keberagaman dalam masyarakat. Dengan demikian, kaitan antara RPJMN dan tugas-fungsi Kementerian Agama menciptakan landasan strategis yang kokoh untuk mengarahkan kebijakan dan program di bidang keagamaan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kementerian Agama) disusun berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2005-2025, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan serta aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Renstra Kementerian Agama menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Agama 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama. Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan dan Target Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama Yang akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja di Lingkup Kementerian Agama untuk menyusun program dan anggaran serta untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.dalam periode 5 tahun mendatang.

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menetapkan Visinya. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Kementerian Agama



Terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai

berikut:

- 1) Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
- 2) Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
- 3) Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah;
- 4) Moderat, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah;
- 5) Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran; dan
- 6) Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Misi Kementerian Agama



Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama tahun 2020-2024, Kementerian Agama berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan di seluruh jenjang untuk

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam bidang agama, Kementerian Agama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama. Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, Kementerian Agama akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama untuk mencapai visi masyarakat yang saleh.

C. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja adalah dokumen yang merinci tujuan, strategi, dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu satuan organisasi untuk mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rencana kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh terdiri dari 54 sasaran kegiatan dan 149 indikator kegiatan yang harus dicapai selama 1 tahun anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan melibatkan serangkaian langkah-langkah yang cermat dan terorganisir. Berikut adalah langkah-langkah umum yang diambil untuk mencapai sasaran kinerja:

- Pemahaman Sasaran dan Indikator Kinerja, Pastikan pemahaman yang jelas tentang sasaran kinerja yang ditetapkan serta Identifikasi indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur

pencapaian sasaran.

- Melakukan Analisis SWOT, dilaksanakan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran.
- Perencanaan Strategis, Susun rencana strategis yang mencakup langkah-langkah dan taktik spesifik untuk mencapai sasaran serta menentukan prioritas dan alokasi sumber daya.
- Penetapan Tanggung Jawab, dilaksanakan dengan membagi tanggung jawab masing-masing individu atau tim terkait dengan pelaksanaan setiap aspek dari rencana strategis.
- Pembagian Tugas sesuai dengan keahlian dan kapasitas serta memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran mereka dalam mencapai sasaran.
- Implementasi Tindakan, Jalankan rencana aksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Pemantauan dan Evaluasi Berkala, dilaksanakan dengan monitoring kemajuan secara teratur menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- Komunikasi dan Keterlibatan Stakeholder, Komunikasikan kemajuan dan pencapaian kepada stakeholder yang terkait, dapatkan umpan balik dan partisipasi dari stakeholder.
- Pemantauan Anggaran. Pantau dan kelola penggunaan anggaran sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Lakukan penyesuaian anggaran jika ada perubahan kebutuhan atau kondisi.
- Pengukuran Kepuasan Pelanggan atau Pengguna, Lakukan survei atau pengukuran kepuasan pelanggan atau pengguna untuk mengevaluasi kualitas produk atau layanan serta gunakan umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan.
- Pelaporan dan Akuntabilitas, dilaksanakan dengan menyiapkan laporan berkala tentang kemajuan pencapaian sasaran serta pertanggungjawaban terhadap pencapaian atau ketidakmampuan mencapai sasaran.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang merinci tujuan, tanggung jawab, dan kriteria evaluasi kinerja antara atasan dan bawahan dalam suatu organisasi. Dengan menguraikan tugas dan target kinerja yang spesifik, perjanjian ini membentuk landasan untuk menilai pencapaian individu atau tim. Metrik kinerja dan jadwal penilaian yang ditetapkan membantu mengukur kemajuan secara terukur. Selain itu, perjanjian kinerja juga mencakup insentif atau sanksi sebagai bentuk pengakuan terhadap pencapaian atau sebagai dorongan untuk

peningkatan kinerja. Dokumen ini bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga panduan untuk pengembangan pribadi dan profesional, menciptakan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan karyawan dan mencapai tujuan organisasional secara efektif.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	91,4 Nilai
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	85,78 %
		3. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	1 Orang
		4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	305 Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100 %
		2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	360 Orang
		3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	5 Desa
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	6 Lembaga
		2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	56 Kegiatan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100 %
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	58 %
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	7 Kegiatan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100 %
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah	76,6 %
		2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	61 %
		3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	485 Orang
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	17 Kegiatan
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	90 %
		2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	71 %

		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	52,5	%
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	14,5	%
		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	71	%
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	14,5	%
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	21,65	%
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	21,65	%
		9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	65	%
		10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;	1634	kegiatan
		11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	40	Kegiatan
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	98	%
		2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	4,5	%
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	50	Kegiatan
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	4	Lokasi
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	6	Kegiatan
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	14	Dokumen
		2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	20	Orang
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	35	Unit
		2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	30	Eksemplar

		3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	68,75	%
		4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	58	Layanan
		5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	35	Lokasi
		6. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;	20	Orang
		7. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	1	Lokasi
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi	5	Lokasi
		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	15	Lokasi
		3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	8300	Orang
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	3300	Orang
		5. Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina	165	Orang
		6. Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	220	Orang
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	3493	Keluarga
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	90	%
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	42,23	%
		2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0,35	%
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	27	%
		2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	87	%
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	96	%
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	97	%
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang dibina	91	%
		2. Persentase lembaga zakat yang dibina	73,51	%
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	80	%
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	20	%
		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	16,67	%

25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	95	%
		2. Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	90	%
		3. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	1	Madrasah
		4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	1	Madrasah
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	50,03	%
		2. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	50,03	%
		3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	50,03	%
		4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan	1	Orang
		5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	1	Orang
		6. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan	100	%
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	35	%
		2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	35	%
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	80	%
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	62	%
		3. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	61,5	%

		4. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	65,5	%
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	35	%
		6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	69	%
		7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	28	%
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	167309	Siswa
		2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;	7495	Siswa
		3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	22	%
		4. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;	20	%
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	0,1	%
		2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	38	%
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP	24961	Siswa
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;	83	%
		2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	13,64	%
		3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;	12	%
		4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;	15	%
		5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	57	%
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	60	%
		2. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	97,5	%

34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	7	%
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	85	%
		3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	82	%
		4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	2.4	%
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	100	%
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	95	%
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	180	Lembaga
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	1	%
		2. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1	%
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	87,5	%
		2. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	80	%
		3. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	70	%
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	167	Organisasi
		2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	177	Gugus
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan	95	%
		2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	95	%
		3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	4	Kegiatan

41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	93	%
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	100	%
		2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	95	%
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	25	%
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	50	%
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	40	%
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	95	%
		7. Persentase data ASN yang diupdate	90	%
		8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	50	%
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	2	Dokumen
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	98	%
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	96,59	%
		4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	60	%
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	49,93	%
		2. Persentase tanah yang bersertifikat	40	%
		3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN	99	%
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	85	%
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	80	%
		3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95	%

46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	95 %
		2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	40 Satker
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	45 Orang
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	95 %
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	100 %
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	75 %
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	96 %
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	75 %
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	90 %
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	100 %
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	100 %
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	100 %
		4. Persentase menurunnya lelang gagal	90 %
		5. Persentase menurunnya sengketa dan sengketa banding	90 %
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	90 %
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	20 Kegiatan
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	90 %
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	90 %
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	1 orang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



- **Pengukuran Kinerja**
- **Analisis Capaian Kinerja**
- **Akuntabilitas Keuangan**

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) mencerminkan evaluasi kinerja suatu organisasi atau instansi terhadap tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) mencakup evaluasi konkrit terhadap pencapaian tujuan strategis suatu organisasi dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditentukan. Pentingnya Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis terletak pada kemampuannya untuk memberikan umpan balik terukur dan obyektif terhadap pelaksanaan strategi organisasi. Dengan melibatkan indikator yang terukur dan relevan, organisasi dapat mengevaluasi efisiensi dan efektivitas langkah-langkahnya. Hasil dari IKSS juga dapat menjadi dasar untuk membuat keputusan perbaikan atau penyesuaian strategi guna meningkatkan pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, IKSS tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga instrumen penting untuk pengambilan keputusan yang berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi.

Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam pengelolaan birokrasi adalah pengukuran kinerja sebagai cara untuk menjamin adanya peningkatan layanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *outcome*. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual (fakta yang ada) dengan kinerja yang diharapkan (target). Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulanan dan tahunan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, dilakukan pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

- a. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks diperoleh dari hasil survei, baik internal maupun eksternal.
- b. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan angka/rerata/predikat/ opini diperoleh dari data sekunder/pihak/instansi yang berwenang.
- c. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan persentase diperoleh dari jumlah capaian dibanding total jumlah satuan masing-masing indikator.
- d. Batas atas capaian kinerja mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh adalah 120% dan batas bawah capaian kinerja adalah 0%. Untuk menetapkan kategori capaian kinerja telah

ditetapkan empat kategori capaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	> 100 – 120	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50 – 79.99	Kuning
4	Kurang	< 50	Merah

Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen. Perjanjian Kinerja selama satu tahun, capaian kinerja tersebut akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam melakukan pembangunan di bidang agamadan pendidikan dalam mendukung fokus pembangunan nasional.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja merupakan proses evaluasi yang mendalam terhadap pencapaian tujuan, produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dalam suatu organisasi atau individu.

Analisis ini melibatkan penilaian terhadap kinerja berdasarkan indikator kunci, seperti target yang telah ditetapkan, pengukuran kualitas hasil kerja, dan evaluasi terhadap proses yang dilakukan.

Berikut Capaian Realisasi Kinerja tahun 2023 :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	2023			
			Target	Realisasi	%	Kategori
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1 Nilai kinerja penyuluh agama	91.4	91	99.56	Baik
		2 Persentase penyuluh agama yang dibina	85.78	85	99.09	Baik
		3 Jumlah peniar agama yang dibina kompetensi	1	1	100.00	Baik
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	305	200	65.57	Cukup
Rerata Capaian Sasaran 1				91.06	Baik	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100	100	100.00	Baik
		2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina	360	360	100.00	Baik
		3 Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	5	2	40.00	Kurang
Rerata Capaian Sasaran 2				80.00	Baik	

3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	6	8	133.33	Sangat Baik
		2	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	56	51	91.07	Baik
Rerata Capaian Sasaran 3						112.20	Sangat Baik
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP		100	100	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 4						100.00	Baik
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	58	60	103.45	Sangat Baik
		2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	7	8	114.29	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 5						108.87	Sangat Baik
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		100	98	98.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 6						98.00	Baik
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1	Persentase rumah ibadah yang ramah	76.6	70	91.38	Baik
		2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	61	100	163.93	Sangat Baik
		3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	485	60	12.37	Kurang
Rerata Capaian Sasaran 7						89.23	Baik
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		17	15	88.24	Baik
Rerata Capaian Sasaran 8						88.24	Baik
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	90	85	94.44	Baik
		2	Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	71	70	98.59	Baik
		3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	52.5	50	95.24	Baik
		4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	14.5	14	96.55	Baik
		5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	71	70	98.59	Baik
		6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	14.5	14	96.55	Baik
		7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	21.65	25	115.47	Sangat Baik

		8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	21.65	25	115.47	Sangat Baik
		9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	65	65	100.00	Baik
		10	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;	1634	1500	91.80	Baik
		11	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	40	38	95.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 9					99.79	Baik
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	98	95	96.94	Baik
		2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	4.5	4	88.89	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 10					92.91	Baik
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya		Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	50	40	80.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 11					80.00	Baik
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat		Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	4	4	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 12					100.00	Baik
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama		Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	6	3	50.00	Cukup
	Rerata Capaian Sasaran 13					50.00	Cukup
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	14	57	407.14	Sangat Baik
		2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	20	56	280.00	Sangat Baik
	Rerata Capaian Sasaran 14					343.57	Sangat Baik
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	35	21	60.00	Cukup
		2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	30	116	386.67	Sangat Baik
		3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	68.75	100	145.45	Sangat Baik
		4	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	58	42	72.41	Cukup
		5	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	35	141	402.86	Sangat Baik
		6	Jumlah SDM Ahli Fatakiyah yang dibina;	20	58	290.00	Sangat Baik

		7	Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	1	1	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 15					208.20	Sangat Baik
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1	Jumlah KUA yang direvitalisasi	5	16.00	320.00	Sangat Baik
		2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	15	5.00	33.33	Kurang
		3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	8300	8500.00	102.41	Sangat Baik
		4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	3300	3190.00	96.67	Baik
		5	Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina	165	160.00	96.97	Baik
		6	Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	220	201.00	91.36	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 16					123.46	Sangat Baik
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga		Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	3493	190	5.44	Kurang
	Rerata Capaian Sasaran 17					5.44	Kurang
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus		Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	90	90	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 18					100.00	Baik
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	42.23	80	189.44	Sangat Baik
		2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0.35	0.35	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 19					144.72	Sangat Baik
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	27	90	333.33	Sangat Baik
		2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	87	90	103.45	Sangat Baik
	Rerata Capaian Sasaran 20					218.39	Sangat Baik
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji		Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	96	98	102.08	Sangat Baik
	Rerata Capaian Sasaran 21					102.08	Sangat Baik
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu		Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	97	97	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 22					100.00	Baik
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1	Persentase amil yang dibina	91	90	98.90	Baik
		2	Persentase lembaga zakat yang dibina	73.51	70	95.23	Baik

	Rerata Capaian Sasaran 23				97.06	Baik	
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	80	80	100.00	Baik
		2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	20	20	100.00	Baik
		3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	16.67	16	95.98	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 24				98.66	Baik	
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1	Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	95	95	100.00	Baik
		2	Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	90	90	100.00	Baik
		3	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	1	2	200.00	Sangat Baik
		4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	1	4	400.00	Sangat Baik
	Rerata Capaian Sasaran 25				200.00	Sangat Baik	
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1	Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	50.03	55	109.93	Sangat Baik
		2	Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	50.03	55	109.93	Sangat Baik
		3	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	50.03	55	109.93	Sangat Baik
		4	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan	1	1	100.00	Baik
		5	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	1	1	100.00	Baik
		6	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan	100	100	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 26				104.97	Sangat Baik	
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1	Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	35	35	100.00	Baik
		2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	35	35	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 27				100.00	Baik	
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	80	80	100.00	Baik
		2	Persentase MI/Ula/SDK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	62	62	100.00	Baik

		3	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	61.5	60	97.56	Baik
		4	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	65.5	66	100.76	Sangat Baik
		5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	35	35	100.00	Baik
		6	Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	69	69	100.00	Baik
		7	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	28	25	89.29	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 28					98.23	Baik
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	167309	167309	100.00	Baik
		2	Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;	7495	7495	100.00	Baik
		3	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	22	22	100.00	Baik
		4	Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;	20	20	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 29					100.00	Baik
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	0.1	0.1	100.00	Baik
		2	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	38	38	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 30					100.00	Baik
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah		jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	24961	24961	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 31					100.00	Baik
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;	83	83	100.00	Baik
		2	Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	13.64	13	95.31	Baik
		3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;	12	12	100.00	Baik
		4	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;	15	15	100.00	Baik

		5	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	57	60	105.26	Sangat Baik
	Rerata Capaian Sasaran 32					100.11	Sangat Baik
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	60	60	100.00	Baik
		2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	97.5	95	97.44	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 33					98.72	Baik
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	7	7	100.00	Baik
		2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	85	85	100.00	Baik
		3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	82	82	100.00	Baik
		4	Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	2.4	2	83.33	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 34					95.83	Baik
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1	Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	100	100	100.00	Baik
		2	Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	95	95	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 35					100.00	Baik
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi		Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	180	180	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 36					100.00	Baik
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	1	1	100.00	Baik
		2	Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1	1	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 37					100.00	Baik
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1	Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	87.5	80	91.43	Baik
		2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	80	80	100.00	Baik
		3	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	70	70	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 38					97.14	Baik

39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	167	167	100.00	Baik
		2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	177	177	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 39						100.00	Baik
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	95	100	105.26	Sangat Baik
		2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	95	95	100.00	Baik
		3	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	4	2	50.00	Cukup
Rerata Capaian Sasaran 40						85.09	Baik
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri		Persentase rekomendasi izin orang asing	93	95	102.15	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 41						102.15	Sangat Baik
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	100	100	100.00	Baik
		2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	95	95	100.00	Baik
		3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	25	100	400.00	Sangat Baik
		4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	50	50	100.00	Baik
		5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	40	40	100.00	Baik
		6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	95	95	100.00	Baik
		7	Persentase data ASN yang diupdate	90	90	100.00	Baik
		8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	50	50	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 42						137.50	Sangat Baik
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	2	2	100.00	Baik
		2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	98	98	100.00	Baik
		3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	96.59	98	101.46	Sangat Baik
		4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	60	90	150.00	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 43						112.86	Sangat Baik

44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	49.93	49	98.14	Baik
		2	Persentase tanah yang bersertifikat	40	40	100.00	Baik
		3	Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN	99	99	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 44						99.38	Baik
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	85	85	100.00	Baik
		2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	80	80	100.00	Baik
		3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95	95	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 45						100.00	Baik
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	95	95	100.00	Baik
		2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	40	40	100.00	Baik
		3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	45	40	88.89	Baik
Rerata Capaian Sasaran 46						96.30	Baik
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	95	95	100.00	Baik
		2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	100	95	95.00	Baik
		3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	75	75	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 47						98.33	Baik
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	96	96	100.00	Baik
		2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	75	75	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 48						100.00	Baik
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor		Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	90	90	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 49						100.00	Baik
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	100	100	100.00	Baik
		2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	100	90	90.00	Baik
		3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	100	70	70.00	Cukup
		4	Persentase menurunnya lelang gagal	90	90	100.00	Baik

		5	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	90	90	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 50					92.00	Baik
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga		Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	90	90	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 51					100.00	Baik
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	20	20	100.00	Baik
		2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	90	90	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 52					100.00	Baik
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	90	85	94.44	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 53					94.44	Baik
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan		Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	1	1	100.00	Baik
	Rerata Capaian Sasaran 54					100.00	Baik
Rerata Capaian Kinerja Tahun 2023						108.24	Sangat Baik

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

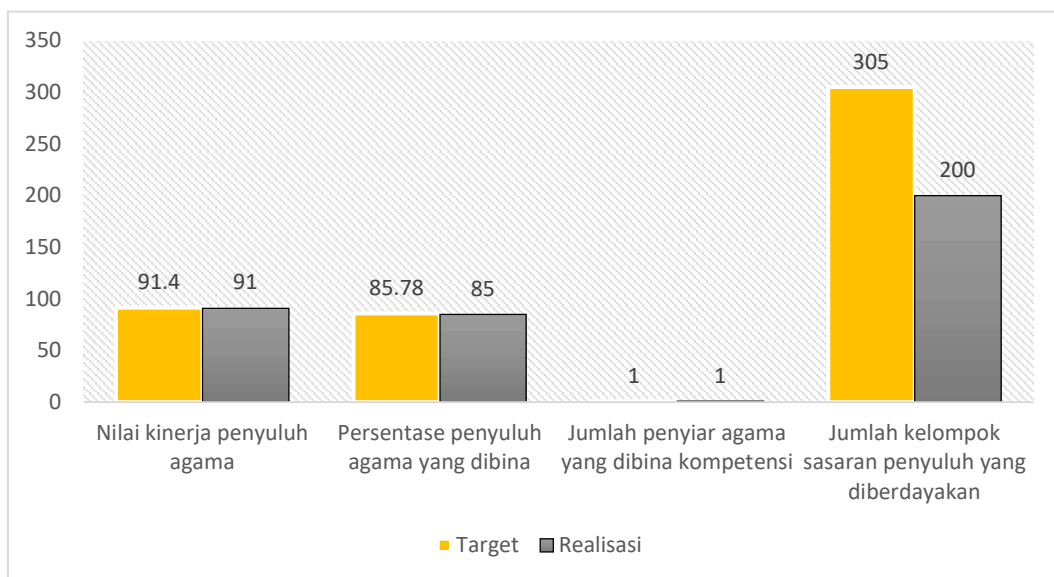
Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Nilai kinerja penyuluh agama, Persentase penyuluh agama yang dibina, Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi dan Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan. Dengan realisasi total mencapai 91,06% dengan kategori baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1	Nilai kinerja penyuluh agama	91.4	91	99.56	Baik
		2	Persentase penyuluh agama yang dibina	85.78	85	99.09	Baik
		3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	1	1	100.00	Baik
		4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	305	200	65.57	Cukup
Rerata Capaian Sasaran 1					91.06	Baik	

Indikator ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan

oleh bidang terkait selama tahun anggaran berjalan. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat diketahui dan dapat dilihat bahwa untuk Nilai kinerja penyuluh agama realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan dan juga ada indikator yang realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan berada pada kategori cukup.

Indikator tersebut adalah Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi dan Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan, hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia untuk pemberdayaan kelompok penyuluh dimaksud. Dari rencana target yang ditetapkan sebanyak 300 kelompok realisasinya adalah sebanyak 200 kelompok dengan persentasi sebesar 66,67%. Jika dituangkan dalam grafik maka capaian sasaran 1 ini dapat dilihat sebagai berikut :



Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama merupakan langkah krusial dalam mengokohkan pemahaman dan praktik nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Untuk mencapai hal ini, berbagai pendekatan dapat diterapkan. Pertama, penggunaan metode yang lebih inovatif seperti pemanfaatan teknologi informasi, simulasi interaktif, dan permainan pendidikan dapat membuat bimbingan agama menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh beragam kalangan. Kedua, pendekatan inklusif yang memperhatikan keberagaman dalam keyakinan dan budaya akan memungkinkan penyampaian pesan-pesan agama dengan lebih efektif kepada berbagai kelompok masyarakat. Ketiga, melalui pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus bagi para pengajar agama dan pelayan spiritual, baik dalam hal pengetahuan agama maupun keterampilan komunikasi, kualitas bimbingan agama dapat ditingkatkan secara substansial. Keempat, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan konteks zaman akan membantu menyesuaikan pesan-pesan agama dengan tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan masyarakat akan semakin mampu memahami, menginternalisasi, dan menerapkan nilai-

nilai agama dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga tercipta harmoni dan ketenangan spiritual dalam komunitas

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan tiga Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti, Jumlah aktor kerukunan yang dibina dan Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina. Dengan realisasi total mencapai 80,00% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100	100	100.00	Baik
		2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	360	360	100.00	Baik
		3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	5	2	40.00	Kurang
Rerata Capaian Sasaran 2					80.00	Baik	

Indikator ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh bidang terkait selama tahun anggaran berjalan. Secara umum untuk kegiatan jumlah aktor kerukunan yang dibina pada dasarnya telah melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 360 aktor yang dibina. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan aktor kerukunan pada tahun 2023 pelaksanaannya berbeda dari tahun sebelumnya, kegiatan PMB tidak hanya dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama akan tetapi juga dilaksanakan oleh Kabupaten Kota khususnya Bireuen dan Aceh Barat daya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan penetapan alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan yang mengharuskan dialokasikan anggaran untuk Kabupaten kota.

Orientasi Pelopor Penguatan Moderasi Beragama adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mengembangkan pemahaman moderasi beragama di kalangan masyarakat. Dalam kegiatan ini, peserta akan dibimbing untuk memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara keberagaman keyakinan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui berbagai seminar, lokakarya, dan diskusi interaktif, orientasi ini memberikan wawasan tentang moderasi beragama sebagai landasan bagi kehidupan beragama yang damai dan toleran. Selain itu, kegiatan ini juga mengedepankan nilai-nilai persatuan, mengajarkan peserta untuk menghormati perbedaan, dan merangsang dialog antaragama untuk membangun harmoni sosial.

Dalam konteks lebih luas, orientasi ini tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga menggali dimensi moderasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, dan budaya. Peserta diajak untuk memahami bahwa moderasi beragama bukan hanya sebuah konsep teoretis, tetapi juga sebuah gaya hidup yang mampu menciptakan masyarakat yang inklusif dan beradab. Melalui kegiatan ini, diharapkan bahwa para peserta dapat menjadi pelopor dalam memperjuangkan moderasi beragama sebagai fondasi yang kokoh bagi kemajuan dan keharmonisan masyarakat, serta sebagai benteng melawan radikalisme dan ekstremisme dalam segala bentuknya.

Sedangkan untuk kasus pelanggaran hak beragama di provinsi aceh bisa dikatakan tidak ada sesuatu yang mengarah kepada konflik berarti. Untuk konflik antar pemeluk agama di provinsi Aceh bisa dikatakan tidak ada bahkan pemuka semua agama yang hidup di Aceh menyatakan bahwa mereka merasa aman dan nyaman hidup di Aceh.



Sedangkan untuk Desa sadar kerukunan di Aceh, dari 5 target yang direncanakan hanya terealisasi sebanyak 2 bantuan dan berada pada kategori kurang, hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia yang dialokasikan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh pada tahun anggaran 2023 yang hanya untuk 2 kegiatan. Sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama total capaiannya cukup baik karena dari ketiga indikator tercapai realisasi dengan rata-rata nilai 80.

Berita

Pemuda Buddha, Hindu, Kristen dan Katolik: Kami Nyaman Tinggal di Aceh

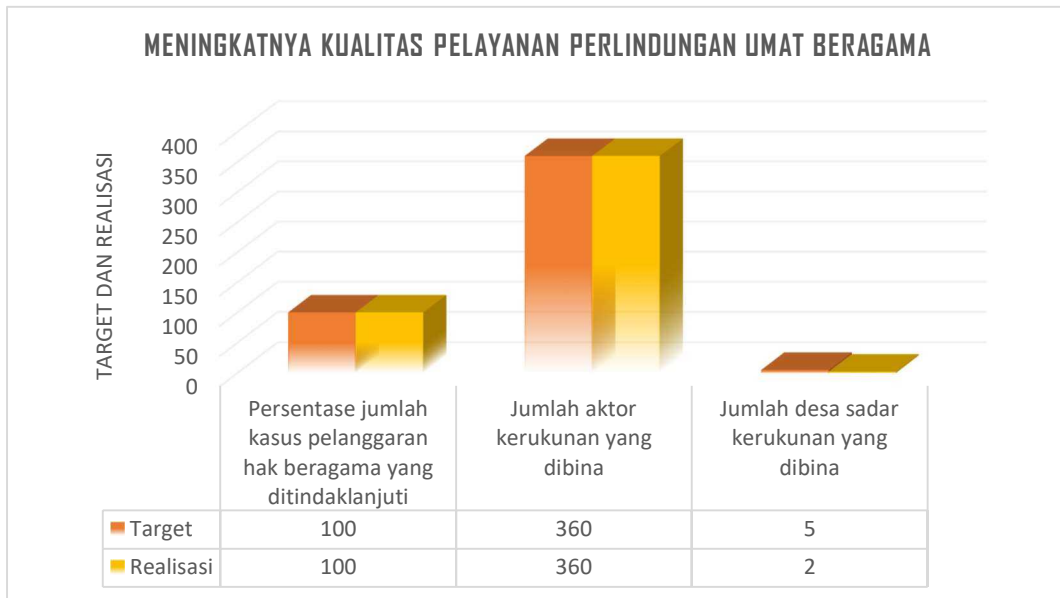


Foto: Tokoh muda agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen dan Katolik yang tinggal di Banda Aceh dan Aceh Besar bertemu dalam acara "Coffee Morning Pemuda Lintas Agama" yang digelar di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh di Banda Aceh, Sabtu (23/12/2023).

BERITA POPULER

- 1 Haris, Warga Lhok Rukam Aceh Selatan Tinggalkan Rumah, Dompot Ditemukan di Jalan Rantau Sialang
- 2 Seorang Pria di Abdya Ditemukan Tewas dalam Posisi tergantung, Diduga Bunuh Diri
- 3 Diskop UKM Aceh Luncurkan Buletin Koperasi Sehat
- 4 YARA Minta KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Bansos di Agara
- 5 Keuchik Padang Bak Jok Abdya Salurkan Pupuk Gratis kepada Petani
- 6 Hendak Setundupkan Sabu 1,2 Kilogram ke Jakarta, Pria Asal Aceh Utara Ditangkap di Bandara SIM
- 7 Di PPS Lampulo, dari Lantunan Syair Pengemis Hingga Ikan Murah

Jika dituangkan dalam grafik maka capaian sasaran 2 ini dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran Strategis 3 : Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa

Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa menjadi kunci penting dalam memperkokoh fondasi keberagaman dan kerukunan di dalam masyarakat. Dengan memperkuat komitmen pada nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan toleransi yang dijunjung tinggi oleh agama-

agama dan tokoh masyarakat, lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi sebagai mediasi yang efektif dalam menyelesaikan konflik, membangun dialog antaragama, serta memperkuat solidaritas sosial di antara beragam komunitas. Dengan demikian, mereka tidak hanya berperan sebagai pembawa pesan-pesan keagamaan, tetapi juga sebagai pemersatu dan pemimpin moral yang menginspirasi masyarakat untuk bersatu dalam keberagaman, menghadapi tantangan bersama, dan memperjuangkan keadilan serta perdamaian bagi kebaikan bersama.



Koordinasi Kanwil, UIN Ar Raniry, Kesbangpol Aceh dan FKUB Aceh

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan. Dengan realisasi total mencapai 112,20% dengan kategori sangat baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1 Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	6	8	133.33	Sangat Baik
		2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	56	51	91.07	Baik
Rerata Capaian Sasaran 3					112.20	Sangat Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh bidang terkait selama tahun anggaran berjalan. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut

dapat diketahui dan dapat dilihat bahwa untuk beberapa target realisasinya telah tercapai dengan sangat baik, bahkan untuk indikator Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi realisasi telah mencapai lebih dari seratus persen dengan kategori yang sangat baik. Sedangkan untuk dialog kerukunan persentase capain juga sudah mendekati target yang ditetapkan, bahkan biasa dikatakan lebih karena ada kegiatan-kegiatan dialog kerukunan yang tidak terpublikasi.

Dialog kerukunan merupakan kunci penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis di antara individu atau kelompok dengan latar belakang yang beragam. Dalam sebuah dialog kerukunan, pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling memahami, mendengarkan, dan menghargai perbedaan satu sama lain. Dialog seperti ini sering kali memerlukan kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, membuka pikiran untuk menerima perspektif yang berbeda, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan mengutamakan saling pengertian dan menghormati, dialog kerukunan dapat memperkuat hubungan interpersonal, mengurangi konflik, dan membentuk fondasi yang kokoh untuk kerjasama yang produktif.

Berikut beberapa potret kegiatan forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan :



Dialog Penguatan Kerukunan (Abdya)



Dialog Kerukunan di Aceh Tenggara

Sasaran Strategis 4 : Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP, dengan realisasi total mencapai 100% dengan kategori baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	100	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 4					100.00	Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh bidang terkait selama tahun anggaran berjalan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh subkor ortala dan KUB selaku leading sektor kegiatan daimaksud. Dari target yang dicanangkan sebesar 100% ternyata realisasi dilapangan telah mencapai 100%. Realisasi ini dilakukan perhitungan sesuai dengan realisasi anggaran yang tersalurkan. Dalam pelaksanaan dilapangan penyaluran anggaran telah dilaksanakan mencapai target akan tetapi sedikit kendala terjadi pada saat penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran bantuan oleh penerima bantuan tersebut.



Rapat Kerja FKUB Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Barat

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Provinsi Aceh memegang peran penting dalam memelihara harmoni dan kerukunan antarumat beragama di wilayah tersebut. Sebagai lembaga yang diberdayakan oleh pemerintah, FKUB Aceh bertujuan untuk mengelola dan merawat dialog antarumat beragama guna mencegah konflik keagamaan serta memperkuat kerjasama antarkeyakinan. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan agama di Aceh, FKUB menjadi wadah untuk membangun pemahaman bersama, memperkuat toleransi, dan mengatasi potensi ketegangan antarumat beragama di tengah masyarakat yang heterogen.

Peran FKUB Aceh tidak hanya terbatas pada penanganan konflik keagamaan, tetapi juga melibatkan upaya-upaya untuk mendukung pembangunan sosial dan kemanusiaan. Dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga agama dan masyarakat sipil, FKUB turut aktif dalam menyelenggarakan kegiatan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, FKUB Aceh bukan hanya menjadi mediator dalam menangani potensi konflik, tetapi juga menjadi agen pembangunan yang berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang berbudaya kerukunan dan toleransi di Provinsi Aceh.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama

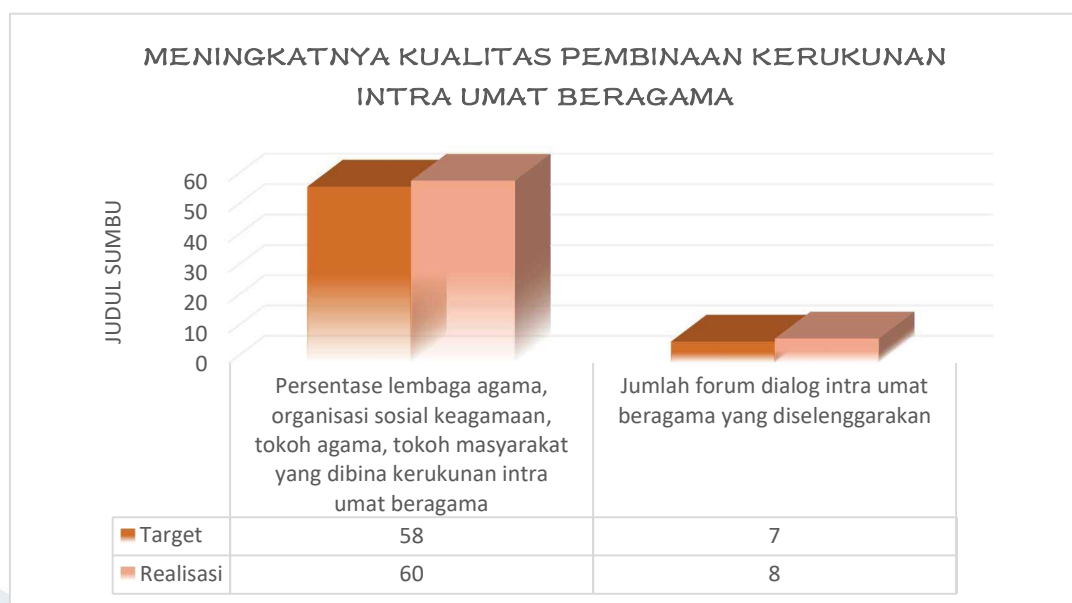
Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama dan Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan. Dengan realisasi total mencapai 108.87% dengan kategori sangat baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1 Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	58	60	103.45	Sangat Baik
		2 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	7	8	114.29	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 5					108.87	Sangat Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh bidang terkait selama tahun anggaran berjalan. Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama ini dilaksanakan dengan memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat

beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah. Kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama mencerminkan sejauh mana upaya telah berhasil menciptakan harmoni dan saling pengertian di antara anggota komunitas dengan latar belakang keagamaan yang beragam. Program ini dapat diukur melalui indikator-indikator seperti tingkat pemahaman terhadap keyakinan agama lain, partisipasi dalam kegiatan lintas agama, dan tingkat toleransi terhadap perbedaan. Kualitas pembinaan tercermin dalam kemampuan untuk mengurangi konflik, membangun dialog terbuka, dan memperkuat rasa saling ketergantungan di antara kelompok keagamaan. Dengan fokus pada peningkatan kesadaran budaya dan sosial, serta memfasilitasi dialog yang positif, pembinaan kerukunan intra umat beragama dapat membentuk dasar yang kokoh untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama di tengah keragaman keyakinan.

Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi dan Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. Untuk melihat kegiatan Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dapat digambarkan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat. Dengan realisasi total mencapai 98,00% dengan kategori baik,

sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100	98	98.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 6					98.00	Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh bidang terkait dalam hal ini bidang urais binsyar dan subkor ortala dan KUB yang melaksanakan kegiatan orientasi pelopor penguatan moderasi bergama selama tahun anggaran berjalan. Dari target yang dicanangkan sebesar 100% ternyata realisasi dilapangan mencapai 98%. Perhitungan ini didasarkan pada target dan output capaian dalam pelaksanaan pembinaan dilapangan. Bisa dikatakan memang tidak seluruhnya mereka yang dibina langsung menunjukkan sikap yang berwawasan moderat akan tetapi perlu proses.

Seorang penyuluh agama yang berdedikasi memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi beragama di tengah masyarakatnya. Dengan fokus pada dialog terbuka dan pendekatan yang inklusif, penyuluh ini membimbing masyarakat untuk memahami nilai-nilai toleransi dan keberagaman dalam ajaran agama. Dalam berbagai pertemuan agama, ia memastikan kehadiran pemuka agama dari berbagai latar belakang untuk merangsang dialog antarumat beragama. Ia mengajarkan masyarakat untuk menerima perbedaan keyakinan sebagai kekayaan dan bukan sebagai sumber konflik.

Penyuluh agama ini juga aktif dalam menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya untuk membahas isu-isu sensitif dan kontroversial secara damai. Melalui kegiatan ini, ia menciptakan ruang di mana masyarakat dapat saling berbagi pandangan dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang keyakinan sesama. Lebih dari itu, penyuluh ini berupaya secara proaktif mencegah radikalisme dan ekstremisme dengan menyediakan wawasan yang lebih luas tentang kerangka pemikiran moderasi dan nilai-nilai yang bersifat inklusif. Dengan pendekatan moderasi beragama, penyuluh agama ini berperan dalam membentuk komunitas yang memahami dan menghargai keragaman. Ia bekerja untuk menciptakan lingkungan di mana kerukunan dan solidaritas dapat tumbuh, membawa masyarakatnya menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama dan arti penting kerjasama lintas agama.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan tiga Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase rumah ibadah yang ramah, Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina dan Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya. Dengan realisasi total mencapai 89.23% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1 Persentase rumah ibadah yang ramah	76.6	70	91.38	Baik
		2 Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	61	100	163.93	Sangat Baik
		3 Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	485	60	12.37	Kurang
Rerata Capaian Sasaran 7					89.23	Baik

Indikator Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh bidang terkait selama tahun anggaran berjalan. Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran mencerminkan peran penting tempat ibadah dalam mendukung kerukunan antarumat beragama. Dalam konteks ini, para pengelola rumah ibadah berupaya membentuk lingkungan yang mendorong toleransi, pemahaman, dan dialog antarumat beragama. Mereka tidak hanya menjaga fasilitas fisik tempat ibadah tetap terawat, tetapi juga aktif dalam menyelenggarakan kegiatan lintas agama, seminar, dan pertemuan dialog. Dengan fokus pada nilai-nilai universal seperti kasih sayang, kedamaian, dan saling penghargaan, rumah ibadah menjadi pusat yang mengedepankan toleransi dan keberagaman, menciptakan ruang bagi umat beragama untuk saling memahami dan merayakan perbedaan dalam suasana yang damai dan harmonis.

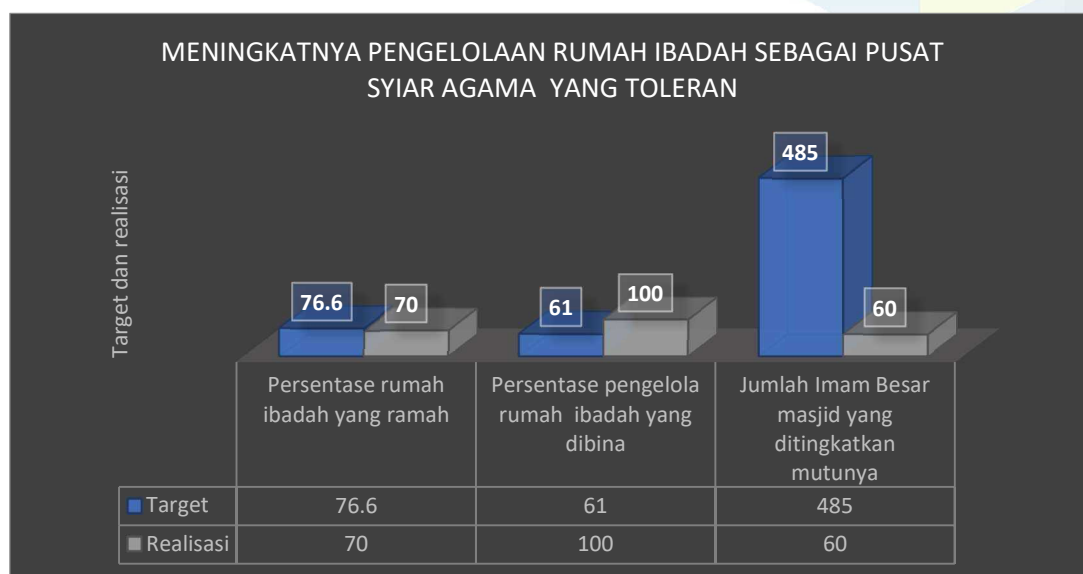
Secara umum penilaian Rumah Ibadah Yang Ramah, meliputi

- 1) Kenyamanan dan Kebersihan;
- 2) Fasilitas Umum;
- 3) Fasilitas Anak;
- 4) Fasilitas Disabilitas;
- 5) Kegiatan-Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat diketahui dan dapat dilihat bahwa untuk beberapa target realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu indikator persentase rumah

ibadah yang ramah yang realisasinya mencapai 91.38%. Sedangkan untuk indikator Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina berada dalam kategori sangat baik.

Jika dituangkan dalam grafik maka capaian sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik. Dengan realisasi total mencapai 88,24% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	17	15	88.24	Baik
Rerata Capaian Sasaran 8					88.24	Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh bidang terkait. Rendahnya realisasi kegiatan ini disebabkan karena kurangnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan status aceh sebagai daerah syariat , maka perlu kehati-hatian dan kerjasama berbagai pihak akan tidak menimbulkan kegaduhan kedepannya yang disebabkan karena masih banyaknya anggapan dari masyarakat bahwa siaran-siaran tersebut dapat mengganggu aqidah masyarakat, maka perlu perubahan sedikit demi sedikit agar tidak mengusik ketenangan bahwa

dapat berefek menimbulkan kegaduhan baru yang berpotensi memicu terjadinya konflik lainnya dalam kehidupan masyarakat khususnya yang terkait dengan kegiatan moderasi beragama.



Kerjasama dengan Harian Serambi Indonesia terkait Peran Kemenag Aceh dalam menjaga kerukunan

Kegiatan penyiaran agama di ruang publik melibatkan sejumlah aktivitas untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Adapun berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

- Ceramah agama
- Seminar keagamaan, dan
- Diskusi panel di tempat-tempat umum di ruang publik (coffe morning)
- Pemasangan spanduk, poster, dan materi informatif di tempat-tempat strategis
- Program radio, podcast dan televisi keagamaan.



Podcast salah satu penyuluh agama Islam Terbaik Nasional

Semua Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai keberagaman keyakinan dan mempromosikan kerukunan di tengah masyarakat.

Sasaran Strategis 9 : Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan sebelas Indikator Kinerja Sasaran Strategis dengan realisasi total mencapai 99,79% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	90	85	94.44	Baik
		2	Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	71	70	98.59	Baik
		3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	52.5	50	95.24	Baik
		4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	14.5	14	96.55	Baik
		5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	71	70	98.59	Baik
		6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	14.5	14	96.55	Baik
		7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	21.65	25	115.47	Sangat Baik
		8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	21.65	25	115.47	Sangat Baik
		9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	65	65	100.00	Baik
		10	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;	1634	1500	91.80	Baik
		11	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	40	38	95.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 9					99.79	Baik	

Indikator ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai

perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh bidang terkait. Secara keseluruhan capaian kinerja ini berada di kategori Baik.

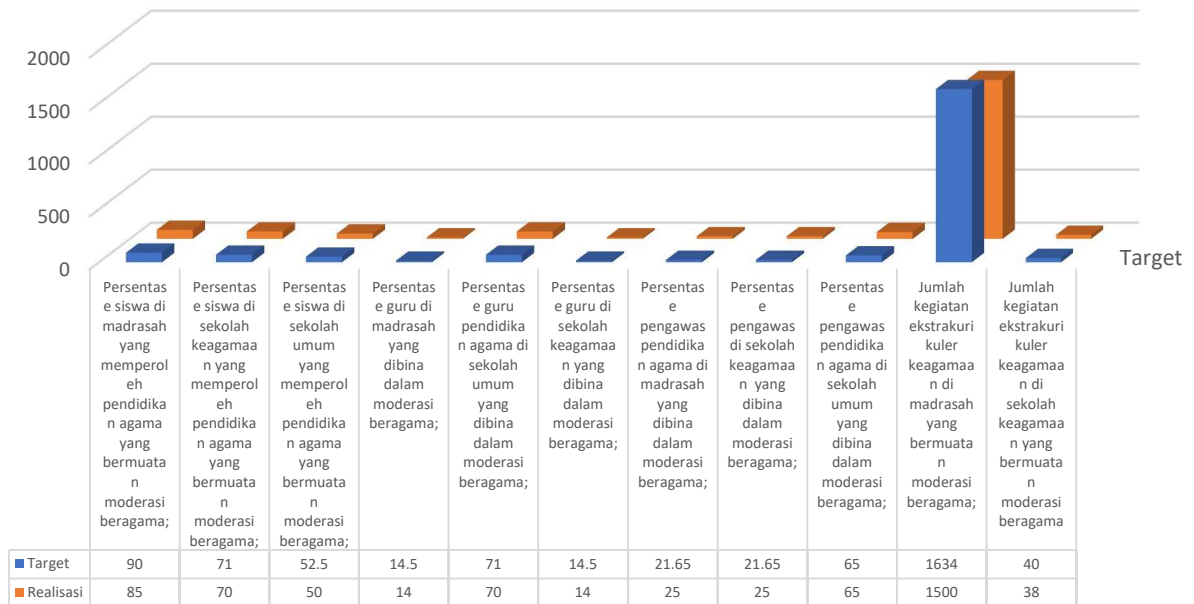
Kementerian Agama Provinsi Aceh menyatakan bahwa penerapan moderasi beragama di sekolah-sekolah sudah berjalan optimal. Hal ini dibuktikan dengan capaian penerapan moderasi beragama di tingkat SMP dan SMA yang mencapai 90 persen. Sementara untuk tingkat SD, pengenalan moderasi beragama ini sudah sampai pada tahap sosialisasi dengan capaian 30 persen. Kalau kita lihat di tingkat SMP, capaian program moderasi beragama ini sudah mencapai 90 persen, sudah di tahap tidak ada lagi diskriminasi terhadap siswa/siswi non muslim.

Langkah-langkah penguatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik yang dilaksanakan mencakup:

1. Pemilihan Materi Ajar yang Inklusif, dengan memastikan bahwa materi ajar mencakup berbagai perspektif agama, mengajarkan toleransi, dan mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang keyakinan sesama.
2. Pelatihan Guru, memberikan pelatihan kepada guru agar dapat mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam pengajaran mereka, mengelola diskusi sensitif dan mempromosikan dialog terbuka.
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler:
4. Menggunakan Media Pendidikan yang Inovatif, dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama, termasuk video pembelajaran, diskusi daring, atau platform pembelajaran daring yang mendukung pendekatan inklusif.
5. Mendorong Partisipasi Aktif Siswa, dengan membangun suasana kelas yang mendukung diskusi terbuka dan mendorong partisipasi aktif siswa.
6. Melibatkan Komunitas Sekitar, dengan berkolaborasi dengan komunitas dan tempat ibadah setempat untuk memberikan pembelajaran kelas dengan realitas kehidupan sehari-hari.
7. Penilaian Berbasis Keterampilan
8. Pemantauan dan Evaluasi Terus-Menerus, dengan melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas pendekatan moderasi beragama dalam pengajaran agama, dan membuat perbaikan jika diperlukan.

Dengan diterapkannya langkah-langkah ini, mata pelajaran agama dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat moderasi beragama, membentuk generasi yang memiliki pemahaman yang lebih luas dan inklusif mengenai keberagaman keyakinan.

Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik



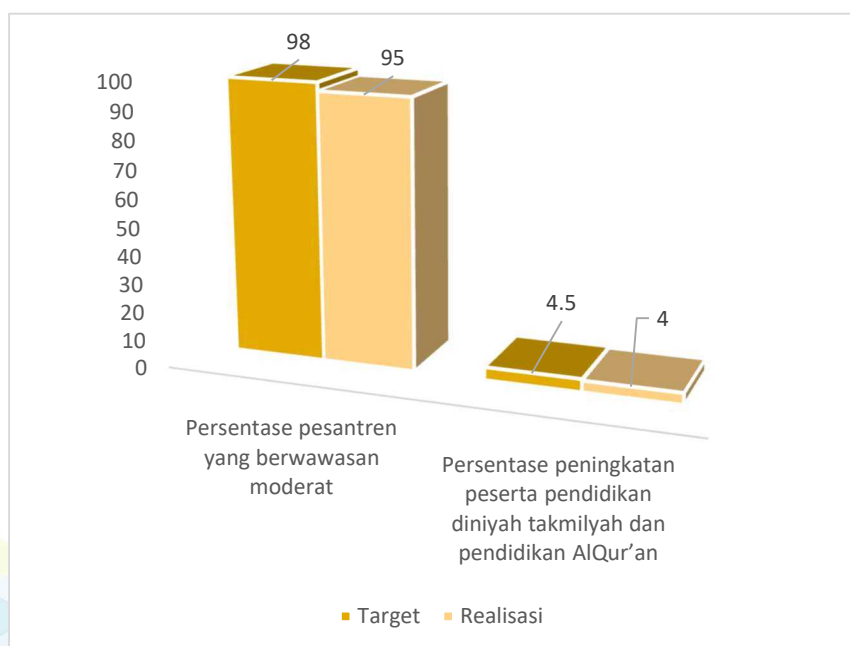
Sasaran Strategis 10 : Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam

Pondok pesantren merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi suatu perubahan. Dikarenakan pondok pesantren dianggap sumber pendidikan akhlak dan moralitas baik dari segi individu maupun kelompok. Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase pesantren yang berwawasan moderat dan Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an. Dengan realisasi total mencapai 92,91% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1 Persentase pesantren yang berwawasan moderat	98	95	96.94	Baik
		2 Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	4.5	4	88.89	Baik
Rerata Capaian Sasaran 10					92.91	Baik

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang mengembangkan Islam Moderat adalah Pondok Pesantren, Lembaga pendidikan Islam yang banyak berkontribusi untuk kemerdekaan bangsa, kemajuan pendidikan bangsa dan memberikan dakwah untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Sehingga sangat jelas bahwa peran pengelolaan pondok pesantren menolak segala bentuk tindakan radikalisme dan ekstrimisme, aksi terror yang merusak sendi-sendi kerukunan dan kedamaian umat manusia.

Penataan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia dilakukan dengan menghadirkan pesantren dan madrasah diniyah sebagai pelopor kelembagaan Islam dengan konsep rahmatallilalamin dengan pendekatan-pendekatan uswatun hasanah. Dua lembaga ini diharapkan oleh pemerintah untuk menjalankan pendidikan Islam kepada umat Islam agar umatnya benar-benar menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Budaya di Pesantren dan Madrasah Diniyah yang mengedepankan nilai-nilai spiritualitas perlu juga dipraktekkan para mahasantri di luar lingkungannya, seperti saat mereka menempuh studi di Perguruan Tinggi, atau mungkin saat berada di jalan raya/ di pasar / dimanapun berada dengan menggunakan akhlak mulia sebagai pakaiannya sehari-hari. Spiritualitas yang tinggi ini tidak bisa berjalan sebentar, akan tetapi memerlukan waktu yang lumayan banyak dan lingkungan memadai supaya karakter islami mahasantri benar-benar menfosil pada dirinya.



Indikator ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh bidang terkait. Secara keseluruhan capaian kinerja ini berada di kategori Baik dengan Persentase pesantren yang berwawasan moderat sebesar 96,94% dan Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an dengan capaian nilai 88,89%.

Sasaran Strategis 11 : Menguatnya dialog lintas agama dan budaya

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan. Dengan realisasi total mencapai 80,00% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	50	40	80.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 11					80.00	Baik

Dalam rangka menjaga kedamaian antar umat beragama, Kanwil Kemenag provinsi Aceh rutin mengadakan pertemuan dengan pemuka agama yang ada di provinsi Aceh. Adapun salah satu cara yang diambil oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh adalah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang rutin mengadakan pertemuan dengan para pemuka agama setempat.

Indikator ini diukur dengan membandingkan target dan realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh *leading* terkait. Secara keseluruhan capaian kinerja ini berada di kategori Baik. Pengukuran tingkat capaian ini dilihat berdasarkan jumlah dialog-dialog yang dilaksanakan oleh kementerian agama provinsi Aceh selaku *leading* terkait dan juga bekerjasama dengan berbagai instansi atau organisasi organisasi lainnya seperti Kesbangpol Aceh, Kompas, Radio lokal dan lain sebagainya.



Dialog kerukunan millennial lintas agama kerjasama Kanwil Kemenag Aceh dengan FKUB Provinsi Aceh (<https://youtu.be/Hi7bzFlioMI>)

Sekarang ini yang perlu adalah sebuah konsensus bersama yang benar-benar mengikat antara elit politik dan agama dengan masyarakat yang dibuat dan ditaati bersama untuk mengatasi kekacauan dan krisis yang lebih besar. Rekonsiliasi nasional antar elit dan antar generasi perlu dilakukan segera, bukan tetap pada tradisi menang-menangan, atas nama agama sekalipun. Tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian agama, tidak ada perdamaian agama tanpa perdamaian dunia. Masih terlalu banyak isu yang seringkali muncul dalam dialog antar umat beragama, sehingga dialog antar umat beragama mandeg sama sekali. Kita hidup dalam realitas pluralitas yang merupakan sunnatullah, sekaligus harus menjadi way of life, dari sinilah demokrasi dalam kehidupan beragama akan tumbuh. Salah satu lembaga keagamaan yang dianggap paling penting dalam proses perdamaian adalah NU dan Muhammadiyah, serta Non Governmental Organization yang secara khusus bergerak dalam isu keagamaan tanpa bermaksud mengabaikan organisasi keagamaan lainnya.

Sasaran Strategis 12 : Meningkatkan pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak). Dengan realisasi total mencapai 100% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	4	4	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 12					100.00	Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target dan realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak). Secara keseluruhan capaian kinerja ini berada di kategori baik. Kearifan Lokal dalam sistem sosial tercermin dalam keadaan masyarakat yang aman, terpeliharanya kehidupan yang akrab dan penuh gotong royong. Kearifan lokal dalam kebudayaan fisik tercermin dalam banyaknya situs/ bangunan bersejarah yang tersebar di kecamatan-kecamatan di Indonesia. Situs bersejarah tersebut di antaranya adalah: gedung bersejarah, pelabuhan bersejarah, stasiun bersejarah, tempat spiritual/ makam/ petilasan, dll. Mayoritas, situs yang ada adalah tempat spiritual.



Situs Mesjid Tuha Indapuri Kabupaten Aceh Besar

Adapun beberapa produk budaya berbasis agama yang dapat memberikan manfaat tersebut sebagai berikut :

1. Sastra dan Kitab Suci
2. Seni dan Musik Keagamaan:
3. Pendidikan Keagamaan:
4. Produk Halal:
5. Busana dan Seni Rupa:
6. Aplikasi dan Media Keagamaan:
7. Amal Sosial Berbasis Agama:

Produk budaya berbasis agama ini memiliki peran penting dalam memperkaya kehidupan umat dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan spiritual dan sosial.

Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama

Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya adalah bukti nyata dari implementasi pengamalan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Dengan menginternalisasi ajaran-ajaran agama yang menekankan nilai-nilai seperti toleransi, menghargai perbedaan, dan saling menghormati, individu-individu menjadi lebih terbuka terhadap keberagaman budaya di sekitar mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima tanpa memandang latar belakang budaya atau kepercayaan agama mereka. Untuk

mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll). Dengan realisasi total mencapai 100% dengan kategori baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	6	3	50.00	Cukup
Rerata Capaian Sasaran 13					50.00	Cukup

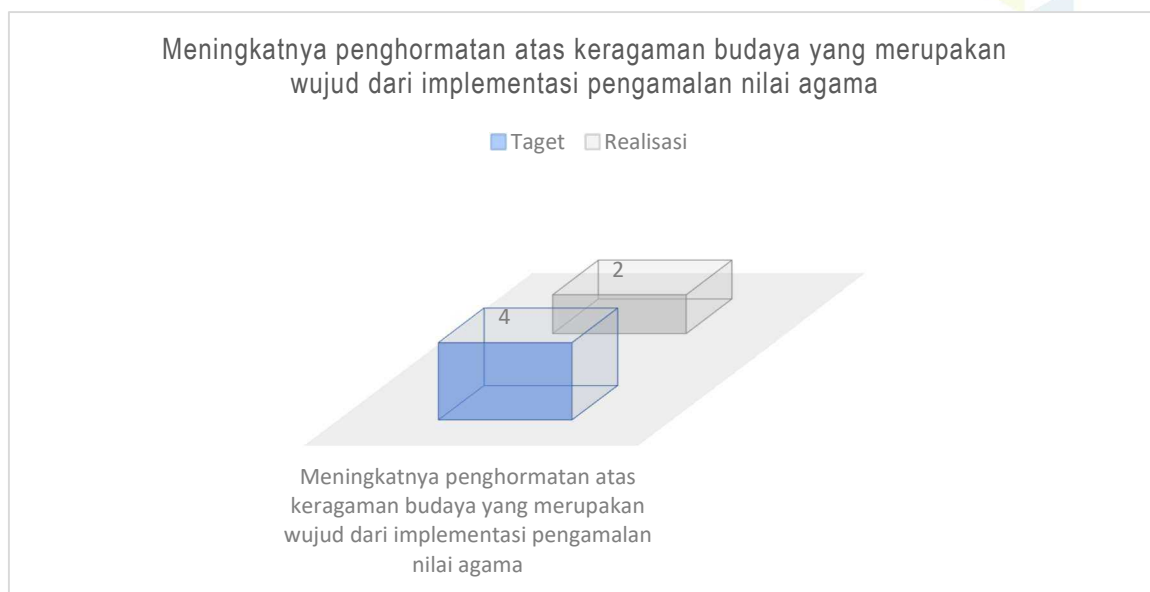
Indikator ini diukur dengan membandingkan target dan realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kata lain terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara keseluruhan capaian kinerja ini berada di kategori cukup.

Ekspresi budaya yang mencerminkan nilai agama dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam seni lukis, motif dan tema yang digunakan sering kali mencerminkan keyakinan keagamaan dan simbol-simbol spiritual. Begitu pula, dalam musik dan sastra, lirik atau tulisan dapat merangkum nilai-nilai keagamaan dan cerita-cerita yang dianggap sakral. Pada upacara adat dan perayaan tradisional, aspek-aspek keagamaan sering kali menjadi bagian integral dari acara tersebut, menciptakan suasana yang sarat dengan spiritualitas. Secara keseluruhan, ekspresi budaya yang mengandung nilai agama tidak hanya mengajarkan warisan budaya yang kaya, tetapi juga menguatkan dan merayakan hubungan erat antara kebudayaan dan keyakinan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.



Kabid Penais Zawa mewakili Kakanwil Kemenag Prov. Aceh mengikuti Rakor Persiapan MTQ Aceh

Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religious sedangkan seni dipahami dalam pengertian kualitas yang terdapat dalam karya seni, baik kualitas yang bersifat kasat mata maupun yang tidak kasat mata. “Sebagai hasil dari seni dan budaya, agama menjadi unsur atau bagian dari kebudayaan. Tentu ada unsur-unsur pada agama yang mejadi ciri khas dari kebudayaan”. Jika dituangkan dalam grafik maka capaian sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran Strategis 14 : Meningkatkan kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama

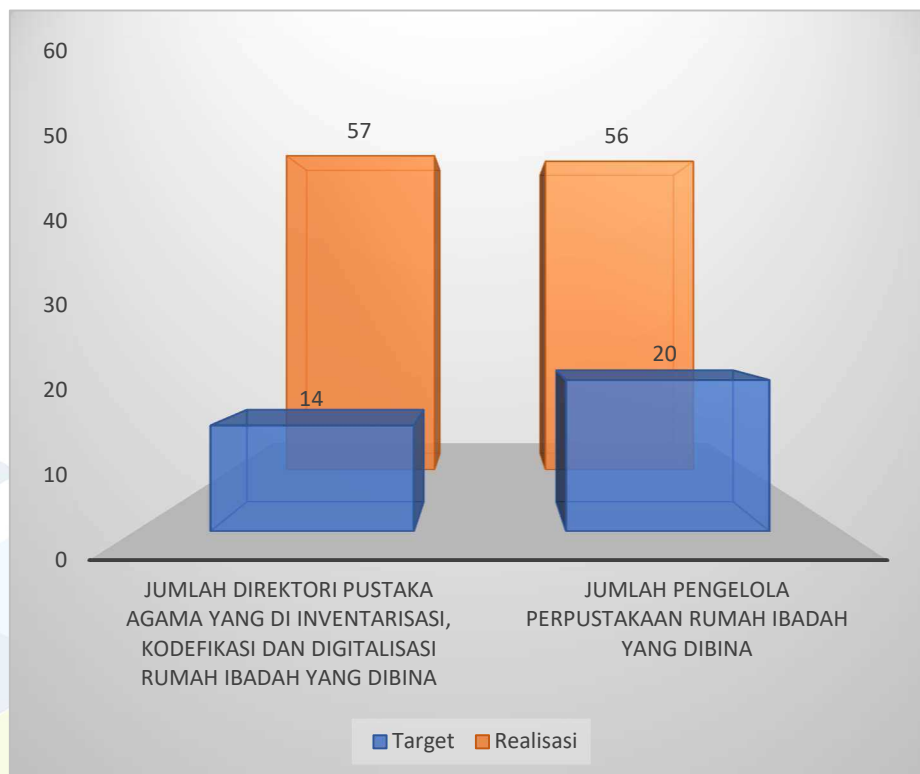
Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina dan Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina. Dengan realisasi total mencapai 343,57% dengan kategori Sangat Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1 Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	14	57	407.14	Sangat Baik
		2 Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	20	56	280.00	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 14					343.57	Sangat Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang telah ditetapkan

sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kata lain terealisasi melebihi dengan target yang ditetapkan. Secara keseluruhan capaian kinerja ini berada di kategori sangat baik. Hal ini tentunya didukung oleh kerjasama yang baik antar berbagai pihak dan ketersediaan anggaran yang mendukung sehingga kegiatan pengelolaan dapat berjalan sesuai dengan harapan yang ditetapkan bahkan melebihi ekspektasi dan tentunya merupakan keberhasilan yang diperoleh berkat dukungan dari berbagai pihak.

Literasi khasanah budaya yang bernafas agama melibatkan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai, norma, dan tradisi keagamaan yang menjadi bagian integral dari suatu budaya. Ini mencakup pengetahuan tentang teks-teks suci, ajaran moral dan etika agama, serta ritual-ritual keagamaan yang menjadi dasar hidup masyarakat. Selain itu, literasi ini juga mencakup pemahaman tentang seni, sastra, dan ekspresi budaya lainnya yang meresapi nilai-nilai agama. Individu yang memiliki literasi khasanah budaya yang bernafas agama mampu mengapresiasi dan menjaga warisan budaya dengan mempertimbangkan aspek spiritualitas dan kepercayaan keagamaan. Mereka juga cenderung memiliki kedalaman pemahaman terhadap kompleksitas hubungan antara budaya dan agama dalam membentuk identitas dan pandangan dunia suatu komunitas. Literasi semacam ini memainkan peran penting dalam memelihara dan meneruskan warisan budaya, sambil tetap menghormati dan memahami nilai-nilai keagamaan yang menjadi pondasinya. Untuk capaian sasaran kegiatan ini dapat dituangkan dalam grafik sebagai berikut :



Sasaran Strategis 15 : Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan menjadi sebuah tonggak penting dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan keagamaan bagi masyarakat. Dengan investasi yang tepat dalam infrastruktur fisik seperti pembangunan tempat ibadah yang modern dan ramah lingkungan, serta pengembangan teknologi informasi yang memungkinkan pelayanan keagamaan online, masyarakat dapat dengan lebih mudah mengakses berbagai layanan keagamaan sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, peningkatan kualitas sarana juga mencakup pelatihan dan pendidikan bagi para pengelola tempat ibadah dan pelayan keagamaan untuk memastikan layanan yang lebih profesional, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan tidak hanya memenuhi kebutuhan praktik keagamaan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam memperkuat nilai-nilai keberagaman dan harmoni dalam masyarakat.

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan tujuh Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan, Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan, Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi, Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan, Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat, Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina, Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar. Dengan realisasi total mencapai 208.20% dengan kategori sangat baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	35	21	60.00	Cukup
		2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	30	116	386.67	Sangat Baik
		3 Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	68.75	100	145.45	Sangat Baik
		4 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	58	42	72.41	Cukup
		5 Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	35	141	402.86	Sangat Baik
		6 Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;	20	58	290.00	Sangat Baik

	Jumlah Pusat Observasi 7 Bulan yang memenuhi standar	1	1	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 15				208.20	Sangat Baik

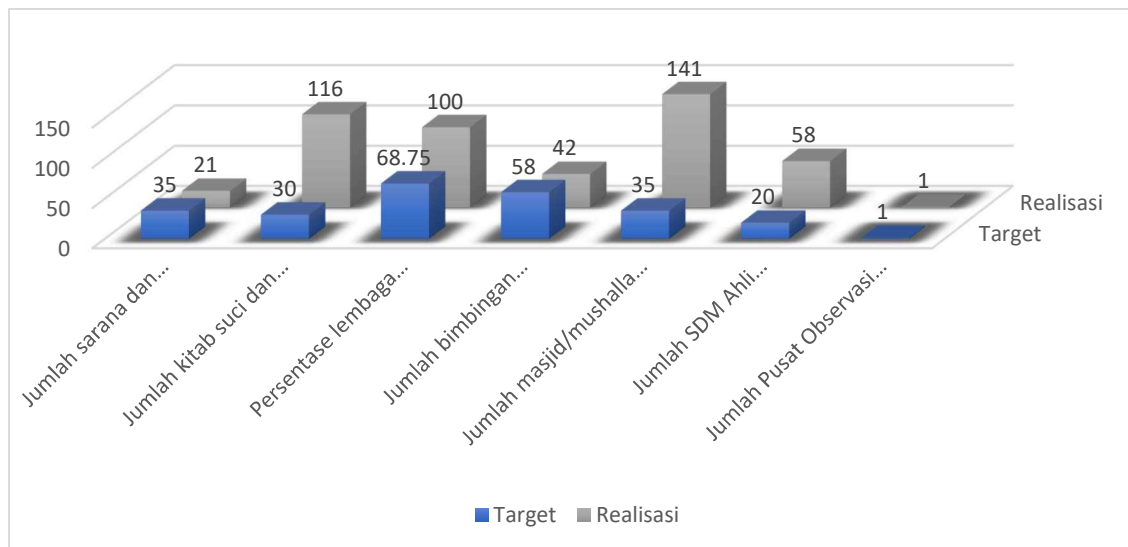
Indikator ini diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kata lain terealisasi melebihi dengan target yang ditetapkan. Secara keseluruhan capaian kinerja ini berada di kategori sangat baik. Jika dilihat dari hasil yang telah dicapai khususnya indikator Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan memang berada diangka cukup sebesar 60% dimana dari target yang ditetapkan sebesar 35 target hanya terealisasi sebanyak 21. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga program yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan untuk realisasi lainnya sudah tercapai dengan kategori baik dan baik sekali. Sedangkan untuk indikator Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat realisasi mencapai lebih dari target yang ditetapkan dengan kategori baik sekali sebesar 402.86%, dimana dari 35 target yang direncanakan realisasi mencapai 141 lokasi yang terlaksana kegiatan dimaksud, hal ini tidak terlepas dikarenakan banyaknya fasilitas agama baik mesjid ataupun mushalla yang mengajukan penentuan kembali arah kiblat yang kemungkinan bergeser akibat pembangunan dan perluasan bangunan tersebut. Adapun Cara Menentukan Arah Kiblat dapat diukur melalui beberapa cara :

1. Menggunakan Benda Ketika Terjadi Fenomena Rashdul Qiblah. Pertama, arah **kiblat** dapat ditentukan dengan bantuan benda tegak ketika terjadi fenomena Matahari berada di atas Kakbah atau Rashdul Qiblah.
2. Menggunakan Google Maps. Cara menentukan arah kiblat yang kedua adalah menggunakan Google Maps. Layanan yang disediakan oleh Google ini menggunakan sistem Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui lokasi yang akurat. Teknologi ini memanfaatkan informasi yang diperoleh dari berbagai satelit
3. Menggunakan Aplikasi Petunjuk Kiblat. Selain aplikasi Google Maps yang menggunakan bantuan GPS, arah kiblat juga dapat diketahui menggunakan bantuan aplikasi lain yang dapat diunduh melalui perangkat masing-masing. Beberapa aplikasi di antaranya Qibla Compass, Qibla Finder, Arah Kiblat, dan Qibla Connect, dll.



Pemantauan hilal penentuan awal Ramadhan di Observatorium Hilal Tgk. Chik Kuta Karang Lhoknga Aceh Besar

Jika dituangkan dalam grafik maka capaian sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran Strategis 16 : Meningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)

Meningkatnya kualitas pelayanan pernikahan dan rujukan (nikah/rujuk) dalam konteks Islam menjadi sebuah perhatian positif yang mencerminkan komitmen untuk memastikan keberlangsungan keluarga dan masyarakat yang kokoh berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Dalam beberapa komunitas, lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah semakin mengarah pada pemberdayaan petugas nikah dan konselor pernikahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Para petugas nikah dilatih untuk memberikan pendekatan yang holistik, memberikan pemahaman mendalam terhadap ajaran agama terkait pernikahan, serta

memberikan dukungan konseling sebelum dan sesudah pernikahan.

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan enam Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Jumlah KUA yang direvitalisasi, Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana, Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah, Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah, Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina dan Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan. Dengan realisasi total mencapai 123,46% dengan kategori baik sekali, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1 Jumlah KUA yang direvitalisasi	5	16.00	320.00	Sangat Baik
		2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	15	5.00	33.33	Kurang
		3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	8300	8500.00	102.41	Sangat Baik
		4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	3300	3190.00	96.67	Baik
		5 Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina	165	160.00	96.97	Baik
		6 Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	220	201.00	91.36	Baik
Rerata Capaian Sasaran 16					123.46	Sangat Baik

Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk dalam konteks Islam menjadi aspek penting dalam memastikan proses tersebut berlangsung sesuai dengan nilai-nilai agama dan standar hukum yang berlaku. Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan ini melibatkan peningkatan profesionalisme para pengelola dan penyelenggara pelayanan nikah/rujuk, serta pemahaman mendalam terhadap hukum Islam yang relevan. Selain itu, penyediaan bimbingan pranikah yang komprehensif dan dukungan konseling pasca-rujuk dapat membantu mempersiapkan calon pasangan secara mental, emosional, dan spiritual. Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kerukunan, pelayanan nikah/rujuk yang berkualitas dapat memperkuat ikatan keluarga dalam masyarakat Muslim, serta memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sosial dan harmoni keluarga.

Dilihat dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tercapai keberhasilan yang luar biasa, karena dari target yang telah ditetapkan, realisasi mencapai 123,46%. Hal ini tercapai berkat

dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintah yang dalam hal ini telah menganggarkan bantuan untuk revitalisasi anggaran dalam bentuk dana SBSN sehingga beberapa KUA telah berhasil di revitalisasi dan ditingkatkan sarana dan prasarananya sehingga nantinya dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas dimaksud. Jika dilihat dari porsi anggaran, anggaran Kemenag didominasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 85 persen, sementara fungsi agama 15 persen. Fungsi anggaran sebesar 15% inilah yang digunakan untuk berbagai kebutuhan yang didalamnya juga termasuk untuk kegiatan revitalisasi fisik KUA. Untuk indikator Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana memang tidak mencapai target yang ditetapkan dengan capaian hanya 5 dari 15 target dengan persentase sebesar 33,33% dengan kategori kurang. Hal ini tentunya diakibatkan sangat terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga program tidak dapat terlaksana sesuai target.



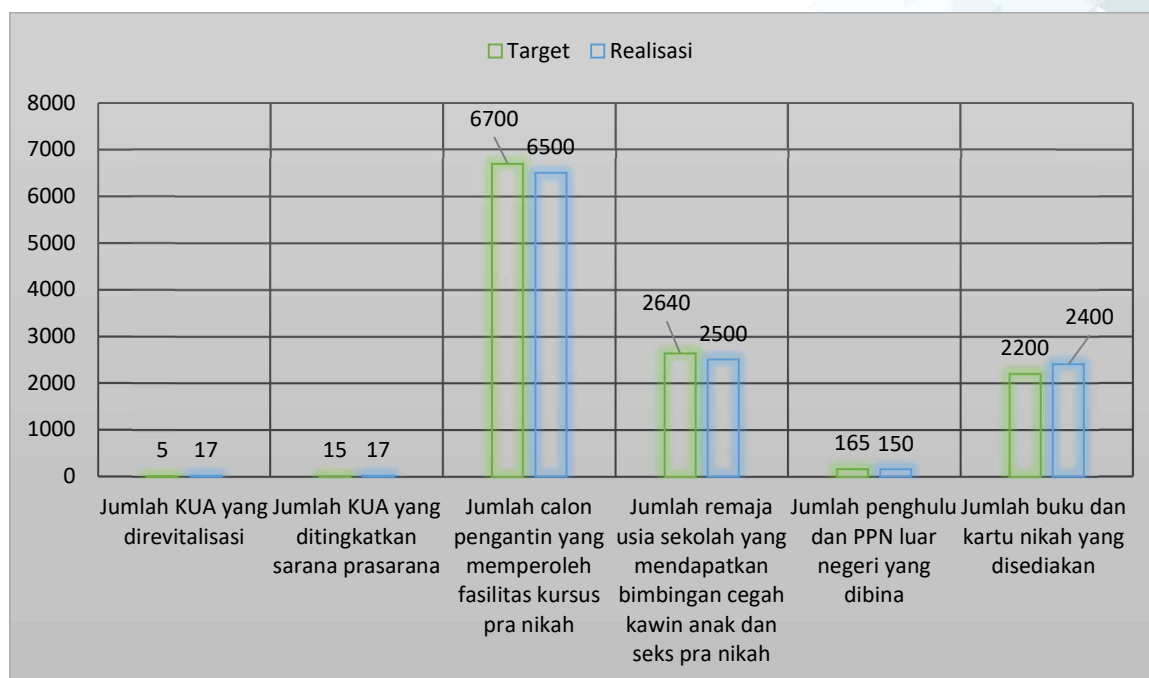
Salah satu KUA di yang telah selesai di revitalisasi fisiknya

Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah dan Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan pembinaan langsung kepada para calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Sedangkan untuk cegah kawin anak dan seks pra nikah, pembinaan dilaksanakan dengan langsung turun ke sekolah sekolah.

Dalam meningkatkan pelayanan di KUA integrasi teknologi juga sangat berperan besar, karena dengan adanya integrasi teknologi dalam pelayanan nikah/rujuk juga turut berkontribusi pada peningkatan kualitas. Pendaftaran online, penyediaan sumber daya daring mengenai hukum pernikahan Islam, dan konseling jarak jauh adalah beberapa inovasi yang membantu

memudahkan akses dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pernikahan dalam pandangan agama. Peningkatan kualitas pelayanan nikah/rujuk ini bukan hanya sebatas administratif, melainkan juga memperkuat persiapan mental dan spiritual calon pasangan, dengan harapan mampu menciptakan pondasi yang kuat untuk keluarga yang berbahagia dan berkembang sesuai dengan ajaran Islam.

Jika dituangkan dalam grafik maka capaian sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran Strategis 17 : Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya. Dengan realisasi total mencapai 5,44% dengan kategori kurang, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	3493	190	5.44	Kurang
Rerata Capaian Sasaran 17					5.44	Kurang

Indikator ini diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kata

lain belum telah terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan. Secara keseluruhan capaian kinerja ini berada di kategori Baik. Rumah atau keluarga adalah tempat asal individu. Setiap orang berasal dari keluarga tertentu dan mendapat bekal kehidupan yang paling awal dari keluarga. Keluarga memberikan sumbangan yang sangat besar dan tiada temilai harganya dalam pertimbangan individu.

Dengan bimbingan dan layanan pusaka, anggota keluarga dapat memahami nilai-nilai keagamaan, etika, dan moral yang menjadi landasan hidup mereka. Pusaka sakinah menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, memberikan arahan bagi setiap anggota keluarga untuk saling mendukung dan memahami satu sama lain. Dengan demikian, keluarga yang menerapkan bimbingan dan layanan pusaka sakinah dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, saling pengertian, dan kebersamaan yang erat.

Bimbingan dan layanan pusaka sakinah juga memainkan peran kunci dalam membangun komunikasi yang efektif antara anggota keluarga. Dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai keluarga dan norma-norma yang dijunjung tinggi, keluarga tersebut dapat mengatasi konflik dengan bijaksana dan mencari solusi yang bersifat konstruktif. Pusaka sakinah memberikan dasar untuk mencapai tujuan



Kegiatan DWP Kemenag Provinsi Aceh penguatan Keluarga Sakinah

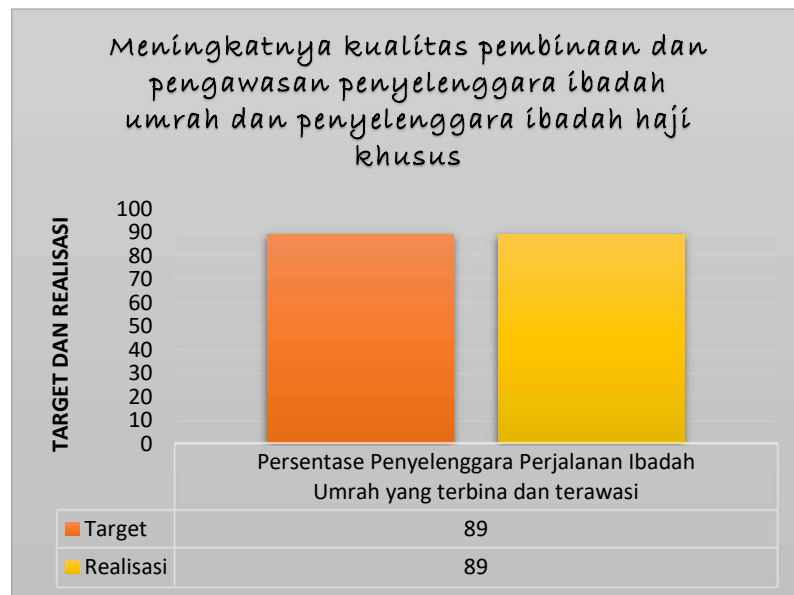
Dalam hal itu, kondisi keluarga yang kurang memadai dapat memberikan andil yang cukup besar pula terhadap kekurangserasian yang terdapat pada diri individu. Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang baru tumbuh dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal, dan spiritualitasnya. Dalam naungan keluarga, perasaan cinta, empati dan solidaritas berpadu dan menyatu. Anak-anak pun akan bertabiat dengan tabiat yang biasa dilekati sepanjang hidupnya. Lalu dengan petunjuk dan arahan keluarga, anak itu akan dapat menyongsong hidup, memahami makna hidup dan tujuan-tujuannya, serta mengetahui bagaimana berinteraksi dengan makhluk hidup.

Sasaran Strategis 18 : Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi. Dengan realisasi total sebesar 100% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	90	90	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 18					100.00	Baik

Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menjadi tonggak sejarah baru dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, melalui 12 perbaikan tata kelola. RUU ini telah disahkan sebagai undang-undang. Perjalanan ibadah Umrah yang terbina dan terawasi melibatkan perencanaan yang cermat dan penuh perhatian terhadap aspek spiritual, logistik, dan kenyamanan peserta. Sebuah agensi perjalanan yang berkomitmen untuk memberikan pengalaman ibadah yang terbaik akan menyusun program yang memastikan peserta dapat menjalankan setiap tahapan ibadah dengan tulus dan khidmat. Mulai dari proses pendaftaran hingga kembali ke tanah air, setiap langkah diawasi dengan ketelitian, sehingga peserta dapat fokus sepenuhnya pada ibadah mereka tanpa terganggu oleh masalah praktis.



Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi biasanya mencakup berbagai standar atau kategori untuk memastikan pengalaman ibadah yang berkualitas dan aman. Berikut adalah beberapa standar atau kategori yang umumnya diperhatikan:

1. Logistik dan Akomodasi:

- Transportasi yang aman dan nyaman dari dan ke tanah suci.
- Akomodasi yang sesuai dengan standar kenyamanan dan kebersihan.
- Fasilitas transportasi dalam kota yang memudahkan peserta dalam menunaikan ibadah.

2. Pendampingan Spiritual:

- Pendampingan oleh ulama atau pendeta yang berpengetahuan tentang tata cara ibadah Umrah.
- Sesi pengajaran dan pencerahan tentang makna dan pentingnya setiap ritual Umrah.
- Bimbingan dalam menjalankan ibadah dengan benar dan khusyuk.

3. Pemenuhan Syarat Ibadah:

- Pastikan semua syarat dan rukun ibadah Umrah dipahami dan terpenuhi.
- Fasilitas untuk memudahkan peserta menjalankan semua aspek ibadah, termasuk tawaf, sai, dan hal-hal lainnya.

4. Dukungan Medis dan Keamanan:

- Pelayanan kesehatan yang siap sedia, termasuk fasilitas medis dan perawat.
- Keamanan yang terjamin untuk melindungi peserta selama perjalanan dan di tempat-tempat ibadah.

5. Pelayanan Informasi dan Komunikasi:

- Komunikasi yang efektif dan informasi yang jelas seputar jadwal, perubahan, dan instruksi selama perjalanan.
 - Fasilitas komunikasi untuk memudahkan peserta berhubungan dengan keluarga dan teman-teman mereka.
6. Pengaturan Keuangan dan Administrasi:
- Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana peserta.
 - Administrasi yang rapi untuk memastikan semua dokumen dan perizinan terkait perjalanan terpenuhi.
7. Evaluasi dan Umpan Balik:
- Mekanisme evaluasi untuk mengukur kepuasan peserta dan memperbaiki layanan di masa mendatang.
 - Menerima umpan balik untuk terus meningkatkan kualitas perjalanan Umrah.

Melalui pemenuhan standar dan kategori ini, perjalanan Ibadah Umrah dapat terbina dan terawasi dengan baik, memberikan pengalaman ibadah yang berkesan dan menyeluruh bagi peserta.



Peresmian gedung Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Kabupaten Bener Meriah

Sasaran Strategis 19 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji menjadi esensial dalam memastikan bahwa proses pendaftaran dan penyelenggaraan haji berjalan lancar, efisien, dan adil bagi para calon jamaah. Peningkatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan

sistem administrasi dan teknologi informasi yang memungkinkan pendaftaran secara online yang mudah dan transparan, hingga peningkatan layanan informasi dan bimbingan kepada calon jamaah terkait persyaratan, prosedur, dan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan dan Persentase calon jamaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan. Dengan realisasi total mencapai 144,72% dengan kategori sangat Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	42.23	80	189.44	Sangat Baik
		2 Persentase calon jamaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0.35	0.35	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 19					144.72	Sangat Baik

Dilihat dari hasil tabel diatas Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan telah mendekati atau bahkan bisa dikatakan telah mencapai bahkan melebihi target sebagaimana ditetapkan. Hal ini tercapai berkat dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintah yang dalam hal ini telah mengalokasikan anggaran dalam bentuk dana SBSN sehingga beberapa pusat layanan haji telah berhasil di revitalisasi dan ditingkatkan sarana dan prasarannya sehingga nantinya dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas dimaksud baik untuk pendaftaran haji dan berbagai kegiatan lainnya. Selama tahun 2023 ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah merealisasikan pembangunan 3 gedung PLHUT baru, yang berlokasi di Kabupaten Simeulue, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bener Meriah.

Di tengah hiruk-pikuk perjalanan ibadah Haji dan Umrah, hadirnya Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) menjadi sebuah oase yang menyediakan beragam layanan bagi jamaah. Gedung PLHUT menjadi pusat koordinasi yang menjembatani kebutuhan praktis dan spiritual. Fungsi gedung PLHUT mencakup berbagai aspek, mulai dari fasilitas akomodasi yang nyaman hingga ruang pelayanan kesehatan yang siap sedia. Di dalamnya, terdapat tim pendamping spiritual yang memberikan bimbingan dan pencerahan terkait tata cara ibadah Haji dan Umrah. Informasi terkini mengenai jadwal ibadah, transportasi, dan kebijakan terbaru juga dapat diperoleh di pusat ini. Melalui pengelolaan terpadu, PLHUT bertujuan untuk menciptakan pengalaman ibadah yang lancar, khushyuk, dan tak terlupakan bagi semua jamaah.



Peresmian Gedung PLHUT Kota Lhokseumawe

Peresmian Gedung PLHUT Kabupaten Simeulue



Peresmian Gedung PLHUT Kabupaten Bener Meriah



Sedangkan untuk indikator Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan nilai realisasinya 100%. Hal ini dapat di lihat dari data pemberangkatan Jamaah Haji tahun 2023 sebagai berikut :

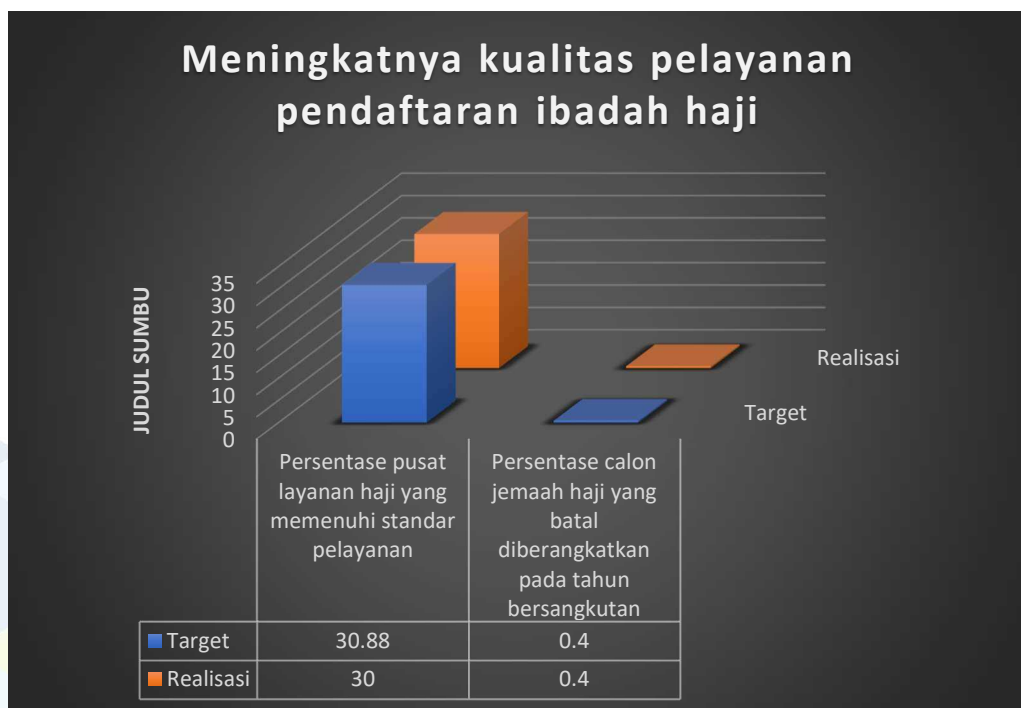
Alokasi Jamaah Aceh tahun ini	4.378 orang (belum termasuk alokasi jemaah tambahan)
Jamaah sudah berangkat	4.561 orang (s.d kloter 12)
Rencana Kuota Jamaah Tambahan Aceh	115 orang
Total Jamaah Awal + Alokasi Jamaah Tambahan	4.493 orang
Jumlah Jamaah Berangkat Sampai Kloter 12	4.561 orang

No.	KLOTER	ASAL KAB/KOTA	ALOKASI PERKLOTER	JAMAAH BERANGKAT	OPEN SEAT
1	BTJ-001	Banda Aceh, Aceh Besar, Pijay	393	393	-
2	BTJ-002	Banda Aceh, Aceh Besar, Langsa, Pidie	393	393	-

3	BTJ-003	A. Barat, A. Jaya, A. Utara dan Nagan Raya	393	390	3
4	BTJ-004	Lhokseumawe, Pidie dan A. Utara	393	387	6
5	BTJ-005	A. Tenggara, Bener Meriah, A. Tengah, Gayo Lues, B. Aceh, Pidie	393	392	1
6	BTJ-006	Bireuen, Gayo Lues, Lhokseumawe, Bener Meriah	393	390	3
7	BTJ-007	Simeulue, Subulussalam, Abdya, A. Selatan, Singkil, B. Aceh, Bireuen dan Pidie	393	391	2
8	BTJ-008	A. Utara, A. Selatan dan Lhokseumawe	393	391	2
9	BTJ-009	B. Aceh, Sabang, A. Besar dan A. Utara	393	391	2
10	BTJ-010	A. Timur, A. Tamiang, B. Aceh, Langsa, A. Utara, A. Besar	393	392	1
11	BTJ-011	B. Aceh, A. Besar, Pidie, Pijay, Subulussalam, B. Meriah, Langsa, Lhokseumawe, A. Tenggara, A. Tamiang, A. Tengah, A. Utara dan Simeulue	393	393	-
12	BTJ-012 + Kuota Tambahan	B. Aceh, A. Besar, Pidie, Pijay, Subulussalam, B. Meriah, Langsa, Lhokseumawe, A. Tengah A. Tamiang, A. Utara dan Simeulue, A. Barat, Abdya, Nagan Raya, B. Meriah (19 Kab/Kota)	170	258	
		JUMLAH	4,493	4,561	20

20 Orang jamaah yang tidak berangkat jika dikalkulasikan dalam persentase dibandingkan dengan jumlah jamaah berangkat, maka akan menghasilkan 0,44% jumlah jamaah yang tidak berangkat. Sehingga realisasinya tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji Jika dituangkan dalam grafik maka capaian sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran Strategis 20 : Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan dan Persentase pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu. Dengan realisasi total 218,39% dengan kategori Sangat Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	1 Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	27	90	333.33	Sangat Baik
		2 Persentase pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu	87	90	103.45	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 20					218.39	Sangat Baik

Menurut Peraturan Agama Republik Indonesia (2015), Asrama haji merupakan unit pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Asrama haji embarkasi Aceh telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan dan memenuhi standar layanan seperti :

1. Renovasi dan Pemeliharaan, dengan melakukan perawatan berkala dan perbaikan untuk memastikan kondisi fisik asrama selalu terjaga dengan baik
2. Upgrade Fasilitas Ibadah, Menyediakan ruang ibadah yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan jamaah haji membangun miniatur ka'bah di lingkungan asrama sebagai media pembelajaran.
3. Upgrade Keamanan Asrama, Memperkuat sistem keamanan dengan menggunakan teknologi terkini, seperti kamera pengawas, keamanan elektronik, dan personel keamanan yang terlatih.
4. Peningkatan Layanan, Meningkatkan layanan yang diberikan kepada jamaah haji, termasuk penyediaan makanan, layanan kebersihan, dan transportasi internal.
5. Sistem Pemantauan, menerapkan sistem pemantauan untuk mengawasi kondisi asrama secara real-time.
6. Membangun Kerjasama dengan Otoritas Terkait dan Swasta



Irjen Kemenag Faisal didampingi Plt Kepala Kanwil Ahmad Yani, Kabid PHU Drs H Arijal dan Kepala UPT Asrama Haji Ali Amran Abbas memantau kesiapan Asrama Haji Emberkasi Aceh dalam rangka menyambut musim haji tahun 2023

Untuk indikator Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu telah tercapai sesuai target, hal ini tidak terlepas dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan terutama dalam membangun kerjasama dan koordinasi dengan Pemda masing-masing kabupaten kota dalam hal pelayanan transportasi dari masing-masing kabupaten kota ke asrama haji. Untuk pelayanan transportasi dari asrama haji ke bandara, tentunya hal itu sudah termuat dalam kerjasama antara Kementerian Agama RI dengan PT Garuda Indonesia selaku pemenang Tender pemberangkatan jemaah haji Indonesia.

Secara umum asrama haji yang memenuhi standar pelayanan dan pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu telah tercapai sesuai dengan target dan rencana yang diharapkan, hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut serta terlibat untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh jemaah haji yang berangkat menuju melaksanakan ibadah haji, sehingga indeks kepuasan pelayanan jemaah dapat terus meningkat.

Sasaran Strategis 21 : Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji

Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji merupakan langkah krusial dalam mempersiapkan mereka secara spiritual, fisik, dan mental untuk menjalani ibadah haji dengan penuh kesadaran dan ketaqwaan. Hal ini melibatkan penyediaan program pembinaan yang komprehensif, termasuk bimbingan keagamaan, pelatihan praktis terkait pelaksanaan ibadah haji, serta penanganan kesehatan dan keselamatan. Dengan meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji, diharapkan mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan lebih baik, mendapatkan pengalaman yang bermakna, dan kembali ke tanah air dengan pembaharuan

spiritual yang lebih dalam. Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji. Dengan realisasi total 102,08% dengan kategori Sangat Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	96	98	102.08	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 21					102.08	Sangat Baik

Untuk sasaran kegiatan diatas, realisasi capaian kinerja telah tercapai sesuai dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari telah mulai dibukanya kembali jemaah haji bagi peziarah yang berasal dari luar arab saudi, walaupun pada kenyataannya memang masih dibatasinya jumlah jemaah dari setiap negara yang diperbolehkan masuk ke arab saudi dan adanya pembatasan usia jemaah yang diterima oleh pemerintah arab saudi. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 96 target yang ditetapkan realisasinya mencapai 98. Hal ini tidak terlepas dari antusiasme para calon jemaah untuk menambah pengetahuan demi kekhusukan nantinya dalam menjalankan ibadah haji, yang mana kita tahu saat ini waiting list yang sudah mencapai puluhan tahun.

Manasik haji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan manasik haji, calon jemaah haji akan dilatih tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakannya, misalnya rukun haji, persyaratan, wajib, sunah, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, para calon jemaah haji juga akan belajar bagaimana cara melakukan praktik tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumrah, dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci.

Manasik haji juga diperlukan guna memberikan pemahaman kepada setiap calon jemaah haji tentang tujuan utama keberangkatan mereka ke tanah suci. Manasik haji sangat bermanfaat bagi para calon jemaah haji, karena setelah melaksanakan manasik haji, para calon jemaah haji akan dapat memahami hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan ibadah haji nantinya. Para calon jemaah haji juga mempelajari budaya, bahasa, dan kondisi alam di Arab Saudi.



Pelaksanaan Masik Haji di salah satu Kabupaten di Aceh

Ada beberapa pedoman umum Umrah dan Haji yang harus diketahui oleh para jamaah ketika berada di Medinah dan Mekkah ingin melakukan Ibadah Haji atau Umrah. Hal-hal yang kiranya tidak kita terapkan di Tanah Air, sebaiknya harus dilakukan di Tanah Suci seperti menjaga kesopanan terhadap orang lain yang berasal dari banyak negara. Hal ini harus dilakukan agar ibadah lancar dan khusyuk

Sasaran Strategis 22 : Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service) Dengan realisasi total mencapai 100% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	97	97	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 22					100.00	Baik

Pentingnya peranan informasi dan teknologi dalam pengelolaan suatu pelayanan penyelenggaraan ibadah haji merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Faktor pemicunya ialah semakin majunya masyarakat Indonesia karena berbagai faktor seperti pendidikan, demokrasi politik, pembangunan ekonomi serta berbagai macam permasalahan yang bentuk, jenis dan

intensitasnya berbeda dari masa-masa sebelumnya.

Indikator ini diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi sesuai dengan target Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service) yang ditetapkan atau dengan kata lain telah terealisasi bahkan melebihi target yang diharapkan dengan melihat langsung dan mensurvei bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan haji yang telah diberikan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Agama.

Pengelolaan data jamaah haji Indonesia menggunakan aplikasi SSKOHAT. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SSKOHAT) adalah sistem informasi yang digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mendukung manajemen dan pelaksanaan ibadah haji. Siskohat berfungsi sebagai platform terintegrasi yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran calon jamaah, pengelolaan data pribadi, alokasi kuota haji, hingga monitoring pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan seluruh proses haji, memberikan dukungan teknologi yang memadai bagi pihak berwenang dan jamaah haji guna memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem Komputerisasi Haji Terpadu, memiliki beberapa fungsi utama dalam pengelolaan dan pelaksanaan ibadah haji sebagai berikut :

1. Pendaftaran Jamaah Haji
2. Pengelolaan Data Jamaah
3. Alokasi Kuota Haji
4. Manajemen Transportasi dan Penginapan
5. Monitoring dan Pemantauan
6. Pelaporan dan Analisis Data
7. Integrasi dengan Layanan Terkait
8. Pemberian Informasi kepada Jamaah

Sasaran Strategis 23 : Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase amil yang dibina dan Persentase lembaga zakat yang dibina. Dengan realisasi total mencapai 97,06% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

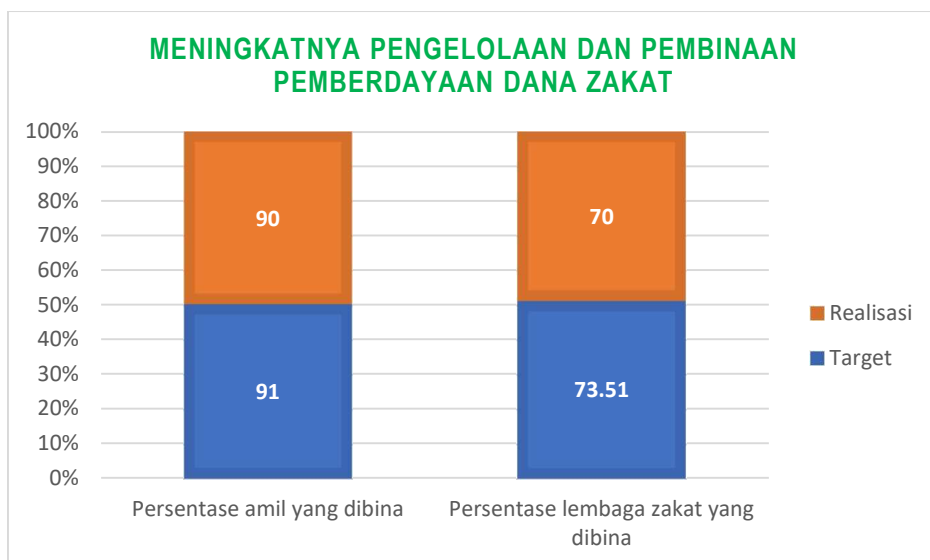
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1 Persentase amil yang dibina	91	90	98.90	Baik
		2 Persentase lembaga zakat yang dibina	73.51	70	95.23	Baik
Rerata Capaian Sasaran 23					97.06	Baik

Berdasarkan Data Laporan Kinerja Baitul Mal Aceh selama tahun 2023 telah menyalurkan zakat senilai Rp 84,3 miliar kepada 37.729 mustahik di Provinsi Aceh. Penyaluran zakat tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, mencakup sektor kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan syiar Islam, baik yang bersifat konsumtif maupun produkti. Kontribusi zakat memiliki nilai besar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di Aceh. dilihat dari persentase data diatas, pembinaan amil zakat sangat penting dilakukan karena dana umat yang akan disalurkan merupakan suatu kewajiban yang harus tersalurkan sesuai dengan tuntunan hukum agama dan untuk jumlah amil yang dibina memang sudah berada dikategori baik dengan persentase mencapai 97,06%

Sedangkan untuk indikator lembaga zakat yang dibina, realisasi kinerja juga tergolong cukup baik dengan persentase mencapai 96,29% walaupun keterbatasan anggaran masih menjadi kendala yang berarti namun hal tersebut dapat teratasi dengan kerjasama yang baik lintas instansi seperti dengan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh dan Baznas provinsi Aceh.

Zakat yang disalurkan telah memberikan kontribusi signifikan dalam memberikan akses modal dan mendorong semangat berdikari bagi sekitar 2.000 mustahik melalui program modal usaha ultra mikro dan Zakat Family Development. Serapan zakat tersebut juga dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga kurang mampu mencapai 11,6 miliar rupiah, tidak hanya itu, zakat yang dikelola tersebut juga turut berkontribusi dalam menanggulangi masalah stunting yang menjadi fokus Pemerintah Aceh. Selama tahun 2023, zakat yang disalurkan untuk penanggulangan stunting mencapai Rp 4,53 miliar, dengan penerima manfaat sebanyak 608 keluarga di Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh sendiri pengelolaan waqaf dikelola oleh Baitul Mal Aceh.

Berikut grafik capaian sasaran kegiatan dimaksud :



Sasaran Strategis 24 : Meningkatnya pengelolaan aset wakaf

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan tiga Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase lembaga wakaf yang dibina, Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan, Persentase tanah wakaf yang bersertifikat. Dengan perhitungan realisasi total mencapai 98,66% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1 Persentase lembaga wakaf yang dibina	80	80	100.00	Baik
		2 Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	20	20	100.00	Baik
		3 Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	16.67	16	95.98	Baik
Rerata Capaian Sasaran 24					98.66	Baik

Selain dana zakat di atas, Kementerian Agama Provinsi Aceh juga mengelola wakaf yang mengalami peningkatan partisipasi umat dalam berwakaf khususnya wakaf tanah dan wakaf uang. Pengelolaan wakaf dilakukan melalui Sistem informasi wakaf Kementerian Agama RI tercatat selama tahun 2023 terjadi peningkatan umat Islam mewakafkan pada sektor keagamaan dan pendidikan. Pada Tahun 2023, telah terlaksana program inkubasi wakaf produktif melalui kerjasama antara Kementerian Agama, BWI dan Forum Wakaf produktif. Program ini bertujuan untuk optimalisasi tanah wakaf agar lebih produktif dan bernilai ekonomis.

Akta ikrar wakaf merupakan dokumen hukum yang secara resmi mendaftarkan komitmen atau janji seseorang untuk menyisihkan harta atau aset tertentu sebagai wakaf, yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan umum atau amal. Proses penerbitan akta ini melibatkan beberapa langkah formal, seperti identifikasi harta atau aset yang akan disisihkan, penetapan tujuan wakaf, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan wakaf tersebut. Akta ikrar wakaf juga mencatat dengan rinci hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, termasuk pihak wakif (pemberi wakaf), nazhir (pengelola wakaf), dan mungkin juga penerima manfaat wakaf. Dokumen ini memainkan peran penting dalam memberikan kejelasan hukum terkait wakaf, melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, serta memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan wakaf tersebut sesuai dengan niat dan tujuan awal sang wakif.

Sebelum penerbitan sertifikat tanah waqaf, terlebih dahulu harus diterbitkan akta ikrar waqaf baru selanjutnya dapat dilakukan proses penerbitan sertifikat tanah waqaf. Tahapan untuk penerbitan sertifikat tanah waqaf (wakaf) dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan regulasi di suatu negara atau wilayah. Namun, adapaun tahapan umum yang dapat ditempuh dalam penerbitan sertifikat tanah waqaf sebagai berikut :

1. Persiapan Dokumen, meliputi Identifikasi harta atau tanah yang akan diwakafkan dan Persiapkan dokumen-dokumen kepemilikan dan legalitas terkait tanah tersebut.
2. Ikrar Wakaf, Pihak wakif (pemberi wakaf) menyusun ikrar wakaf yang berisi niat dan ketentuan-ketentuan terkait tanah waqaf.
3. Persetujuan Otoritas Agama atau Hukum
4. Pendaftaran Wakaf
5. Pemeriksaan Legalitas, meliputi pemeriksaan legalitas dan administrasi oleh instansi terkait untuk memastikan kelengkapan dokumen dan mematuhi regulasi yang berlaku.
6. Penilaian Nilai Tanah, dengan melibatkan Penilai profesional untuk menentukan nilai wakaf, terutama jika ada kebutuhan untuk menentukan nilai pajak atau nilai wakaf itu sendiri.
7. Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf, dilakukan setelah semua persyaratan terpenuhi.

Pelaporan Periodik:

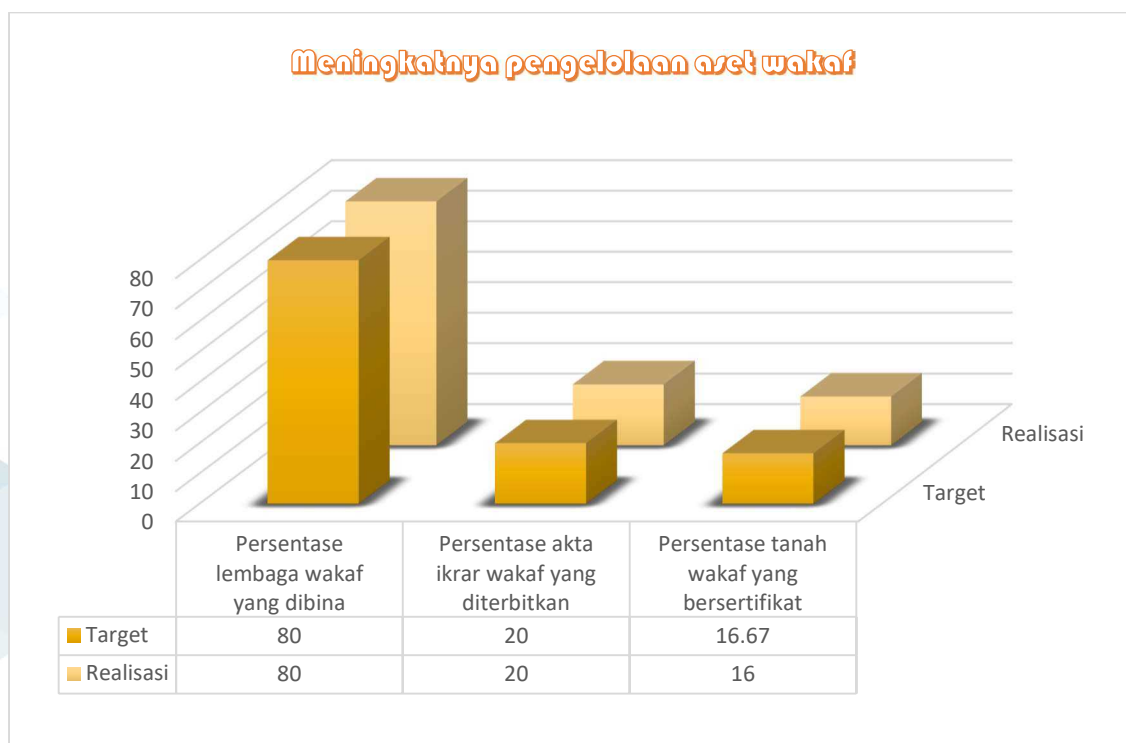
Penting untuk diketahui bahwa proses ini dapat bervariasi dan tergantung pada hukum dan regulasi setempat.

Kanwil Kemenag Aceh, Kejati, dan BPN Serahkan 1.788 Sertifikat Tanah Wakaf

Versi Audio



Sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah Kemenag dalam menjaga dan memaksimalkan fungsi wakaf. Dengan sertifikasi ini diharapkan aset-aset wakaf terjaga legalitasnya dan memudahkan dalam pengelolaannya. Waqaf merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan bangsa. Wakaf merupakan penyerahan harta benda yang dimiliki oleh seseorang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peruntukannya. Untuk itu, sertifikasi tanah wakaf ini merupakan upaya yang harus dilakukan dalam menjaga legalitas serta untuk memaksimalkan fungsi wakaf demi kemanfaatan aset wakaf secara optimal bagi umat dan bangsa.



Sasaran Strategis 25 : Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku, Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/ sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum, Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan, Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan. Dengan perhitungan realisasi total mencapai 200,00% dengan kategori Sangat Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1	Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	95	95	100.00	Baik
		2	Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	90	90	100.00	Baik
		3	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	1	2	200.00	Sangat Baik
		4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	1	4	400.00	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 25					200.00	Sangat Baik	

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa indikator-indikator telah dilaksanakan seluruhnya dan terealisasi dengan baik dan sangat baik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan baik dari masyarakat maupun pemerintah sendiri selaku regulator kurikulum. Bahkan untuk indikator Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan realisasinya mencapai 4 kali lipat dari target yang ditetapkan sebesar 400%.

Berbagai Kebijakan dalam peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas telah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTK yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional adalah:

- peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK;
- peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
- peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
- diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTK berbasis kekuatan lokal kelembagaan;
- pengendalian dan pembinaan PTKS yang kurang bermutu;

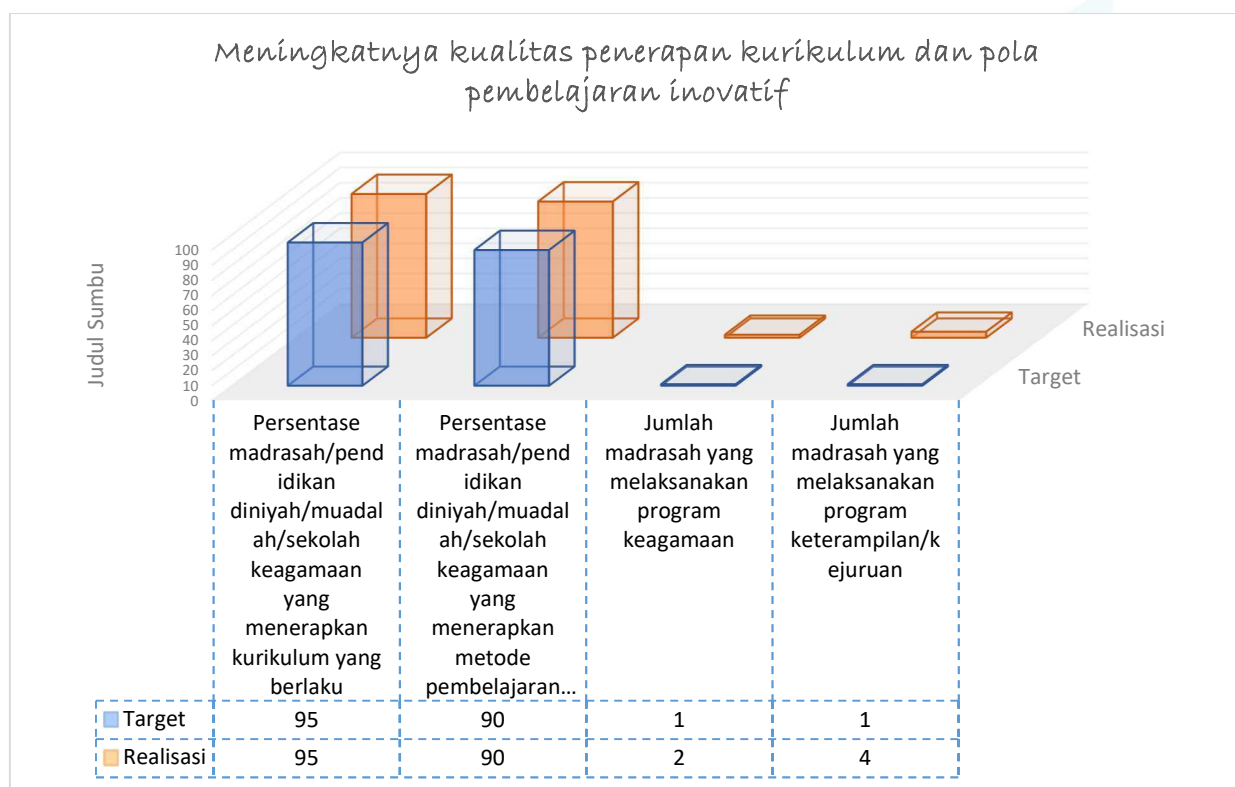
f. dan berbagai program lainnya.

Penerapan kurikulum yang berlaku dalam dunia pendidikan merupakan sebuah proses kompleks yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penerapan Kurikulum 2013 (K13) di Indonesia menandakan perubahan paradigma dalam dunia pendidikan, yang lebih menekankan pada pengembangan keterampilan dan karakter siswa. K13 dirancang untuk memberikan pendekatan holistik yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam upaya mewujudkan Pendidikan Merdeka, kurikulum tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pengembangan kemandirian siswa dalam mengambil inisiatif, bertanggung jawab, dan berkembang sebagai individu yang kreatif dan inovatif. Implementasi K13 di bawah semangat Merdeka bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat aktif dan mandiri dalam proses belajar-mengajar.



Kegiatan Bimtek Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Guru disalah satu Madrasah Swasta di Banda Aceh

Peralihan dari Kurikulum 2013 (K13) ke Kurikulum Merdeka mencerminkan evolusi dalam dunia pendidikan Indonesia yang ditujukan untuk memberikan pendekatan yang lebih dinamis, relevan, dan menekankan pada kemandirian siswa. Awalnya, implementasi K13 mencoba mengintegrasikan pembelajaran holistik dan penilaian berbasis kompetensi, namun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dan perubahan yang dibutuhkan. Peralihan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menekankan pada pemberdayaan siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan mereka. Dengan semangat Merdeka, pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensi uniknya, menciptakan generasi yang memiliki kemandirian, kreativitas, dan karakter tangguh untuk menghadapi tantangan masa depan.



Untuk indikator Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan, pelaksanaan program keagamaan (PK) telah sesuai dengan target yang ditetapkan diaman dari target 1 telah terealisasi sebanyak 1 madrasah. Sampai sejauh ini di Aceh sendiri Madrasah program keagamaan telah dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Banda Aceh dan MAN IC Aceh Timur yang masing-masing telah melaksanakan program boarding school. Dimana di Madrasah tidak hanya mengajarkan pendidikan umum akan tetapi juga mengajarkan pendidikan agama yang tentunya menjadi nilai plus bagi lulusan nantinya sehingga akan memudahkan bagi mereka dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sasaran Strategis 26 : Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan enam Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan, Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan, Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan, Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan, Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan, Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di

madrasah/sekolah keagamaan. Dengan perhitungan realisasi total mencapai 104,97% dengan kategori Sangat Baik. Secara lebih detail dapat dilihat dari tabel sebagaimana dibawah ini :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1 Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	50.03	55	109.93	Sangat Baik
		2 Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	50.03	55	109.93	Sangat Baik
		3 Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	50.03	55	109.93	Sangat Baik
		4 Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan	1	1	100.00	Baik
		5 Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	1	1	100.00	Baik
		6 Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan	100	100	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 26					104.97	Sangat Baik

Capaian dari berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerjanya berada pada kategori sangat baik yaitu untuk indikator Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan, Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dan Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan. Dengan capai kegiatan mencapai diatas 100%.

Ada tiga unsur penilaian agar pegawai dapat menerima tunjangan kinerja yaitu berdasarkan absensi elektronik atau kehadiran, kinerja atau capaian kerja, dan disiplin pegawai. tunjangan kinerja pegawai adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan capaian kinerja dari masing-masing pegawai. Pegawai itu akan menerima tunjangan full apabila tugasnya dapat diselesaikan secara menyeluruh. Kalau pekerjaannya dilaksanakan tidak secara menyeluruh tentunya tunjangan kinerja yang didapatkannya akan fluktuatif. Bisa turun, bisa naik. Jadi,

tunjangan kinerja itu tidak semata-mata diberikan bulat setiap bulannya, namun ada itung-itungannya. Oleh karena itu, prinsip yang harus dipahami bersama adalah tunjangan kinerja itu setiap bulan, bisa naik, bisa turun, jelasnya seraya menambahkan naiknya tunjangan kinerja itu, tidak akan melebihi plafon dan bisa turun sesuai kinerja yang dilakukan oleh pegawai.

Dengan banyaknya jumlah pegawai khususnya guru maka sangat tidak mungkin penilaian kinerja untuk penentuan pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan untuk seluruh guru apalagi untuk mereka yang berada di daerah 3T yang tentunya akan membutuhkan tenaga dan pikiran yang maksimal serta anggaran yang tidak sedikit. Maka untuk proses penilaian tersebut diambil sampel yang diperkirakan mewakili semua kondisi dilapangan sehingga dapat dilaksanakan penilaian untuk penentuan tunjangan yang nantinya diberikan.

Untuk indikator Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan dilaksanakan bertujuan untuk mengukur kompetensi siswa madrasah pada aspek literasi membaca, numerasi, sains, dan literasi sosial budaya. Hasil AKMI menjadi data diagnostik untuk tindaklanjut perbaikan mutu pembelajaran di madrasah. asesmen ini penting dilakukan pada siswa madrasah sebagai metode penilaian yang komprehensif untuk mendiagnosis kelebihan dan kelemahan siswa pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains dan literasi sosial budaya termasuk survei karakter.



Anugerah guru dan tenaga kependidikan berprestasi Tahun 2023

Untuk Indikator Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan realisasi kegiatan telah tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 200% dengan kategori sangat baik. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan dedikasi yang telah dicapai oleh mereka dalam menjalankan profesinya baik sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan.

Sasaran Strategis 27 : Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran dan Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran. Dengan perhitungan realisasi total mencapai 100% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1 Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	35	35	100.00	Baik
		2 Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	35	35	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 27					100.00	Baik

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sangat berkembang di masyarakat terutama dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk mengelola data, meliputi didalamnya memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai macam cara dan prosedur guna menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai guna tinggi. Perkembangan TIK pun terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Implementasi TIK di sekolah akan memberikan kontribusi langsung kepada peningkatan proses manajemen pembelajaran dan administrasi di sekolah. Selain itu TIK peluang untuk mengembangkan bahan ajar, belajar mandiri, motivator bagi siswa untuk mengembangkan kemampuannya dan sebagai alat untuk pengembangan profesi dan mekanisme inovasi dalam sistem monitoring dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Uraian di atas menunjukkan bahwa penerapan TIK di sekolah merupakan solusi yang paling tepat untuk menunjang peningkatan mutu sekolah termasuk keberhasilan penerapan Kurikulum 2013 dan pencapaian standar nasional pendidikan.

Walaupun pelaksanaan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran di Madrasah telah dilaksanakan dan sesuai dengan realisasi yang diharapkan dengan realisasi total mencapai 100%, namun dalam pelaksanaan dilapangan ada 2 kendala utama yang dihadapi antara lain :

- a. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana.
- b. Kurangnya tenaga pendidik di madrasah yang menguasai TIK.

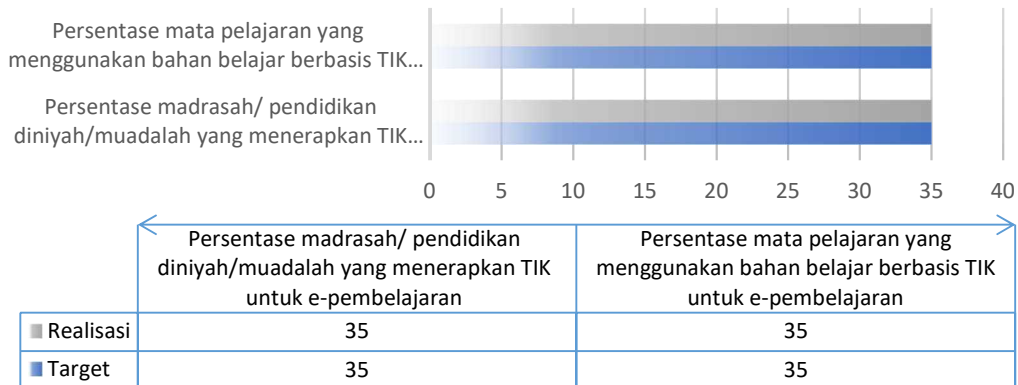
Kelas digital merujuk pada lingkungan pembelajaran yang menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan materi pelajaran dan berinteraksi antara pengajar dan siswa. Dalam kelas digital, alat-alat dan sumber daya digital digunakan sebagai media pembelajaran, menggantikan atau melengkapi metode pembelajaran tradisional. Berbagai teknologi dapat digunakan, termasuk komputer, tablet, proyektor, perangkat lunak pembelajaran, dan akses internet. Kelas digital dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, seperti Pembelajaran Online, E-Book dan Materi Digital, Platform Pembelajaran Kursus, Aplikasi Pendidikan dan Simulasi dan Multimedia.



Kakanwil Kemenag Prov. Aceh melaunching Kelas Digital di Kota Lhokseumawe

Jika kita mengikuti perkembangan saat ini sudah mulai banyak madrasah-madrasah yang akan menerapkan digitalisasi pembelajaran di madrasah, melalui pembentukan kelas khusus yang pembelajarannya secara penuh (full) menerapkan pembelajaran digital. Hal ini tentunya diakibatkan oleh kesadaran pihak madrasah sendiri dan tuntutan dari pemangku kepentingan akan pentingnya menyiapkan generasi yang punya daya saing dan menguasai perkembangan teknologi agar dapat bersaing dimasa yang akan datang.

Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran



Sasaran Strategis 28 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan tujuh Indikator Kinerja Sasaran Strategis dengan perhitungan realisasi total mencapai 98,23% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	80	80	100.00	Baik
		2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	62	62	100.00	Baik
		3	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	61.5	60	97.56	Baik
		4	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	65.5	66	100.76	Sangat Baik
		5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	35	35	100.00	Baik

	6	Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	69	69	100.00	Baik
	7	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	28	25	89.29	Baik
Rerata Capaian Sasaran 28					98.23	Baik

Sarana prasarana pendidikan menjadi penting karena mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui pengadaan sarana prasarana, baik yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang proses belajar-mengajar. Agar sarana prasarana yang ada memiliki nilai daya guna yang tinggi diperlukan pengelolaan yang jelas dan untuk itu perlunya setiap personil memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen sarana prasarana. Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa keberhasilan pendidikan dalam proses belajar mengajar akan dapat tercapai dengan baik apabila memiliki sistem manajemen, salah satunya manajemen sarana prasarana. Untuk indikator Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana, Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dan Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana realisasinya lebih dari seratus persen dengan kategori baik sekali, hal ini tentunya berkat dukungan dan kerja keras dari berbagai pihak.

Jika diamati dari data-data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah sudah berada dalam kategori cukup memadai walaupun memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih perlu penambahan berupa laboratorium bahasa, Laboratorium Komputer dan Laboratorium IPA serta beberapa fasilitas lainnya. Namun tidak dapat dipungkiri juga walaupun status ketersediaan sarana sudah berada dalam kategori cukup tapi masih ada sekolah yang memang kondisi sarana dan prasarananya sangat memprihatikan, maka disinilah perlu kepedulian kita bersama karena kondisi anggaran pemerintah yang terbatas tidak memungkinkan untuk dilakukan pembangunan seluruhnya. Fasilitas yang sudah ada juga perlu dilakukan pemeliharaan oleh semua warga madrasah, pemeliharaan dilakukan guna menjaga sarana prasarana yang ada di madrasah agar sarana yang sudah ada dapat terjaga dan tentunya dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan.

Peningkatan mutu persentase madrasah/sekolah keagamaan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) merupakan suatu tantangan dan prioritas penting dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah tersebut. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan menjadi kunci dalam mendukung upaya peningkatan

mutu persentase madrasah/sekolah keagamaan di daerah 3T. Dukungan finansial dan teknis dari pemerintah pusat, serta partisipasi aktif masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan, akan memberikan dampak positif dalam mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan di tingkat lokal. Selain itu, memanfaatkan potensi lokal dan kearifan lokal dalam proses pembelajaran dapat menjadi strategi efektif untuk menciptakan kurikulum yang lebih kontekstual dan relevan bagi siswa di daerah 3T. Dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, diharapkan persentase madrasah/sekolah keagamaan di daerah 3T dapat mengalami peningkatan signifikan dalam mutu pendidikan.



Silaturahmi ke
Dayah Sirajul
Munir Al Aziziyah
Kota Sabang



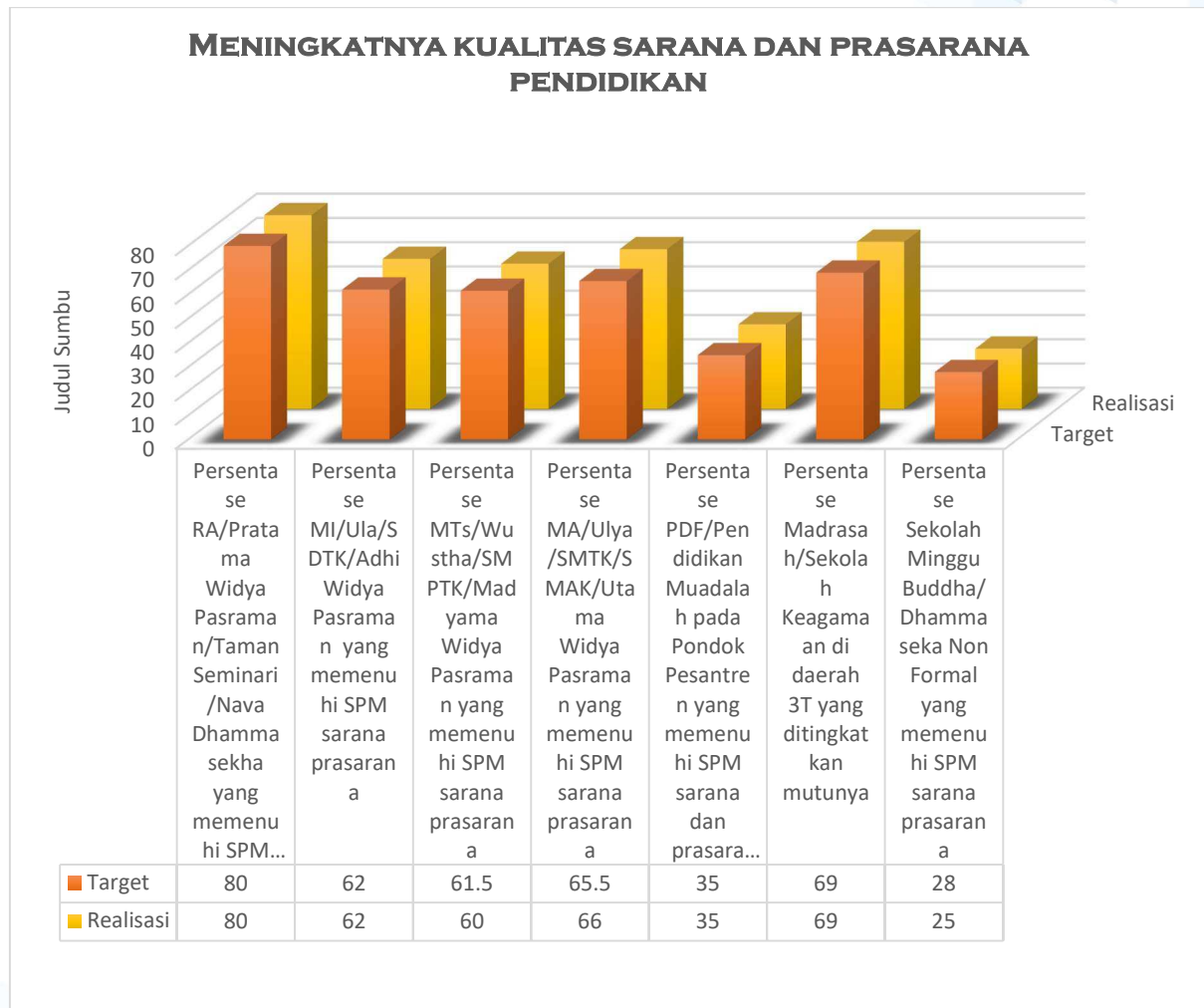
Kunjungan MPD
Subulussalam ke
Ponpes
Mardhatillah

Dalam meningkatkan mutu persentase madrasah/sekolah keagamaan di daerah 3T, beberapa langkah strategis yang telah dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Guru, dengan memberikan pelatihan dan pengembangan terus-menerus kepada guru agar memiliki keterampilan mengajar yang baik dan memahami kebutuhan khusus siswa di daerah 3T.
2. Menggalakkan Partisipasi Aktif Masyarakat, karena dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan peran mereka dalam mendukung sekolah dapat memberikan dampak positif.
3. Pemberian Dukungan Finansial, dilaksanakan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk madrasah/sekolah keagamaan di daerah 3T guna mendukung pembangunan infrastruktur, pengadaan buku dan alat pembelajaran, serta insentif untuk guru, walaupun secara keseluruhan tidak mencukupi, karena keterbatasan anggaran yang disediakan oleh negara.

4. Mendorong Pemanfaatan Teknologi Pendidikan, dengan membantu proses integrasi teknologi pendidikan dapat meningkatkan aksesibilitas materi pembelajaran dan memperluas wawasan siswa. Ini dapat mencakup penyediaan akses internet, penggunaan aplikasi pembelajaran, atau pemanfaatan media pembelajaran yang dapat diakses secara daring.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan persentase madrasah/sekolah keagamaan di daerah 3T dapat mengalami peningkatan mutu yang signifikan, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.



Sasaran Strategis 29 : Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah, Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah, Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan dan Persentase siswa penerima PIP

pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah. Dengan realisasi total mencapai 100,00% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1 Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	167309	167309	100.00	Baik
		2 Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;	7495	7495	100.00	Baik
		3 Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	22	22	100.00	Baik
		4 Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;	20	20	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 29					100.00	Baik

Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat diukur dengan membandingkan target dan capaian realisasi di lapangan. Secara keseluruhan realisasi ini cukup baik karena penyaluran dana BOS dan PIP telah berjalan dengan baik dan lancar.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan dua bentuk dukungan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dana BOS disediakan sebagai bantuan operasional yang bertujuan untuk mendukung kegiatan harian sekolah, seperti pembelian buku, peralatan sekolah, serta pemeliharaan fasilitas. Dana ini memberikan fleksibilitas kepada kepala sekolah untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan mendesak sekolah dan meningkatkan kesejahteraan siswa.

Sementara itu, Program Indonesia Pintar (PIP) lebih difokuskan pada bantuan beasiswa untuk mendukung akses pendidikan bagi siswa kurang mampu. Melalui PIP, siswa yang memenuhi kriteria tertentu dapat menerima bantuan berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk membayar biaya pendidikan, seperti seragam sekolah, buku pelajaran, dan kebutuhan lainnya. Dengan adanya PIP, pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi dan kelulusan siswa dari kalangan ekonomi lemah, sehingga lebih banyak anak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kedua program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan

dukungan finansial kepada sekolah dan siswa.

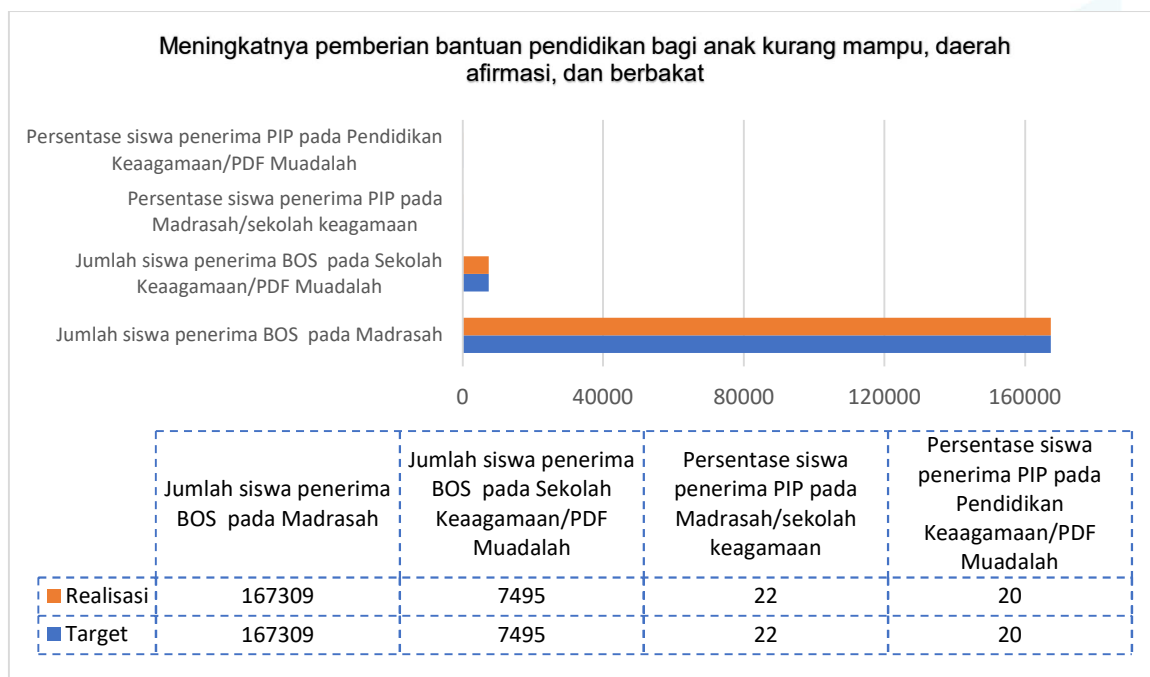
Madrasah Negeri satker MTsN dan MAN pengelolaan dana BOS berjalan lebih cepat dikarenakan DIPA yang dikelola sendiri sedangkan untuk Madrasah Negeri jenjang MI dan madrasah-madrasah swasta lainnya penyaluran dana BOS dilaksanakan oleh Kemenag Kabupaten Kota masing-masing sehingga membutuhkan proses yang sedikit lebih panjang, selanjutnya setiap madrasah tersebut juga telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut. dengan proses kinerja tersebut sehingga indikator Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 106,03%.

Untuk proses penyaluran dana PIP juga telah berjalan dengan cukup baik, karena adanya keselarasan data antara berbagai pihak dan adanya perbaikan dalam mekanisme Penyaluran PIP sebagai salah satu faktor yang mendorong percepatan pada peningkatan APK dan APM. walaupun memang dalam pelaksanaan dilapangan masih tetap ada kendala perbedaan data supplier dengan Bank penyalur sehingga mengakibatkan tersendatnya proses transfer dana dimaksud.

Mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melibatkan beberapa tahapan. Pertama, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran BOS secara nasional, dan kemudian dana tersebut didistribusikan ke daerah berdasarkan formula tertentu yang mempertimbangkan jumlah siswa, tingkat kelas, dan faktor-faktor lainnya. Setelah itu, pemerintah daerah mengalokasikan dana tersebut ke sekolah-sekolah di wilayahnya berdasarkan kebutuhan dan prioritas.

Sementara itu, Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki mekanisme yang berfokus pada bantuan beasiswa untuk siswa kurang mampu. Penerima beasiswa PIP biasanya ditentukan berdasarkan kriteria ekonomi, di mana keluarga siswa harus memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh bantuan tersebut. Proses seleksi dan verifikasi dilakukan oleh pihak sekolah dan instansi terkait untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran.

Dalam kedua program tersebut, sekolah memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam mengelola Dana BOS untuk kebutuhan operasional sehari-hari, sementara PIP disalurkan langsung kepada siswa penerima beasiswa atau kepada pihak yang membutuhkan, seperti toko seragam sekolah atau toko buku.



Sasaran Strategis 30 : Meningkatnya kualitas penanganan ATS

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dan Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren. Dengan realisasi total mencapai 100,00% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1 yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	0.1	0.1	100.00	Baik
		2 Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	38	38	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 30					100.00	Baik

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Secara umum penyelenggaraan pendidikan inklusi khususnya di Madrasah masih sangat terbatas di Aceh, hal ini karena secara umum para peserta didik yang mengalami kasus inklusi lebih banyak bersekolah

di sekolah luar biasa (LB). Tidak dapat dipungkiri memang ada yang bersekolah di madrasah dan siswa-siswi tersebut tetap mendapatkan perhatian dan fasilitas sebagaimana siswa lainnya.

Sedangkan untuk indikator program pendidikan kesetaraan di pesantren merupakan Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) merupakan sebuah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia bagi Pondok Pesantren Salafiyah yang meliputi 3 tingkatan: Jenjang Ula yang setara dengan SD/MI, jenjang Wustha yang setara dengan SMP/MTs, dan jenjang Ulya yang setara dengan SMA/MA/SMK/MAK dan telah dijalankan di berbagai lokasi dalam rangka memberikan kesempatan bagi mereka-mereka untuk dapat mengakses jenjang pendidikan yang lebih tinggi walaupun memang pada pelaksanaan dilapangan masih terbatas mereka yang mengikutinya.



Beberapa kegiatan yang diimplementasi di madrasah terkait pendidikan inklusi di madrasah sebagai berikut :

1. Integrasi Siswa, penempatan siswa dengan kebutuhan khusus, seperti disabilitas, ke dalam kelas reguler dengan teman sebaya dan pemberian dukungan guru khusus atau pendamping khusus bagi siswa dengan kebutuhan khusus.
2. Pelatihan Guru, pelatihan bagi guru mengenai strategi pembelajaran inklusif, manajemen kelas yang mendukung, dan penggunaan teknologi pendidikan yang dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus.
3. Penyesuaian Kurikulum, penyesuaian kurikulum agama dan ilmu pengetahuan agar dapat diakses oleh semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus dan pemberian tugas dan

penilaian yang sesuai dengan kemampuan siswa.

4. Dukungan Konseling dan Psikologis, pemberian layanan konseling dan dukungan psikologis bagi siswa dengan kebutuhan khusus, baik dalam hal belajar maupun aspek emosional.
5. Partisipasi Orang Tua, melibatkan orang tua siswa dengan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan pembuatan keputusan terkait pendidikan anak merekadkan mengadakan pertemuan rutin antara guru dan orang tua untuk membahas perkembangan siswa.
6. Sarana dan Prasarana Inklusif, penyediaan fasilitas dan aksesibilitas yang mendukung mobilitas siswa dengan kebutuhan khusus dan penggunaan teknologi pendidikan, seperti perangkat lunak pembelajaran khusus, atau peralatan bantu untuk siswa dengan disabilitas.

Dengan adanya implementasi kegiatan-kegiatan ini, madrasah dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, mendukung perkembangan semua siswa, dan mempromosikan nilai-nilai keadilan dalam pendidikan agama dan ilmu pengetahuan.

Sasaran Strategis 31 : Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP. Dengan realisasi total mencapai 100,00% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	24961	24961	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 31					100.00	Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pelayanan 1 tahun prasekolah ini dinilai melalui penyaluran dana bantuan operasional pendidikan yang disalurkan kepada sekolah jenjang RA yang disalurkan langsung oleh kantor Kementerian Agama kabupaten kota masing masing.

Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) adalah program pemerintah Indonesia yang menyediakan dukungan keuangan kepada lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan, meratakan standar, dan memberikan bantuan operasional dalam bentuk dana. Dana BOP dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk gaji

guru, pemeliharaan fasilitas, pengadaan materi ajar, dan aktivitas peningkatan mutu pendidikan. Penyaluran dana BOP dilakukan secara berkala oleh pemerintah pusat ke tingkat daerah, kemudian didistribusikan kepada satuan pendidikan. Program ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan pendidikan di Indonesia dan menekankan pentingnya pemerataan serta peningkatan mutu pendidikan di semua tingkatan.

BOP merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan pendidikan di Indonesia dengan memberikan bantuan operasional yang berkelanjutan kepada lembaga pendidikan. Program ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. BOP diberikan langsung dalam bentuk uang kepada madrasah penerima bantuan, para penerima bantuan diharuskan menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut dan menyerahkan kepada pemberi bantuan pada sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.



Pembinaan Pemberkasan BOP Pontren, TPQ, MDT dan PKPPS di Aceh Timur

Sasaran Strategis 32 : Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan lima Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi, Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi, Persentase kepala pendidikan

diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi, Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG dan Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi. Dengan realisasi total mencapai 100,11% dengan kategori Sangat Baik

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;	83	83	100.00	Baik
		2	Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	13.64	13	95.31	Baik
		3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;	12	12	100.00	Baik
		4	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;	15	15	100.00	Baik
		5	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	57	60	105.26	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 32					100.11	Sangat Baik	

Dalam survei kualitas pendidikan yang dikeluarkan oleh PISA pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 77 negara. Pengamat menilai kompetensi guru yang rendah dan sistem pendidikan yang terlalu kuno menjadi penyebabnya. Survei PISA tahun 2022 ini mengukur kualitas literasi, matematika, dan sains siswa yang terlibat dalam survei, termasuk Indonesia. Adapun posisi kepandaian literasi, matematika, dan sains siswa di Indonesia. PISA adalah survei internasional yang mengukur literasi matematika, membaca, dan sains. Survei ini dilakukan setiap tiga tahun sekali. Berbagai satuan pendidikan dan peserta didik Indonesia kembali dilibatkan pada survei ini pada tahun 2022. Survei PISA ini dapat memperlihatkan bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Data ini menjadikan Indonesia bercokol di peringkat enam terbawah, masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Survei PISA merupakan rujukan dalam menilai kualitas pendidikan di dunia, yang menilai kemampuan membaca, matematika dan sains.



Kemendagri dan UIN Tandatangan MoU PPG Guru PAI

Menurut pengamat pendidikan Budi Trikorayanto, setidaknya ada tiga masalah yang masih membelenggu pendidikan Indonesia:

1. Kualitas pengajar

Kompetensi guru di Indonesia masih berada di tingkat yang sangat rendah. Padahal Budi menilai, untuk menghasilkan murid-murid cerdas diperlukan sumber-sumber pengajar yang kompeten. Nomor satu sebenarnya faktor yang bisa membuat anak pintar atau tidak adalah guru. Jadi memang kompetensi guru kita sangat rendah, bisa dilihat dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) itu nilainya di bawah 5 rata-rata.

2. Sistem pendidikan yang membelenggu

Di era pendidikan 4.0, seharusnya guru tidak lagi menjadi 'narasumber' utama dalam sistem pembelajaran, melainkan sebagai pendamping, penyemangat dan fasilitator. Artinya, bila sistem pendidikan 4.0 ingin berhasil, maka anak-anak murid kini harus diedukasi untuk menjadi lebih aktif. Setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mereka akan menjadi lebih cerdas bila mempelajari suatu hal yang berkenaan dengan minat dan bakatnya.

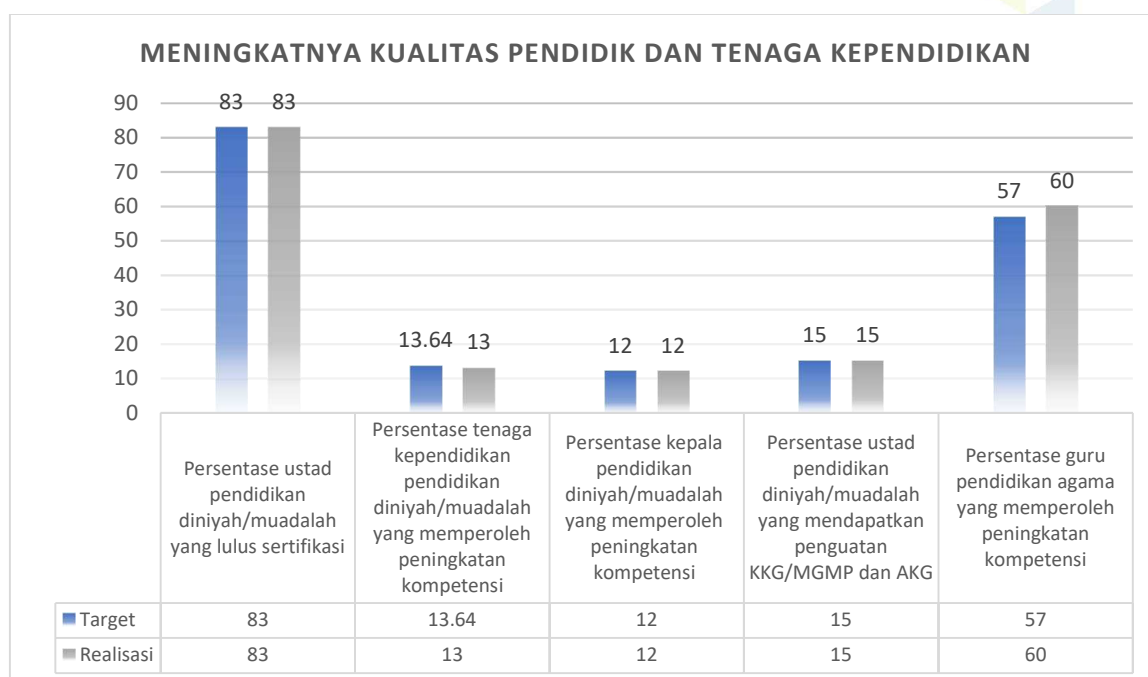
3. Lembaga pendidikan perlu pembenahan

Langkah nyata yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang mencetak guru-guru berkualitas di masa depan.

Kementerian Agama sedang sedang berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme para guru dengan menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi guru Madrasah dan guru PAI (Pendidikan Agama Islam) tahun 2022. Peningkatan kualitas dan profesionalisme guru melalui program pendidikan profesi guru (PPG) sangat penting dilaksanakan, agar dapat mencetak guru dengan kualitas yang lebih baik yang punya misi mencerdaskan anak didik dan memajukan dunia pendidikan. Program PPG atau yang biasanya dikenal dengan sertifikasi guru merupakan pengakuan atas kedudukan guru sebagai

tenaga professional. Konsekuensi sebagai tenaga profesional, tentu guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikasi Pendidikan melalui Program PPG diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan.

Untuk sasaran strategis Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, secara umum berada di kategori sangat baik, hal ini disebabkan karena telah terlaksananya berbagai program kegiatan baik pembiayaannya bersumber dari APBN (DIPA Satker) maupun program kerjasama dengan pemerintah daerah.



Sasaran Strategis 33 : Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal dan Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal. Dengan realisasi total mencapai 98,72% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan	1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	60	60	100.00	Baik

sesuai dengan standar minimal	Persentase tenaga kependidikan lainnya 2 yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	97.5	95	97.44	Baik
Rerata Capaian Sasaran 33				98.72	Baik

Salah satu bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada guru baru berdasarkan kebutuhannya adalah melalui daur ulang (supervisi klinis) yang sistematis mulai dari tahap perencanaan, pengamatan yang cermat atas pelaksanaan dan analisis yang sistematis dan intensif terhadap penampilan mengajar sesungguhnya. Kompetensi tersebut dengan tujuan:

- 1) meningkatkan keterampilan bertanya bagi guru baru agar proses belajar mengajar tidak berlangsung monoton dan tidak hanya terjadi interaksi satu arah,
- 2) meningkatkan keterampilan guru baru dalam pengelolaan kelas agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan tertib,
- 3) meningkatkan keterampilan guru baru dalam mengadakan variasi mengajar, terutama variasi penggunaan media, variasi pandangan dan perhatian, serta variasi penggunaan metode mengajar, dan
- 4) meningkatkan keterampilan guru baru dalam menjelaskan materi yang diajarkan.



Melihat realisasi yang telah dicapai untuk sasaran kegiatan Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan dua indikator yang menjadi patron keberhasilan menunjukkan bahwa realisasi kegiatan telah mencapai 98,72%. hal ini dapat dibuktikan dengan telah memenuhinya standar minimal kualifikasi kompetensi dari para guru dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah dan RA. indikator tersebut telah terlaksana sebagaimana diharapkan karena regulasi sekarang yang berlakupun mensyaratkan pendidikan minimal haruslah S1 sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.

Sasaran Strategis 34 : Meningkatkan kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG, Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG, Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1 dan Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2. Dengan realisasi total mencapai 95,83% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	7	7	100.00	Baik
		Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	85	85	100.00	Baik
		Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	82	82	100.00	Baik
		Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	2.4	2	83.33	Baik
Rerata Capaian Sasaran 34					95.83	Baik

Jika dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa capai kinerja untuk sasaran kegiatan tersebut berada pada kategori baik. Untuk mencapai target tersebut tentunya banyak langkah-langkah/strategi yang digunakan, adapun beberapa strategi yang ditempuh adalah:

- peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
- peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui PKG;
- peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja;

Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG memang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total guru yang belum mengikuti PPG, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan anggaran dan belum terpenuhinya beberapa persyaratan khusus yang menyebabkan seorang pendidik tersebut untuk diikutsertakan pada program PPG. Sedangkan untuk indikator Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1 sudah tercapai

seluruhnya karena saat ini semua guru diwajibkan untuk sudah memiliki gelar sarjana/S1 sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya.



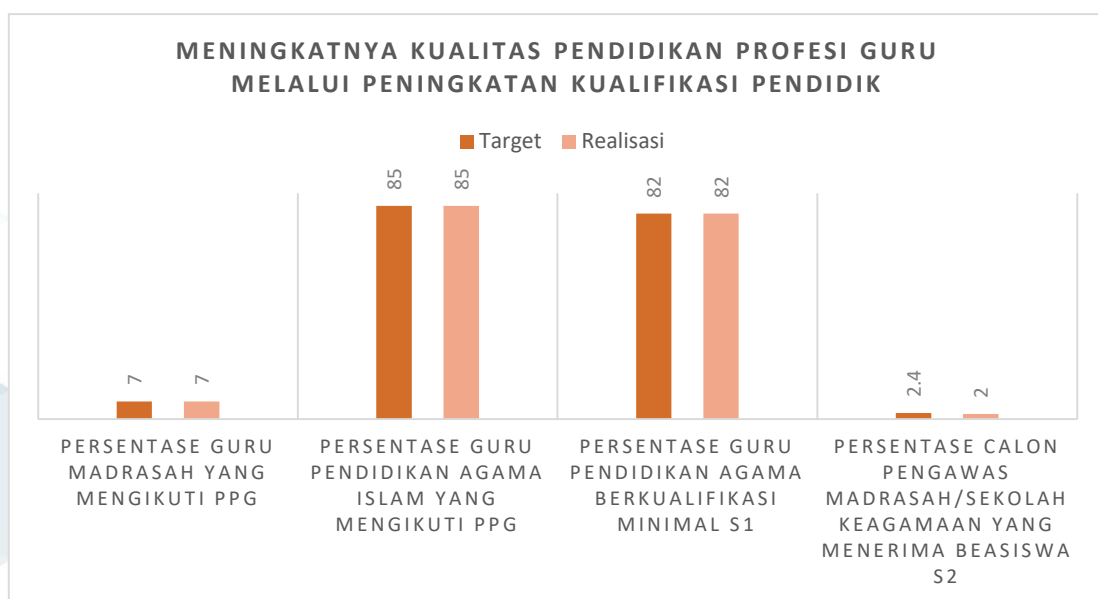
Kakanwil Memberikan Sambutan pada Kegiatan Guru PPG Batch 1 2023

Peningkatan kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dapat melibatkan sejumlah kegiatan dan inisiatif. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan profesi guru adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan dan Pengembangan Berkelanjutan:
 - Menyelenggarakan pelatihan reguler dan program pengembangan profesional untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru.
 - Mengintegrasikan inovasi dan perkembangan terkini dalam metode pengajaran dan kurikulum.
2. Pendidikan Formal dan Non-Formal:
 - Mendukung guru untuk meningkatkan kualifikasi akademis mereka melalui program sarjana, magister, atau doktor dalam bidang pendidikan atau mata pelajaran yang mereka ajarkan.
 - Memberikan peluang bagi guru untuk mengikuti kursus non-formal, workshop, seminar, dan konferensi sebagai bentuk pembelajaran berkelanjutan.
3. Sertifikasi dan Akreditasi:
 - Menyelenggarakan program sertifikasi untuk memastikan bahwa guru memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan.
 - Melakukan proses akreditasi sekolah dan program pendidikan guru untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
4. Mentor dan Pendampingan:

- Menyediakan program mentor dan pendampingan bagi guru baru untuk membimbing mereka dalam proses adaptasi dan pengembangan profesional.
 - Mendorong kolaborasi antar guru melalui kerja kelompok dan pertukaran pengalaman.
5. Penelitian dan Inovasi Pendidikan:
- Mendorong partisipasi guru dalam penelitian pendidikan dan memberikan dukungan untuk proyek penelitian yang relevan.
 - Mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam praktik pengajaran dan kebijakan pendidikan.
6. Evaluasi Kinerja:
- Melakukan evaluasi kinerja guru secara rutin untuk memberikan umpan balik konstruktif dan membantu mereka dalam perbaikan terus-menerus.
 - Menggunakan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar untuk memberikan penghargaan atau memberikan dukungan tambahan jika diperlukan.
7. Penggunaan Teknologi Pendidikan:
- Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran untuk meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran.
 - Memberikan pelatihan dalam penggunaan teknologi pendidikan kepada guru.
 - Partisipasi dalam Komunitas Pendidikan:
 - Mendorong guru untuk terlibat dalam komunitas pendidikan, baik secara lokal maupun internasional, untuk berbagi pengalaman dan ide-ide terbaik.
 - Memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar guru dan lembaga pendidikan.

Adapun grafik yang dapat ditampilkan dari indikator diatas sebagai berikut :



Sasaran Strategis 35 : Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus dan Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus. Dengan realisasi total mencapai 100,00% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1 Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	100	100	100.00	Baik
		2 Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	95	95	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 35					100.00	Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh bidang terkait. Secara keseluruhan capaian kinerja ini berada di kategori Baik. Untuk indikator Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus realisasi mencapai 100%, hal ini dikarenakan tunjangan tersebut telah dianggarkan kedalam anggaran masing-masing daerah. Sedangkan untuk Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena hal ini juga berhubungan dengan lintas instansi. Sebagai gambaran tunjangan itu diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2009.

Pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan menjadi lebih efektif ketika dilakukan dengan pendekatan yang lebih spesifik. Identifikasi kebutuhan pendidikan harus mencakup analisis mendalam terhadap data populasi siswa, tingkat keberhasilan akademis, dan kebutuhan khusus. Misalnya, daerah yang memiliki tingkat kesulitan belajar yang tinggi mungkin memerlukan jumlah guru lebih banyak dengan keahlian di bidang pendidikan khusus. Sebaliknya, daerah dengan siswa berbakat mungkin memerlukan guru yang memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan pengajaran tingkat lanjut.



Penyerahan 2.345 SK PPPK secara simbolis

Pemerintah dan lembaga pendidikan juga harus mempertimbangkan distribusi geografis secara spesifik, memastikan bahwa wilayah yang terpencil atau kurang berkembang mendapatkan perhatian yang cukup. Program insentif dan dukungan tambahan dapat diterapkan untuk menarik guru berkualitas ke daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih. Selain itu, pelibatan aktif komunitas lokal dalam proses ini dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan riil setempat dan mendorong keberlanjutan sistem pendidikan yang lebih baik. Dengan pendekatan spesifik ini, diharapkan pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik dapat secara efektif mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Penempatan tenaga pendidik pada tahun 2023 yang lulus formasi PPPK memang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, hal ini disebabkan karena alokasi penempatan saat itu masih menggunakan formasi dari e-formasi tahun 2017. Hal ini menyebabkan terjadi permasalahan baru yang tidak hanya di provinsi Aceh, tetapi permasalahan secara nasional, dikarenakan kondisi kebutuhan pegawai khususnya tenaga pendidik pada tahun 2017 tidak sama dengan tahun 2023. Karena dengan selisih 6 tahun tersebut tentunya sudah banyak terjadi proses mutasi ASN, sehingga ketika terjadi penempatan PPPK baru terjadi penumpukan akibat sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Permasalahan ini memang memiliki solusi dengan proses redistribusi kembali PPPK tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Sasaran Strategis 36 : Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.

Dengan realisasi total mencapai 100,00% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	180	180	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 36					100.00	Baik

Untuk sasaran kegiatan ini realisasi pelaksanaan kegiatan sangat bergantung pada instansi lainnya dalam hal ini Badan Akreditasi Nasional (BAN-SM), Pelaksanaan akreditasi hanya dapat dilakukan oleh badan penilai akreditasi. Rendahnya realisasi ini dikarenakan Madrasah yang dinilai untuk di akreditasi telah ditentukan oleh badan tersebut sehingga dalam pelaksanaannya kanwil Kemenag Provinsi Aceh hanya bertugas untuk memfasilitasi satker-satker yang akan diakreditasi walaupun pada dasarnya kita mengusulkan kepada Badan Akreditasi dimaksud. Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Grafik perbandingan target dan realisasi akreditasi madrasah



Pelaksanaan akreditasi Madrasah dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN). Assesor yang ditunjuk oleh BAN akan melaksanakan akreditasi di Madrasah yang ditunjuk sesuai dengan

permintaan oleh instansi terkait. Proses akreditasi ini sangat kompleks karena melibatkan 8 standar pendidikan yang harus dinilai. Standar pendidikan adalah seperangkat kriteria dan pedoman yang digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan kualitas sistem pendidikan. Dalam konteks akreditasi atau evaluasi pendidikan, standar ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, standar kurikulum menetapkan bahwa suatu lembaga pendidikan harus memiliki rencana pembelajaran yang memadai, mencakup materi pelajaran yang sesuai dan metode pengajaran yang efektif. Kedua, standar tenaga pendidik mengharuskan bahwa tenaga pengajar memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai untuk memberikan pendidikan berkualitas, termasuk pengembangan profesional secara terus-menerus. Selain itu, standar sarana dan prasarana menetapkan bahwa lembaga pendidikan harus menyediakan fasilitas fisik dan teknologi yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran.



Akreditasi di salah satu madrasah di Aceh Utara

Selanjutnya, standar evaluasi dan pengukuran memastikan bahwa lembaga memiliki sistem evaluasi yang objektif untuk mengukur kemajuan siswa dan efektivitas pendidikan. Manajemen dan tata kelola juga menjadi fokus, dengan standar yang mengharuskan adanya perencanaan strategis, kebijakan yang efektif, dan distribusi sumber daya yang bijaksana. Pelayanan siswa mencakup aspek dukungan psikososial dan pelayanan kesehatan untuk siswa. Keterlibatan masyarakat dan hasil belajar siswa juga diberikan perhatian serius untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung sistem pendidikan dan mencapai pencapaian belajar yang optimal bagi siswa. Keseluruhan, standar pendidikan menciptakan kerangka kerja untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

Hal inilah yang menjadi standar kelayakan untuk memberikan nilai terhadap kapasitas dan kapabilitas sebuah madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan.

Sasaran Strategis 37 : Meningkatkan budaya mutu pendidikan

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu dan Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional. Dengan realisasi total mencapai 100,00% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1 Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	1	1	100.00	Baik
		2 Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1	1	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 37					100.00	Baik

Untuk indikator Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu realisasinya termasuk dalam kategori baik karena madrasah/sekolah keagamaan di Aceh khususnya memang dituntut untuk menerapkan budaya mutu. Proses pencapaian mutu ini tidak serta merta didapatkan secara instan, akan tetapi membutuhkan proses dan usaha dari semua pihak/warga madrasah. Sedangkan untuk indikator Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional realisasinya mencapai nilai 100% dikarenakan tercapainya target jumlah siswa yang memiliki kompetensi untuk mengikuti kegiatan kompetisi dimaksud. Penyumbang terbesar untuk angka ini adalah kegiatan kompetisi sains madrasah dan beberapa event nasional lainnya. Selain kegiatan kompetensi sains madrasah juga ada kegiatan lainnya seperti Pospenas dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Untuk indikator sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional, khususnya Pada MQK (Musabaqah Qiraatil Kutub) Nasional 2023 yang digelar mulai 10 sampai 18 Juli 2023 itu, Aceh mengutus 48 perwakilan yang terdiri dari peserta sebanyak 24 orang, pelatih 6 orang, panitia 3 orang dan official 15 orang dari Dinas Pendidikan Dayah dan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh. Adapun untuk kegiatan Kompetisi Sains Madrasah (KSM), Provinsi Aceh mengirimkan 11 delegasi yakni Tingkat MI/SD, Muhammad Rafa Pratama dan Radtya Saktika

Wistara. Tingkat MTs/SMP, Rafka Alvaro Farras Diansyah, Muhammad Khalis dan Muhammad AlFatih. Kemudian untuk tingkat MA/SMA, Cut Buleun Nafisa, Safril Ilmi Ramadhan, Rahmatilah, Zakia Azzahra, Nisaul Kamila dan Muhammad Ar Rayyan Adha. Selain 2 kegiatan tersebut, masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang diikuti baik di tingkat Nasional maupun Internasional.



Kontingen KSM Aceh Berangkat ke Kendari



Kakanwil Beri Dukungan dan Motivasi Kontingen MQKN Aceh di Jawa Timur

Sasaran Strategis 38 : Meningkatkan budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan tiga Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran, Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman dan Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak. Dengan realisasi total mencapai 97,14% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1 Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	87.5	80	91.43	Baik
		2 Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	80	80	100.00	Baik
		3 Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	70	70	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 38					97.14	Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh bidang terkait. Secara keseluruhan capaian kinerja ini berada di kategori Baik dengan persentase mencapai 97,14%. Hal ini dikarenakan semua indikator kegiatan terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan. Untuk indikator Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman realisasi mencapai 100% dari total target sebanyak 80 teralisasi juga sebanyak 80 dan juga untuk indikator Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak juga realisasi tercapai sebesar 100% sesuai target.

Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter merupakan upaya untuk membentuk pribadi anak secara lahir maupun batin supaya menjadi manusia yang lebih baik. Karakter siswa yang baik adalah karakter yang menunjukkan bahwa dirinya seorang pelajar yang berpendidikan. Karakter sendiri merupakan kualitas moral dan mental seseorang yang pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan, sebagaimana sabda rasul yang menjelaskan bahwa tiap-tiap anak lahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut menjadi yahudi, majusi atau nasrani. Potensi karakter yang baik tersebut harus terus dibina melalui sosialisasi dan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu wadah dalam menunjang pembentukan karakter tiap individu. Di sebuah madrasah, terjadi pergeseran besar dalam budaya belajar dan lingkungan sekolah. Kepala madrasah dan para guru bersama-sama merancang pendekatan pembelajaran yang

lebih inovatif dan menarik. Mereka mulai mengadopsi metode pembelajaran yang melibatkan permainan, proyek, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan minat belajar siswa. Program ekstrakurikuler juga dikembangkan untuk mendukung bakat dan minat siswa dalam berbagai bidang. Pentingnya komunikasi terbuka antara guru dan siswa ditekankan, dan kampanye anti-bullying diperkuat untuk menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan.



Rutinitas siswa di salah satu MI di Aceh

Langkah berikutnya adalah fokus pada pengembangan karakter positif dan penghapusan kekerasan dalam segala bentuknya. Aturan-aturan yang mendukung lingkungan bebas kekerasan diterapkan dengan tegas, sementara program pembinaan melibatkan siswa dalam pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan yang positif. Hasilnya terlihat dengan semakin meningkatnya antusiasme belajar siswa, kehadiran yang lebih stabil, dan prestasi akademis yang menggembirakan. Dengan suasana belajar yang menyenangkan dan bebas kekerasan, madrasah tersebut berhasil menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan holistik siswa dan membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Sasaran Strategis 39 : Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan dan Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina. Dengan realisasi total mencapai 100,00% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1 Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	167	167	100.00	Baik
		2 Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina	177	177	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 39					100.00	Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target dan realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kata lain terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara keseluruhan capaian kinerja ini berada di kategori baik.

Di tengah pengaruh era informasi digital yang mempengaruhi gaya dan perilaku pemuda pendidikan kepramukaanpun menjadi penting dan dapat mengambil peran penting bagi pengembangan diri Anggota Pramuka dan masyarakat .Bagi generasi muda Anggita Pramuka maupun bukan yang sedang mengalami masa transisi untuk mencari jati diri.

Gugus pramuka di madrasah biasanya dibentuk sebagai wadah untuk mengembangkan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan sosial siswa melalui kegiatan-kegiatan pramuka. Dalam banyak kasus, gugus pramuka di madrasah ini menjadi sarana bagi siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan dan moral yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya keberadaan gugus pramuka dalam madrasah atau pendidikan keagamaan adalah untuk melibatkan siswa dalam kegiatan positif, mengembangkan rasa tanggung jawab, dan memperkuat nilai-nilai agama dalam konteks kegiatan kepramukaan. Dengan demikian, gugus pramuka dapat menjadi salah satu elemen penting dalam pembentukan karakter siswa di lingkungan pendidikan keagamaan.

Kegiatan Pramuka dikembangkan untuk dapat mendorong kepeloporan anak didik, menjadi agen Perubahan masyarakat dengan terus menumbuhkan nilai etika dan moral dan norma agar terpatri karakter positif menetap pada diri setiap anggota Pramuka. Karena Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akses layanan Pramuka melalui pengembangan SDM, (Pembina) penguatan Kapasitas Gugus depan untuk menunjang aktivitas Pramuka. Mengupayakan data base di masing masing Kwartir Ranting dan gugus Depan untuk maksud ini pendekatan dengan dinas pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagai organisasi

Pemerintah yang memiliki tirisan tugas yang serupa dengan Pramuka.



Kegiatan Pramuka salah satu MIS di Aceh (MIS Al-Furqan)

Sasaran Strategis 40 : Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan tiga Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase produk hukum yang diterbitkan, Persentase kasus hukum yang terselesaikan dan Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan. Dengan realisasi total mencapai 85,09% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

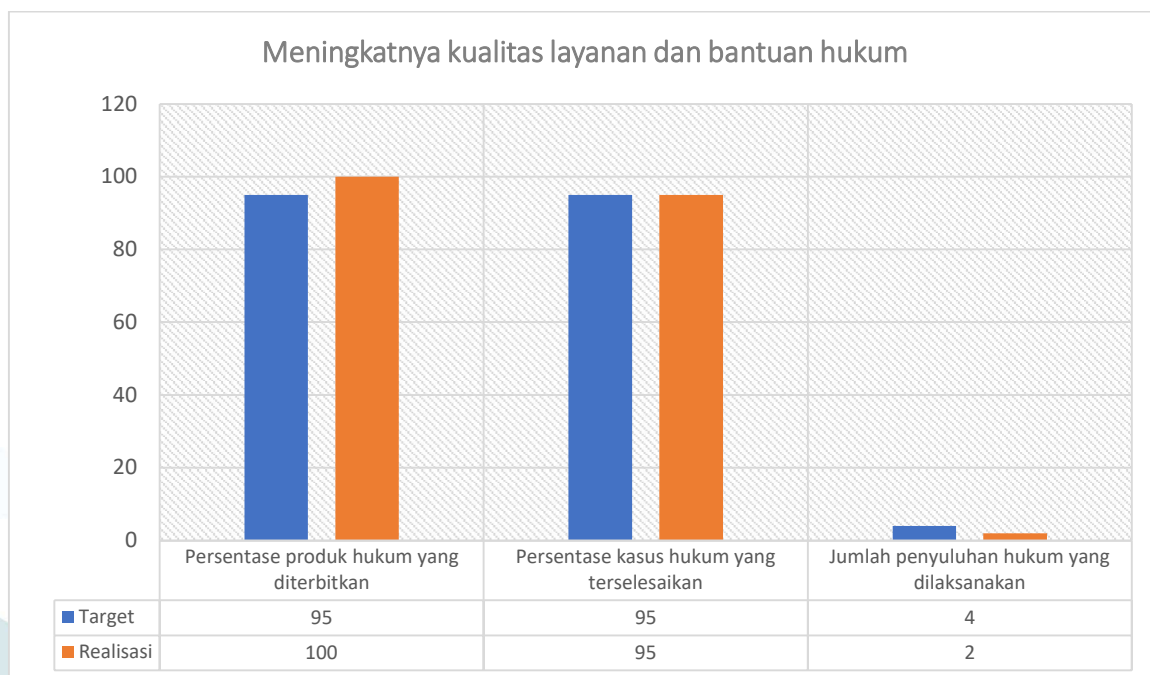
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase produk hukum yang diterbitkan	95	100	105.26	Sangat Baik
		2 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	95	95	100.00	Baik
		3 Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	4	2	50.00	Cukup
Rerata Capaian Sasaran 40					85.09	Baik

Kementerian Agama (Kemenag) berkomitmen untuk melakukan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karenanya, Kemenag siap bersinergi dengan seluruh pihak untuk mendukung tercapainya hal tersebut. Birokrasi saat ini harus mempunyai orientasi melayani dan kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban serta bersih dari KKN dan politisasi, dengan 9 program percepatan untuk reformasi Birokrasi.

Indikator ini diukur dengan membandingkan target dan realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi sesuai bahkan melebihi target yang ditetapkan dengan

kategori sangat baik. Untuk indikator Persentase produk hukum yang diterbitkan dapat dilihat dari banyak nya produk-produk yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh yang mengandung unsur hukum dan mengikat seperti surat keputusan, surat edaran dan berbagai produk lainnya. Sedangkan untuk indikator Persentase kasus hukum yang terselesaikan dapat dilihat dari penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan Kementerian Agama seperti kasus penggugatan tanah waqaf oleh ahli waris dan kasus-kasus lainnya. Sedangkan untuk jumlah penyuluhan hukum dapat berupa pelaksanaan sosialisasi aturan-aturan baru yang dikeluarkan baik oleh pemerintah, Kementerian Agama dan Kementerian lainnya.

Untuk indikator Persentase produk hukum yang diterbitkan realisasi melebihi dari target yang ditetapkan dengan capaian mencapai 105,06%. Tingginya capaian ini tidak dapat dilepaskan dari telah menguatnya pemahaman dari para pelaksana kegiatan tentang pentingnya legalitas pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan adanya persyaratan bahwa setiap pelaksanaan proses pencairan anggaran salah satu dokumen yang harus dilengkapi adalah SK Pelaksanaan Kegiatan. Sedangkan untuk indikator Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan masih berada di kategori cukup (50%) dikarenakan tidak tersedianya anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud dikarenakan banyaknya anggaran yang terpakai untuk kegiatan seleksi calon PPPK pada tahun berjalan dimaksud.



Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum khususnya pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks keagamaan. Kementerian Agama dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan hukum dengan mengoptimalkan pusat layanan hukum keagamaan, menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai hak dan

keajiban keagamaan, serta mempermudah proses administratif terkait dokumen-dokumen keagamaan. Adapun permasalahan hukum terbesar yang dialami Kemenag khususnya Kemenag Provinsi Aceh adalah tentang legalitas hukum tanah waqaf yang selama ini belum tertata dengan maksimal seperti yang diharapkan, sehingga masih ada beberapa kasus terkait digugatnya tanah waqaf oleh ahli waris si pemberi waqaf.

Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum pada Kementerian Agama memiliki dampak positif, yakni memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak keagamaan warga negara, memudahkan akses informasi dan prosedur administratif keagamaan, menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang konstruktif, memberdayakan masyarakat melalui program edukasi hukum, dan secara keseluruhan, memberikan kontribusi pada pembangunan masyarakat inklusif yang menghargai keberagaman keagamaan sebagai elemen penting dalam kehidupan bersama.

Sasaran Strategis 41 : Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan tiga Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase Rekomendasi izin orang asing, dengan realisasi total mencapai 102,15% dengan kategori Sangat Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	93	95	102.15	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 40					102.15	Sangat Baik

Pemberian rekomendasi bagi orang asing yang dikeluarkan oleh kementerian agama tentang tata cara pengurusan orang asing di bidang agama mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengurusan Dokumen Orang Asing Bidang Agama. Di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh pemberian Rekomendasi untuk memperoleh Izin Menggunakan Tenaga Asing. Izin menggunakan Tenaga Asing (IMTA) adalah izin yang harus dimiliki untuk setiap tenaga asing yang dipekerjakan oleh kegiatan usaha PMA/PMDN. Untuk WNA yang bekerja di bidang agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mensyaratkan rekomendasi dari Kementerian Agama, dengan estimasi waktu penyelesaian selama 2 jam (120 menit). Dengan Persyaratan sebagai berikut :

1. Surat permohonan dari lembaga penjamin
2. Fotokopi keputusan pengesahan RPTKA
3. Fotokopi paspor TKA
4. Fotokopi polis asuransi kesehatan TKA (Fotokopi KTP penjamin/direktur perusahaan)
5. Fotokopi ijazah/SK dari pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
6. Pas foto 4x6 (2 lembar) berlatar merah

Rekomendasi izin bagi orang asing sebaiknya didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap tujuan kedatangan mereka serta potensi kontribusi positif yang dapat mereka berikan dalam konteks sosial, ekonomi, atau akademis. Proses tersebut seharusnya mempertimbangkan kebutuhan negara tuan rumah, seperti kekurangan tenaga kerja atau kebutuhan khusus dalam sektor tertentu, sekaligus memastikan bahwa pemberian izin tidak merugikan masyarakat lokal. Adil, transparan, dan akuratnya proses penilaian merupakan kunci untuk menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa izin yang diberikan kepada orang asing sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional. Dalam konteks ini, keterlibatan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan kelompok advokasi, dapat memastikan bahwa kebijakan imigrasi mencerminkan keadilan serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dilingkungan kanwil Kementerian agama provinsi Aceh pelaksanaan indikator Persentase rekomendasi izin orang asing dilaksanakan oleh Subkor Kepegawaian dan hukum. Kebanyakan penyelesaian dokumen dimaksud didominasi oleh permohonan pengurusan izin terkait mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di salah satu Universitas yang ada di Aceh dan ada juga kegiatan yang terkait dengan studi banding pendidikan.

Sasaran Strategis 42 : Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)

Meningkatnya kualitas pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melibatkan perbaikan dalam empat aspek utama: pengadaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan pegawai. Pertama, dalam pengadaan, perlu diterapkan sistem seleksi yang transparan dan berbasis pada kompetensi agar ASN yang terpilih memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan jabatan. Penempatan pegawai harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kemampuan individu, dengan meminimalkan ketidaksesuaian antara kualifikasi dan tugas yang diemban. Pembinaan ASN menjadi hal krusial, melibatkan pendekatan berbasis kinerja, pelatihan berkelanjutan, dan mentoring untuk memperkuat kemampuan dan integritas mereka. Selain itu, pengembangan pegawai perlu ditingkatkan melalui program pelatihan yang relevan

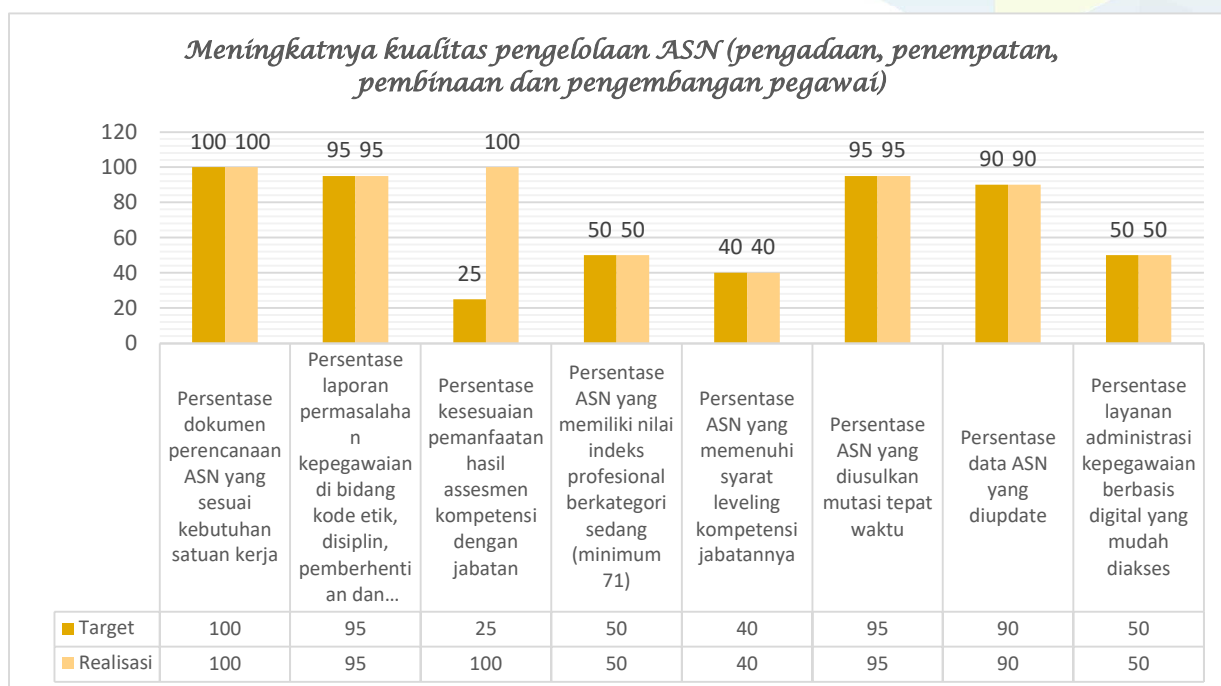
dengan dinamika lingkungan kerja dan perkembangan teknologi. Sistem evaluasi kinerja yang adil dan jelas juga diperlukan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendorong perbaikan terus-menerus. Dengan demikian, integrasi keempat aspek ini akan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan produktif, meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan oleh ASN.

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan delapan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja, Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti, Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan, Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71), Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya, Persentase data ASN yang diupdate, Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses, dengan realisasi total mencapai 137,50% dengan kategori Baik Sekali, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Targ et Tahun 2022	Realis asi	Capaian (%)	Kategor i	
42	Meningkatny a kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembang an pegawai)	1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	100	100	100.00	Baik
		2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	95	95	100.00	Baik
		3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	25	100	400.00	Sangat Baik
		4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	50	50	100.00	Baik
		5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	40	40	100.00	Baik
		6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	95	95	100.00	Baik
		7	Persentase data ASN yang diupdate	90	90	100.00	Baik
		8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	50	50	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 42					137.50	Baik Sekali	

Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan

pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.



Dari tabel realisasi diatas dapat dilihat bahwa indikator-indikator dari sasaran kegiatan diatas telah terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan dan ditetapkan bahwan untuk indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan realisasi 100 dari 25 target yang ditetapkan atas sebesar 400%. Hal ini tidak terlepas dari terlaksananya kegiatan assesment kompetensi jabatan yang telah dilaksanakan bekerjasama dengan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banyak permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai). Pada tahun 2023, seleksi untuk proses rekrutmen PPPK sepenuhnya telah dilaksanakan dengan berbasis pada sistim CAT, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar berkualitas dan meminimalisir nepotisme yang mungkin dan biasa terjadi pada seleksi model sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar Kementerian Agama khususnya provinsi Aceh dalam hal memperbaiki proses rekrutmen pegawai baik itu PPPN maupun CPNS.

Untuk kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Pada tahun 2023 uji kompetensi untuk seleksi calon pejabat administrator dan pengawas telah dilaksanakan sesuai dengan standar sesuai peraturan yang berlaku dan hasil dari uji kompetensi tersebut yang digunakan untuk mengangkat pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh dan Kemenag

Kab/kota yang memang sedang kosong pejabatnya pada pos-pos tertentu. Seleksi ini dilakukan oleh assesor dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan dari Kementerian Agama RI Jakarta, sedangkan pihak Kanwil hanya bertugas sebagai fasilitator untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini sebagai bentuk akuntabilitas dan profesionalisme dalam merekrut calon pejabat baru.

Sedangkan untuk indikator mutasi tepat waktu, Mutasi yang dilakukan tepat waktu merupakan aspek penting dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi. Mutasi tepat waktu memastikan penempatan ASN sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan tugas yang diemban. Keputusan mutasi harus didasarkan pada evaluasi kinerja, kompetensi, dan kebutuhan organisasi, sehingga pegawai yang dipindahkan dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan potensinya. Proses mutasi yang transparan dan adil, dengan memberikan umpan balik kepada pegawai terkait, juga dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas ASN. Penerapan kebijakan mutasi tepat waktu memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja dan menciptakan tim yang terampil dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dengan demikian, mutasi yang terorganisir dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik yang disediakan oleh ASN.



Sambutan Karo Kepegawaian Kemenag RI dan Kakanwil Kemenag Prov. Aceh pada Pembinaan dan Pembukaan Uji Kompetensi ASN di Asrama Haji Embarkasi Aceh

Untuk Peningkatan persentase data yang diperbarui dapat dicapai dengan menerapkan kebijakan yang mendorong ASN untuk melaporkan perubahan status, posisi, atau kualifikasi mereka secara berkala. Selain itu, penggunaan sistem manajemen data yang efisien dan terintegrasi juga dapat membantu memastikan keberlanjutan pembaruan data. Semakin tinggi persentase data yang diperbarui, semakin baik organisasi dapat merespons perubahan dan menyesuaikan strategi manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Kanwil Kementerian Agama provinsi Aceh berdasarkan data yang ada

menunjukkan masih banyak data yang belum diperbaharui oleh masing-masing ASN, sehingga menyebabkan selsih *margin error* yang mencapai 70%. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan ataupun ketidakpedulian oleh masing-masing, karena pada prinsipnya data masing-masing ASN menjadi tanggung jawab masing-masing untuk melakukan proses update.

Sasaran Strategis 43 : Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan



Kegiatan Evaluasi Integrasi Belanja Pegawai dan Pembayaran Tukin

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu, Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK), Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal dan Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama dengan realisasi total mencapai 112,86% dengan kategori Sangat Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

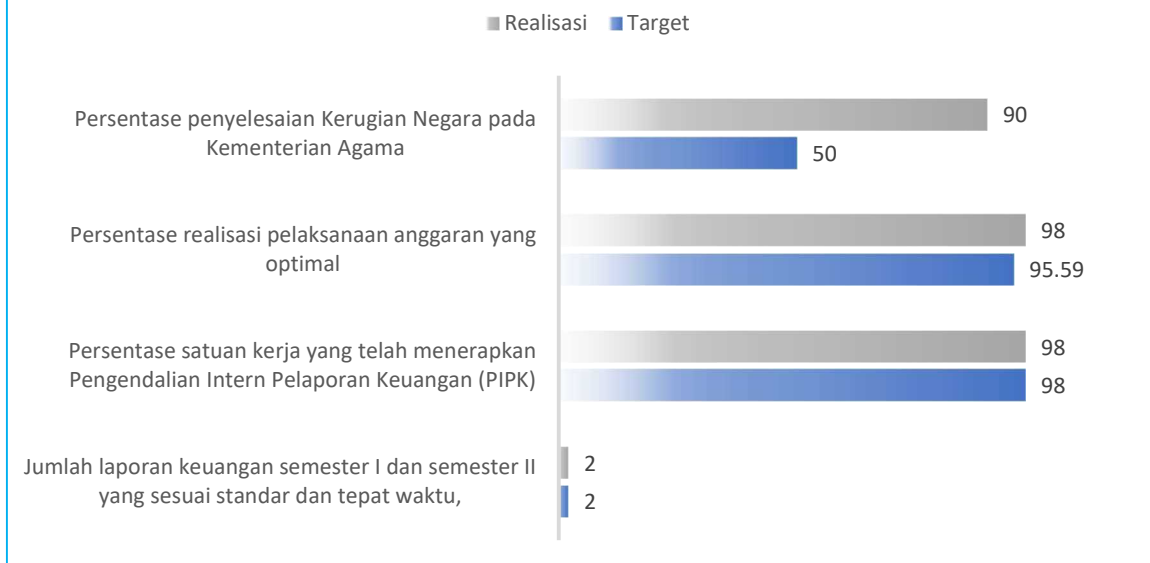
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	2	2	100.00	Baik
		2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	98	98	100.00	Baik
		3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	96.59	98	101.46	Sangat Baik

		4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	60	90	150.00	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 43						112.86	Sangat Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh bidang terkait. Secara keseluruhan capaian kinerja ini berada di kategori Baik dengan persentase mencapai 112,86%. Hal ini dikarenakan semua indikator kegiatan terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan. Pelaksanaan indikator Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan karena penyusunan laporan ini merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus diselesaikan dan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tranparansi kegiatan dan tentunya merupakan target pelaksanaan audit oleh setiap auditor yang melaksanakan kegiatan di kanwil kementerian Agama Provinsi Aceh. Di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh terdiri dari 8 satker yang tentunya setiap semester ada 8 Laporan keuangan semester yang harus diselesaikan. Bahkan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh juga memperoleh penghargaan untuk beberapa kategori Laporan Keuangan.

Sedangkan untuk indikator Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) pada prinsipnya memang sudah berjalan dengan baik dengan realisasi 89,47%. Untuk kegiatan ini masih perlu lebih ditingkatkan dikarenakan administrasi keuangan merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif dan sangat rawan untuk dilaksanakan audit sehingga pada prinsipnya perlu untuk terus ditingkatkan dan dilakukan perbaikan kedepannya dalam rangka peningkatan tata kelola administrasi keuangan. Sedangkan untuk indikator Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama untuk penyelesaian temuan menjadi nihil masih sangat sulit dilakukan dalam tempo yang singkat karena berbagai kendala dan kondisi lapangan terkait objek yang terkena temuan. Maka untuk penyelesaian ini sangat dibutuhkan peran aktif pimpinan sehingga proses penyelesaian tagihan baik angka maupun administrasi dapat berjalan lebih cepat

MENINGKATNYA PENGELOLAAN MANAJEMEN KEUANGAN YANG TERTIB SESUAI DENGAN KETENTUAN



Di Kanwil Kementerian Agama provinsi Aceh hampir setiap tahunnya dilaksanakan pemeriksaan oleh auditor BPK, BPKP maupun Irjen Kemenag RI. Memang ada temuan baik administrasi maupun dalam bentuk angka-angka yang harus disetorkan kembali ke kas Negara. Untuk menyelesaikan kerugian negara dalam Kementerian Agama, langkah-langkah yang diambil mencakup melakukan penyelidikan dan audit menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab dan pihak yang bertanggung jawab, memulai tindakan hukum terhadap pelanggar hukum, menetapkan mekanisme pengembalian dana secara langsung, melakukan reformasi internal dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan transparansi, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, memberikan pelatihan kepada pegawai, kolaborasi dengan lembaga eksternal, melakukan pemulihan aset, dan membangun sistem pengawasan berkelanjutan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Langkah-langkah ini dilaksanakan dengan itikad baik, integritas, dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memastikan pemulihan dana dan pencegahan penyalahgunaan keuangan negara di masa depan.

Sasaran Strategis 44 : Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan tiga Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya, Persentase tanah yang bersertifikat dan Persentase nilai *Opname Physic* (OP) BMN dengan realisasi total mencapai 99,38% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1 Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	49.93	49	98.14	Baik
		2 Persentase tanah yang bersertifikat	40	40	100.00	Baik
		3 Persentase nilai <i>Opname Physic (OP)</i> BMN	99	99	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 44					99.38	Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh bidang terkait. Indikator kegiatan pada sasaran kinerja ini secara keseluruhan dilaksanakan oleh bagian sekretariat dalam hal ini subkor keuangan dan BMN. Secara keseluruhan seluruh aset yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh telah dilaksanakan Penetapan Status Penggunaan kecuali untuk aset yang pengadaannya pada tahun anggaran berjalan yang biasanya dilaksanakan PSP pada awal tahun berikutnya. Sedangkan untuk aset yang berupa kendaraan dinas maupun laptop telah dibuatkan Surat Izin Pemakaian sebagai bentuk legalitas penggunaan dan legalitas hukum.



Kakankemenag Aceh Selatan Terima Plakat Sertifikat Tanah dari BPN

Tanah BMN (Barang Milik Negara) yang bersertifikat merupakan aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah dan memiliki sertifikat kepemilikan sebagai bentuk legalitas. Sertifikat tanah BMN mengidentifikasi tanah tersebut sebagai milik negara dan dapat digunakan untuk keperluan pemerintahan, proyek-proyek pembangunan, atau tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan peruntukannya. Pemegang sertifikat ini umumnya adalah instansi pemerintah yang memiliki otoritas atas tanah tersebut. Dilingkungan Kementerian Agama, kebanyakan tanah rata-rata

digunakan untuk Pendirian Madrasah, Balai Nikah, dsb. Sertifikasi ini menjadi hal yang sangat penting, karena tanpa adanya legitimasi berupa sertifikat tanah, maka dapat dipastikan bahwa unit kerja (Satker) tersebut tidak akan mendapat dana dari pemerintah untuk pembangunan baru sehingga bangunan-bangunan yang sudah rusak karena faktor usia ataupun karena musibah tidak akan mendapat alokasi APBN untuk pembangunannya.

Opname fisik barang milik negara merupakan salah satu metode untuk mengetahui kondisi aset yang sebenarnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan untuk aset tersebut apakah perlu dilakukan penghapusan atau masih bisa digunakan. Untuk indikator Persentase tanah yang bersertifikat dan Persentase nilai *Opname Physic* (OP) BMN realisasi kegiatan telah mencapai 100%. Dimana capai berhasil sesuai dengan target yang ditetapkan, baik melalui jalur mandiri maupun jalur sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan selaku pengelola aset walaupun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi di lapangan.

Sasaran Strategis 45 : Meningkatkan kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi

Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi merupakan aspek krusial dalam memastikan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan kinerja suatu entitas. Proses penataan organisasi yang baik mencakup pemahaman yang mendalam terhadap struktur, fungsi, dan tata kelola internal, yang dapat memastikan penempatan sumber daya secara optimal. Sementara itu, penguatan manajemen organisasi menitikberatkan pada pengembangan kepemimpinan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan implementasi praktik manajemen terbaik. Langkah-langkah ini, bila dijalankan dengan baik, dapat menciptakan lingkungan kerja yang responsif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Selain itu, peningkatan kualitas manajemen organisasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan baik dari internal organisasi maupun dari pemangku kepentingan eksternal, yang pada gilirannya akan membawa dampak positif terhadap pencapaian tujuan organisasi dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan tiga Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis, Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi dan Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan realisasi total mencapai 100,00% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

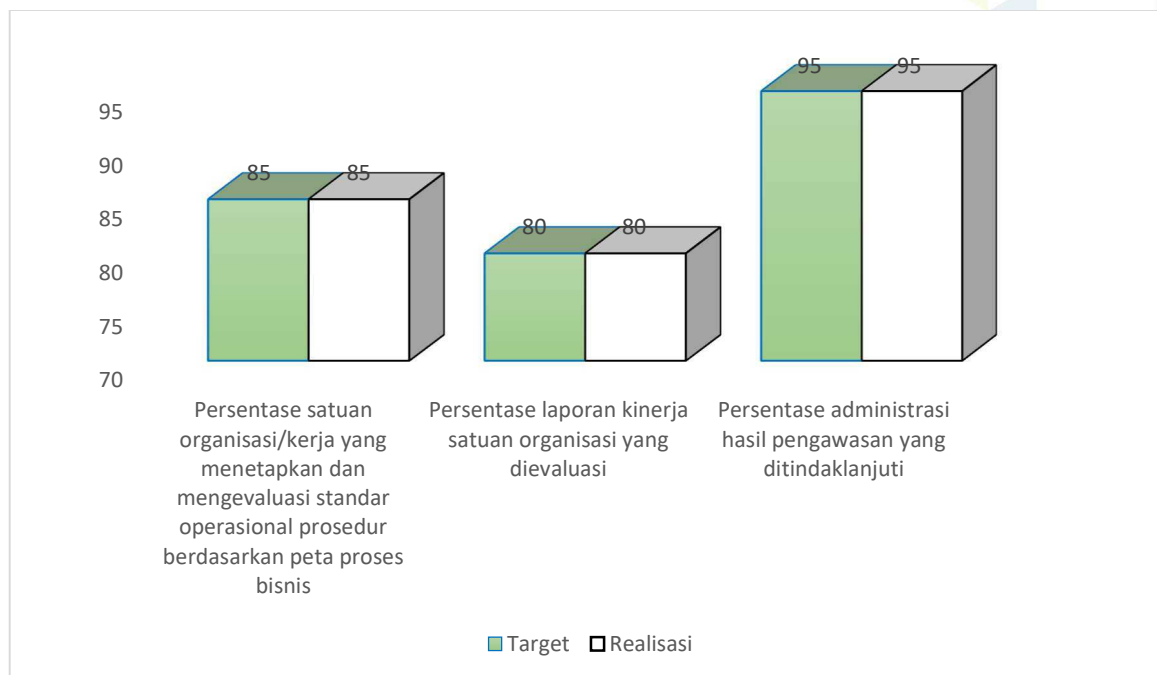
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1 Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	85	85	100.00	Baik
		2 Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	80	80	100.00	Baik
		3 Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95	95	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 45					100.00	Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh bidang terkait. Untuk indikator kinerja Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi realisasinya telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Mendorong pelaksanaan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan untuk menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) berdasarkan peta proses bisnis menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi. Proses dimulai dengan penyusunan peta proses bisnis yang menggambarkan secara rinci setiap tahapan aktivitas organisasi. Dari peta ini, kemudian ditetapkan SOP yang merinci langkah-langkah operasional, tanggung jawab, dan alur kerja. Evaluasi berkala terhadap SOP diperlukan untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi dengan

tujuan organisasi serta untuk mengidentifikasi peluang perbaikan. Penyempurnaan SOP berdasarkan evaluasi tersebut tidak hanya meningkatkan akurasi dan konsistensi pelaksanaan tugas, tetapi juga memastikan bahwa organisasi dapat merespons dinamika pasar atau lingkungan dengan lebih adaptif. Dengan adanya SOP yang terintegrasi dengan peta proses bisnis, organisasi dapat mencapai tingkat operasional yang lebih efisien, transparan, dan mudah diukur, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh memang telah menyusun SOP walaupun harus diakui belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang diharapkan.



Sedangkan untuk Administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti memang belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan walupun banyak langkah-langkan nyata yang dilaksanakan, hal ini diakibatkan karena luasnya wilayah kerja yang harus ditindaklanjuti dan terkadang satker yang dimintai tindak lanjut belum sepenuhnya menyiapkan dokumen administrasi seperti yang dipersyaratkan. pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan langkah kritis dalam memastikan efektivitas sistem pengawasan. Setelah mendapatkan temuan dari proses pengawasan, tahap administrasi memegang peran penting dalam menyusun rencana tindak lanjut. Ini melibatkan penetapan langkah-langkah konkret untuk mengatasi ketidaksesuaian atau perbaikan yang dibutuhkan. Proses administrasi juga mencakup pelibatan pihak-pihak terkait, alokasi sumber daya yang diperlukan, dan penetapan tenggat waktu untuk implementasi tindakan korektif. Evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk memantau perkembangan dan memastikan efektivitas langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi melalui peningkatan sistem dan prosedur, memperkuat akuntabilitas dan transparansi, membentuk dasar untuk perbaikan berkelanjutan, dan memelihara kepercayaan stakeholder.

Sasaran Strategis 46 : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan tiga Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi, Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas dan Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja, dengan realisasi total mencapai 98,33% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1 Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	95	95	100.00	Baik
		2 Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	40	40	100.00	Baik
		3 Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	45	40	88.89	Baik
Rerata Capaian Sasaran 46					98.33	Baik

Pembangunan Zona Integritas berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan di Kementerian Keuangan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas capaian memang sesuai target yang telah ditetapkan dengan realisasi mencapai 100%, capaian ini tidak terlepas dari kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh subkor ortala dan KUB kepada satker-

satker yang berada di provinsi Aceh walaupun secara umum masih sedikit secara total satker di provinsi Aceh masih rendah.

Sedangkan untuk realisasi indikator Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja memang sudah mendekati target dari yang ditetapkan dengan realisasi mencapai 95%, akan tetapi untuk menunjukkan kinerja agen perubahan dilapangan memang dibutuhkan kerja lebih nyata sehingga bisa berdampak langsung dilapangan dalam rangka pebaikan tata kelola dan kinerja dalam rangka mencapai target Zona Integritas karena hingga saat ini satker yang berada dilingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh belum ada satker yang berhasil mencapai kategori Zona Integritas (WBK dan WBBM).

Dalam rangka Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi, kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh pada tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan Penguatan Kelembagaan melalui Analisis Jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan Permenpan RB No.1 tahun 2021 di 23 Kab/Kota dan juga memfasilitasi Kemenag Gayo lues yang telah berhasil tembus ke tahap ke 2 untuk menjadi satker pertama dilingkungan Kemenag Provinsi Aceh untuk memperoleh WBK, serta masih banyak kegiatan lainnya.



Penguatan Kelembagaan melalui Anjab dan ABK di Lingkungan Kemenag Aceh Besar

Sasaran Strategis 47 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan tiga Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase output perencanaan yang berbasis data, Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra, Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti, dengan realisasi total mencapai 98,33% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1 Persentase output perencanaan yang berbasis data	95	95	100.00	Baik
		2 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	100	95	95.00	Baik
		3 Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	75	75	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 47					98.33	Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh bidang terkait yang dalam hal ini dilaksanakan oleh subkor Data, Informasi dan Perencanaan. Secara umum keseluruhan realisasi sudah berjalan dengan baik karena semua indikator yang termuat dalam sasaran strategis tersebut sudah dilaksanakan seluruhnya, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran mempunyai tahap-tahapan yaitu :

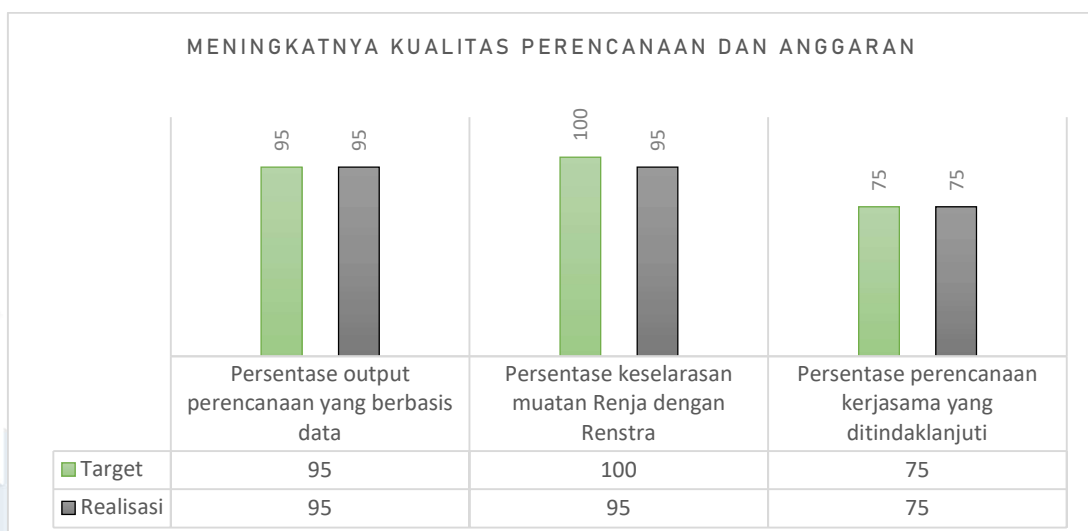
1. Penyusunan Pagu Indikatif, merupakan dasar alokasi awal dalam rangka penyusunan Rancangan APBN oleh Pemerintah Pusat, maka proses penghitungan kapasitas fiskal menjadi salah satu hal yang krusial
2. Penyusunan Pagu Anggaran, Pagu Anggaran Tahapan ini Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif, Renja-K/L, dan RKP, dan memperhatikan hasil evaluasi Kinerja K/L
3. Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran, Pagu Alokasi Anggaran Tahap ini merupakan tahapan Akhir dalam rangkaian tahapan penyusunan Anggaran.

Kualitas perencanaan dan anggaran sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan pencapaian tujuan suatu organisasi. Perencanaan yang baik melibatkan identifikasi tujuan jangka pendek dan panjang, analisis risiko, dan strategi implementasi yang terukur. Seiring dengan itu, penyusunan anggaran yang akurat dan realistis menjadi kunci untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Kualitas perencanaan dan anggaran tercermin dalam kemampuan organisasi untuk merespons perubahan lingkungan secara cepat dan efektif, sambil menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Evaluasi rutin terhadap kinerja anggaran serta penyesuaian perencanaan sesuai dengan dinamika eksternal dan internal merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan strategis dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.



Kegiatan FGD Penguatan Penganggaran

Dalam Proses penyusunan anggaran, akurasi data sangat dibutuhkan untuk meminimalisir berbagai masalah yang terjadi kedepannya. Untuk indikator Persentase output perencanaan yang berbasis data pada kanwil Kemenag Provinsi Aceh telah menerapkan penyusunan berbasis data. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme penyusunan anggaran yang dilaksanakan yaitu berbasis *bottom up*. Karena seyogyanya satker dibawahlah yang benar-benar memahami dan memiliki data akurat terkait kebutuhan pada tahun selanjutnya walaupun nantinya saat penyusunan pagu definitif tetap harus mengikuti ketersediaan dan alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah.



Sasaran Strategis 48 : Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran

Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran adalah

elemen kunci dalam memastikan keberhasilan dan ketahanan keuangan organisasi. Proses pemantauan yang efektif melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap pelaksanaan rencana dan anggaran, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan sesuai dengan prioritas dan tujuan strategis. Evaluasi berkala terhadap perencanaan dan anggaran dilakukan untuk mengevaluasi kinerja, identifikasi potensi perbaikan, dan memastikan konsistensi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi, organisasi dapat mengidentifikasi tantangan secara proaktif, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memperbaiki kebijakan atau strategi yang tidak sesuai. Proses ini juga membuka ruang bagi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi yang ditingkatkan menjadi landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berkelanjutan, memastikan bahwa organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan dan mencapai tujuan mereka dengan efisiensi dan efektivitas yang lebih baik.

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas, Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti, dengan realisasi total mencapai 100% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	96	96	100.00	Baik
		2 Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	75	75	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 48					100.00	Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh bidang terkait yang dalam hal ini dilaksanakan oleh subkor Data, Informasi dan Perencanaan. Kedua indikator tersebut masing masing terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Untuk laporan realisasi anggaran telah dilaksanakan dan disusun sesuai dengan ketentuan berlaku sedangkan untuk rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti juga telah dilaksanakan seluruhnya dimana DIPA yang diserahkan kepada masing-masing satker untuk dilaksanakan telah mencerminkan dan memuat rencana pembangunan nasional.

Penyerahan DIPA
2023 oleh Kakanwil
kepada Jajaran



Penyerahan DIPA 2023
di Lingkungan Kemenag
B. Aceh

Laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran dapat diartikan sebagai laporan Pencapaian kinerja sebagai suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai tujuan yang sudah ditetapkan dan diperjanjikan pada awal tahun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kinerja selama tahun anggaran tersebut berjalan. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menyusun laporan dimaksud sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 laporan selama tahun anggaran tersebut.

Sasaran Strategis 49 : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor menjadi landasan penting bagi efisiensi dan produktivitas organisasi. Dengan investasi yang terfokus pada teknologi canggih, peralatan modern, dan desain ruang kerja yang ergonomis. Infrastruktur teknologi yang mutakhir tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga memungkinkan kolaborasi tim yang lebih efektif. Peningkatan sarana dan prasarana kantor juga mencakup upaya untuk menciptakan ruang kerja yang ramah lingkungan, mengintegrasikan solusi hemat energi dan mendukung inisiatif keberlanjutan. Dengan demikian, perbaikan kualitas sarana dan prasarana kantor tidak hanya

memberikan manfaat langsung dalam hal efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar, dengan realisasi total mencapai 100% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	90	90	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 49					100.00	Baik

Secara keseluruhan untuk kinerja diatas pencapaian kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90 kegiatan telah direalisasikan sebesar 90 juga. Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang memadai sehingga dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Pemenuhan kebutuhan berupa peralatan dan mesin maupun bangunan fisik, yang sumber pendanaannya dari DIPA/pengadaan rutin maupun melalui dana SBSN. Pengadaan berupa peralatan dan mesin lebih banyak bersumber dari dana DIPA sedangkan untuk pengadaan berupa Fisik lebih banyak berasal dari dana SBSN yang peruntukannya untuk KUA, gedung PLHUT (Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu) ataupun bangunan ruang kelas (RKB) yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.

Pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar merupakan aspek krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang optimal. Hal ini melibatkan penyediaan fasilitas yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Dalam konteks ini, standar prasarana kantor mencakup aspek teknologi, ergonomi, dan keamanan. Penerapan teknologi terkini seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan karyawan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk tugas mereka. Pemenuhan standar ergonomi juga menjadi prioritas, dengan penataan ruang kerja yang memperhatikan kenyamanan fisik dan mental karyawan, sehingga dapat mengurangi risiko cedera dan meningkatkan produktivitas. Keamanan fisik dan data juga harus diintegrasikan dalam prasarana kantor, melibatkan penggunaan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi aset perusahaan dan informasi sensitif.

Selain itu, pemenuhan standar prasarana kantor juga melibatkan aspek keberlanjutan dan efisiensi energi. Desain bangunan yang ramah lingkungan dan penggunaan teknologi hemat energi dapat mengurangi dampak lingkungan dan biaya operasional jangka panjang. Penataan ruang yang

memperhitungkan sirkulasi udara alami dan pencahayaan alami juga dapat meningkatkan kualitas udara dan kenyamanan lingkungan kerja. Dengan memperhatikan semua aspek ini, organisasi dapat memastikan bahwa prasarana kantor mereka tidak hanya memenuhi standar saat ini, tetapi juga siap untuk menghadapi tantangan masa depan yang terus berkembang dalam dunia bisnis yang dinamis.



Peningkatan sarana/upgrade PojoK Baca

Sarana dan prasarana merupakan dua hal yang saling menunjang antara yang satu dengan yang lainnya. Namun bukan berarti jika tidak ada salah satu, maka salah satunya lagi tidak berfungsi sama sekali. Memang harus diakui keterbatasan anggaran yang tersedia sangat berpengaruh pada peningkatan sarana dan prasarana kantor. Banyak alat-alat kerja yang memang sudah waktunya untuk diperbaharui seperti PC, Unit, Laptop dan beberapa peralatan lainnya. Hal ini sudah disikapi dengan cara melakukan pengadaan secara bertahap dengan mengedepankan standar prioritas yang paling membutuhkan terlebih dahulu sehingga nantinya ditargetkan dapat terpenuhi seluruhnya sesuai kebutuhan.

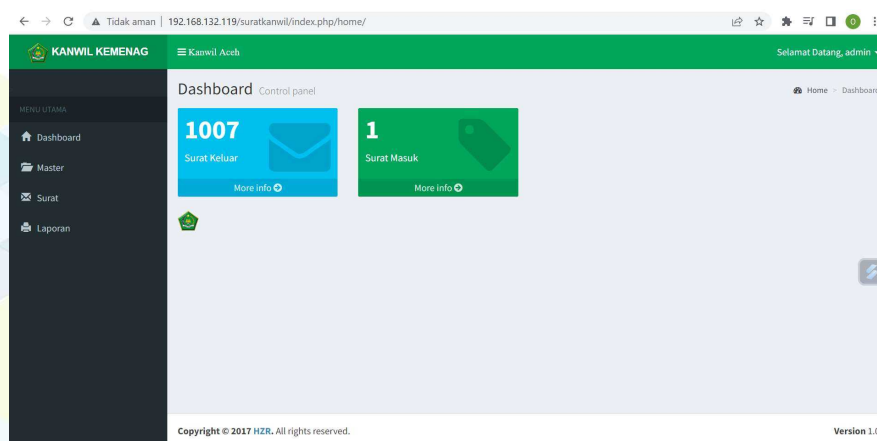
Sasaran Strategis 50 : Meningkatkan kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan lima Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu, Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik, Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen, Persentase menurunnya lelang gagal dan

Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding, dengan realisasi total mencapai 92% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1 Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	100	100	100.00	Baik
		2 Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	100	90	90.00	Baik
		3 Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	100	70	70.00	Cukup
		4 Persentase menurunnya lelang gagal	90	90	100.00	Baik
		5 Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	90	90	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 50					92.00	Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh bidang terkait yang dalam hal ini dilaksanakan oleh subkor umum dan humas selaku leading sektor pelaksanaan tugas. Secara umum pelaksanaan tugas pada sasaran strategis ini sudah berjalan dengan cukup baik. Tidak dapat dipungkiri memang untuk beberapa kegiatan kurangnya penerapan teknologi informasi berbasis elektronik untuk pelayanan tata naskah dinas dilingkungan Kanwil Kementerian Agama provinsi Aceh masih belum tercapai sesuai seperti harapan. Memang untuk penomoran surat sudah dilaksanakan secara online akan tetapi untuk proses disposisi surat masih berbasis manual sehingga apabila pejabat pendisposisian surat sedang tidak berada di tempat tugas maka proses administrasi surat akan tersendat. Perbaikan dalam rangka percepatan transformasi digital dalam segala bidang yang merupakan cita-cita dari reformasi birokrasi menuju WBK dan WBBM.



Aplikasi Persuratan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh

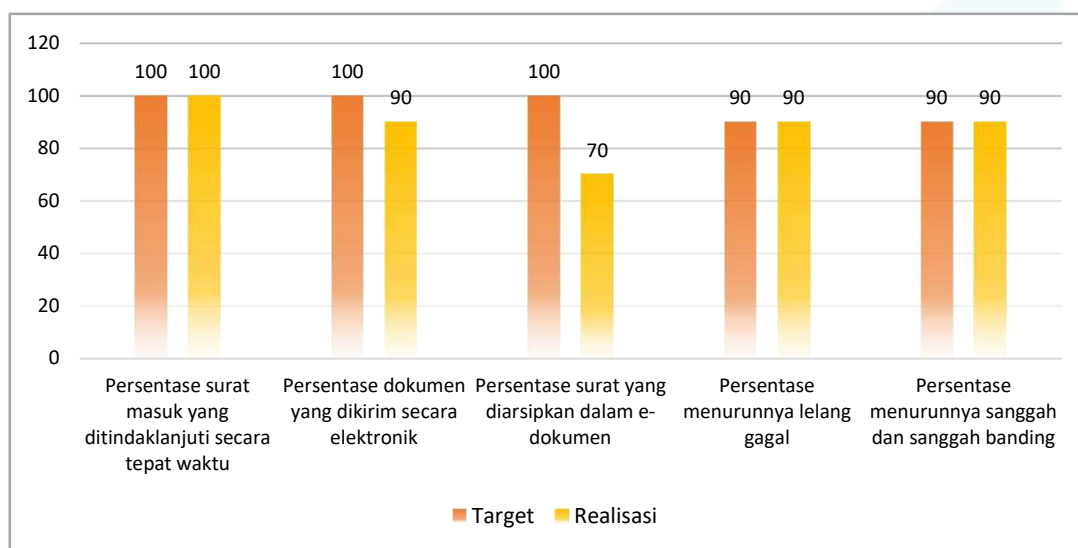
Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi, antara lain, pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan ralat. Ketentuan tentang tata naskah dinas yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan dalam Pedoman Umum Tata Naskah Dinas tersebut perlu disesuaikan. Dilingkungan Kementerian Agama tata naskah dinas telah diatur dalam KMA Nomor 9 Tahun 2016.

Layanan pengadaan barang jasa memainkan peran kunci dalam mendukung operasional suatu organisasi dengan menyediakan proses yang efisien, transparan, dan berkesinambungan. Layanan ini mencakup tahapan mulai dari perencanaan, pengumuman, hingga pelaksanaan kontrak, memastikan bahwa organisasi mendapatkan barang dan jasa berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan. Dengan penerapan teknologi informasi, layanan pengadaan dapat diotomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan manusiawi. Pentingnya layanan pengadaan juga tercermin dalam kemampuannya untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan pemasok, memastikan transparansi, fair play, serta pemenuhan regulasi dan etika bisnis. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, layanan pengadaan barang jasa tidak hanya menjadi jembatan antara organisasi dan pasar, tetapi juga kontributor penting dalam mencapai tujuan strategis organisasi.

Pelaksanaan Lelang Pengadaan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh bisa dikatakan hampir tidak ada yang mengalami gagal lelang. Menurunnya lelang gagal merupakan indikator positif dalam proses pengadaan barang dan jasa, mencerminkan efektivitas dan kematangan sistem pengadaan. Faktor penurunan lelang gagal dapat berasal dari peningkatan kualitas perencanaan, transparansi proses lelang, serta partisipasi pemasok yang lebih aktif. Perencanaan yang matang membantu mengidentifikasi kebutuhan organisasi dengan lebih akurat, sementara transparansi yang ditingkatkan dalam proses lelang memberikan kejelasan kepada pemasok, mengurangi risiko ketidakpastian, dan meningkatkan persaingan yang sehat. Partisipasi aktif pemasok dapat merangsang kompetisi, menghasilkan penawaran yang lebih baik, dan mengurangi peluang kegagalan lelang.

Grafik sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan

pengadaan barang jasa



Sedangkan untuk pelaksanaan lelang sudah berjalan dengan cukup baik dan transparan, walaupun memang tidak dapat dipungkiri tetap ada pihak-pihak yang tidak puas terhadap pelaksanaan proses lelang dimaksud.

Sasaran Strategis 51 : Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan dengan realisasi total mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	90	90	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 51					100.00	Baik

Pelayanan prima merupakan bentuk pelayanan jasa sebagai tindak kepedulian perusahaan terhadap pelanggan atau tamu untuk memenuhi kepuasan mereka. Dengan pelayanan yang sangat baik, tentu membuat tamu yang datang merasa nyaman dan merasa sangat dihargai. Pelayanan prima yang diberikan mencakup sikap, perhatian, tindakan, kemampuan, penampilan serta tanggung jawab. Dilihat dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pelayanan tamu-tamu yang berkunjung ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh merasa sangat puas, hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan oleh petugas terkait, walaupun memang tidak dapat dipungkiri terkadang masih ada tamu yang merasa tidak puas terhadap

pelayanan yang diberikan baik dari segi letak parkir dan pelayanan satpam yang terkadang belum maksimal.

Dari hasil yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima telah diterapkan dalam pelayanan tamu oleh bagian respnsionis terutama dalam tiga poin berikut;

- 1) Etika dalam melayani tamu, menggunakan bahasa yang baik dan baku ketika berbicara dengan tamu.
- 2) Identitas dan jenis-jenis tamu, pelayanan tamu dilaksanakan dengan sopan dan ramah.
- 3) Tindak lanjut penerimaan tamu, tersedianya ruang untuk tamu menunggu ketika tamu tersebut harus menunggu orang yang akan ditemui, bersikap sopan kepada setiap tamu apalagi ketika mereka tidak sabar menunggu dan selalu mengusahakan tamu agar merasa senang dan tidak bosan.



Perwakilan Bank Aceh Syariah berkunjung ke Kanwil Kemenag Provinsi Aceh

Sasaran Strategis 52 : Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi

Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi menjadi sebuah prioritas yang tak terbantahkan dalam era kontemporer yang terus berkembang ini. Dengan memanfaatkan teknologi canggih dan strategi komunikasi yang efektif, organisasi publik dan swasta sama-sama berupaya untuk memastikan bahwa masyarakat dilayani dengan baik dan informasi disampaikan secara transparan dan akurat. Dari penggunaan media sosial yang cerdas hingga platform daring yang inovatif, perusahaan dan lembaga pemerintah berusaha untuk memperkuat hubungan dengan publik mereka, memperbaiki citra, dan memastikan bahwa pesan-pesan mereka sampai kepada audiens target dengan cepat dan tepat. Dengan demikian, meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi menjadi kunci

dalam membangun kepercayaan dan loyalitas masyarakat serta memperkuat fondasi komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan modern.



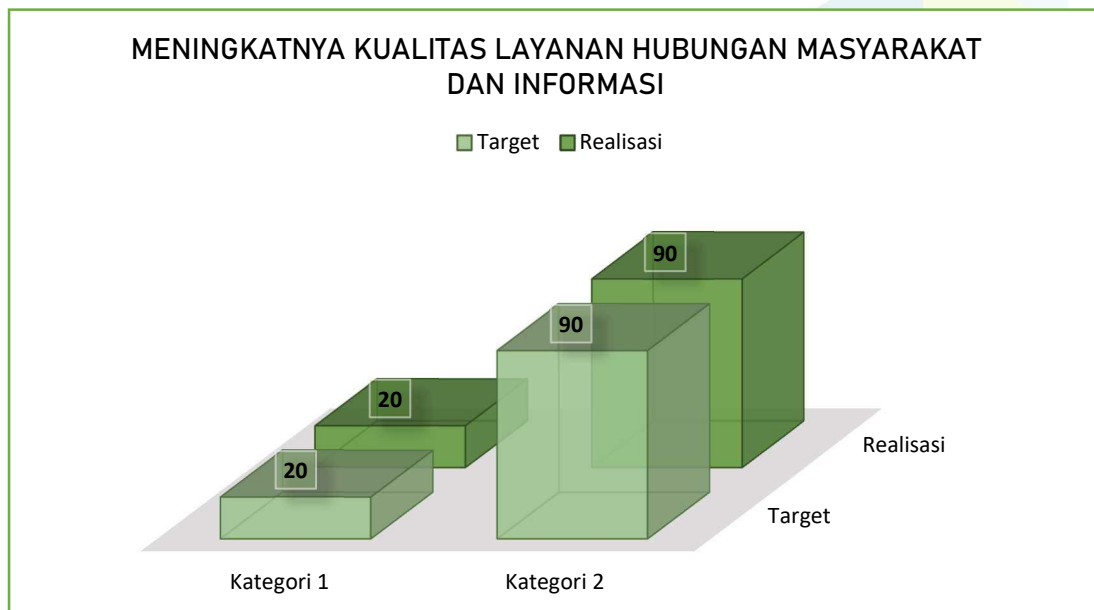
Pemberitaan di salah satu website lokal tentang Biaya Perjalanan Haji 2024

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi dan Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter. Dengan realisasi total mencapai 100,00% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1 Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	20	20	100.00	Baik
		2 Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	90	90	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 52					100.00	Baik

Jika dilihat dari tabel diatas, maka indikator ini diukur dengan membandingkan target dan realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi telah mendekati target yang ditetapkan dengan kategori baik. Capaian kinerja ini dapat dilihat dari banyaknya berita-berita tentang prestasi dan kinerja-kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yang dipublikasikan di berbagai media baik media sosial, media cetak media televisi dan lainnya. Sedangkan untuk indikator pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi dan Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter dapat dilihat dari bagaimana

kinerja kantor dalam memback up dan mencounter pemberitaan miris yang mungkin dapat merusak nama institusi Kementerian Agama.



Pada era media sosial sekarang, organisasi dari skala kecil hingga besar, berlomba-lomba mempercantik media sosialnya di berbagai platform. Hal itu didasari bahwa kini media sosial menjadi pusat keramaian baru, dan akun media sosial akan mencerminkan “wajah” organisasi itu sendiri, sehingga merupakan keharusan apabila akun media sosial dikelola secara serius. Jumlah pemberitaan mengenai capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Aceh menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana keterbukaan dan akuntabilitas lembaga tersebut kepada masyarakat. Sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab luas dalam mengelola urusan keagamaan di tingkat regional, Kanwil Kemenag Provinsi Aceh berperan penting dalam menyampaikan informasi tentang inisiatif, kegiatan, serta pencapaian program yang dilaksanakannya kepada publik. Melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa lokal, situs web resmi, dan siaran pers, Kanwil Kemenag Provinsi Aceh berupaya untuk memberikan laporan yang terperinci dan transparan tentang upaya-upaya yang telah dijalankan untuk memajukan kegiatan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Untuk sarana kegiatan ini capaian kerjanya bisa dikatakan sudah sesuai ekspektasi yang ditetapkan karena pemberitaan tentang pelaksanaan kegiatan selalu rutin diinfokan baik melalui website resmi kemenag Aceh, Instagram, Facebook, maupun pemberitaan media lokal lainnya.

The screenshot shows the official website of the Aceh Government. The main article is titled "Kakanwil Kemenag Aceh Gathering Media Bersama Wartawan" and is dated December 7, 2023. The article features a photograph of a media gathering event. The sidebar on the right contains a section for "Agenda Terkini" with three items: "Peringatan 19 Tahun Tsunami Aceh" (December 26, 2023), "Pacuan Kuda Tradisional Gayo 2023" (December 18, 2023), and "Festival Kuliner Aceh Barat 2023" (December 17, 2023). Below this is a "Berita Terkini" section with a headline "Silaturahmi dengan Penyuluh dan Petani, Mentan Gelar 'Peradilan Pertanian' Dadakan" dated February 7, 2024.

Salah satu pemberitaan tentang Kemenag Prov. Aceh di Website Pemerintah Aceh

Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang berhasil di-counter oleh Kemenag Provinsi Aceh merupakan indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas strategi manajemen reputasi dan komunikasi yang diterapkan oleh lembaga tersebut. Dengan berbagai upaya proaktif dalam menyampaikan informasi yang transparan, mengedepankan narasi positif, serta memberikan tanggapan yang tepat terhadap isu-isu yang muncul, Kemenag Provinsi Aceh berhasil mengurangi dampak dari pemberitaan negatif tersebut. Melalui kolaborasi dengan media, penggunaan platform daring, dan penyelenggaraan kegiatan yang memperkuat citra positif lembaga, Kemenag Provinsi Aceh dapat meningkatkan persepsi masyarakat serta membangun kepercayaan yang lebih solid terhadap kinerja dan tujuan dari Kementerian Agama di tingkat provinsi tersebut.

Sasaran Strategis 53 : Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi

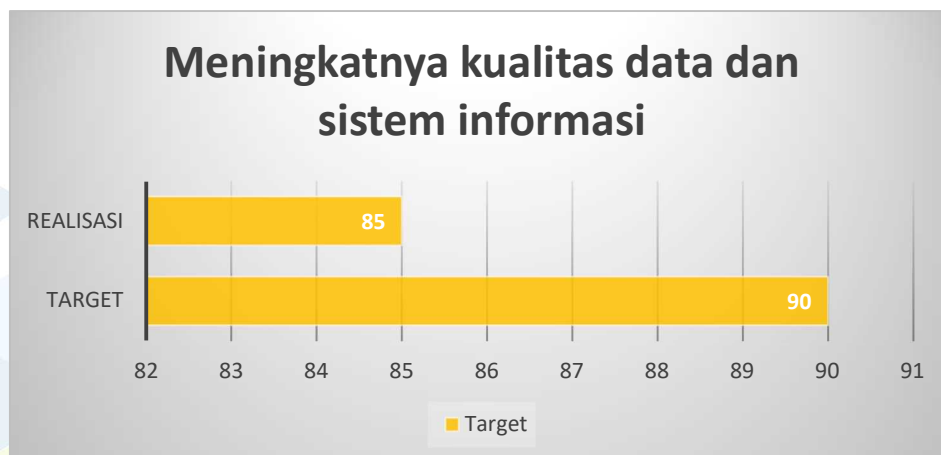
Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi di Kemenag Provinsi Aceh memperkuat efisiensi, transparansi, dan pelayanan. Melalui pembaruan infrastruktur teknologi, pengimplementasian sistem basis data terintegrasi, dan pelatihan pegawai, Kemenag Provinsi Aceh menghasilkan data yang akurat dan mudah diakses. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan evaluasi yang efektif terhadap program-program keagamaan serta layanan publik.

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar dan Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable. Dengan realisasi total mencapai 94,44% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1 Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	90	85	94.44	Baik
Rerata Capaian Sasaran 53					94.44	Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target dan realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi telah mendekati target yang ditetapkan dengan kategori baik. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapainya target tersebut seperti memperbaiki kualitas jaringan di lingkungan kantor dan penyempurnaan berbagai sistem atau aplikasi yang digunakan dan mendukung kinerja instansi. Selain ini kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyempurnakan data-data agama juga telah dilaksanakan seperti kerjasama dengan kesbangpol Aceh dan FKUB Provinsi. Sistem Informasi saat ini tidak lagi sebatas mendukung proses bisnis namun juga sebagai business enabler, di mana bisnis sudah sangat bergantung penuh pada kualitas SI/TI yang dimiliki, bahkan SI/TI dapat menginisiasi proses bisnis baru pada di area tertentu.

Untuk meningkatkan persentase data yang valid dan reliable, Kementerian Agama perlu mengambil langkah-langkah proaktif, seperti meningkatkan sistem pengumpulan dan pengolahan data, meningkatkan kualitas pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam pengelolaan data, serta memperkuat kerjasama dengan lembaga riset dan institusi terkait. Dengan memastikan standar yang ketat dalam proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data, Kementerian Agama dapat meminimalkan kesalahan atau distorsi dalam informasi yang disediakan, sehingga dapat memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dan pembangunan kebijakan yang lebih efektif di bidang agama dan pendidikan.



Data agama dan pendidikan yang valid dan reliable pada Kementerian Agama menjadi aspek yang vital dalam menjamin keberhasilan kebijakan dan program-program yang dilaksanakan.

Dengan data yang akurat dan dapat dipercaya, Kementerian Agama Provinsi Aceh dapat mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta potensi dalam bidang agama dan pendidikan dengan lebih tepat. Hal ini memungkinkan mereka untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta menyusun strategi yang sesuai untuk memajukan bidang agama dan pendidikan di Indonesia. Validitas dan keandalan data ini juga memungkinkan Kementerian Agama untuk memonitor dan mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diterapkan, sehingga dapat melakukan penyesuaian atau perbaikan yang diperlukan.

Dalam penyusunan anggaran setiap tahunnya, data ini merupakan komponen utama yang akan digunakan, tanpa adanya data ini maka dapat dipastikan bahwa hasil/output yang dihasilkan dari proses penyusunan samai menjadi DIPA tahun berikutnya pasti akan berantakan dan tidak akan sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Sasaran Strategis 54 : Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama Provinsi Aceh telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional. Dengan realisasi total mencapai 100% dengan kategori Baik, sebagaimana pada tabel berikut:

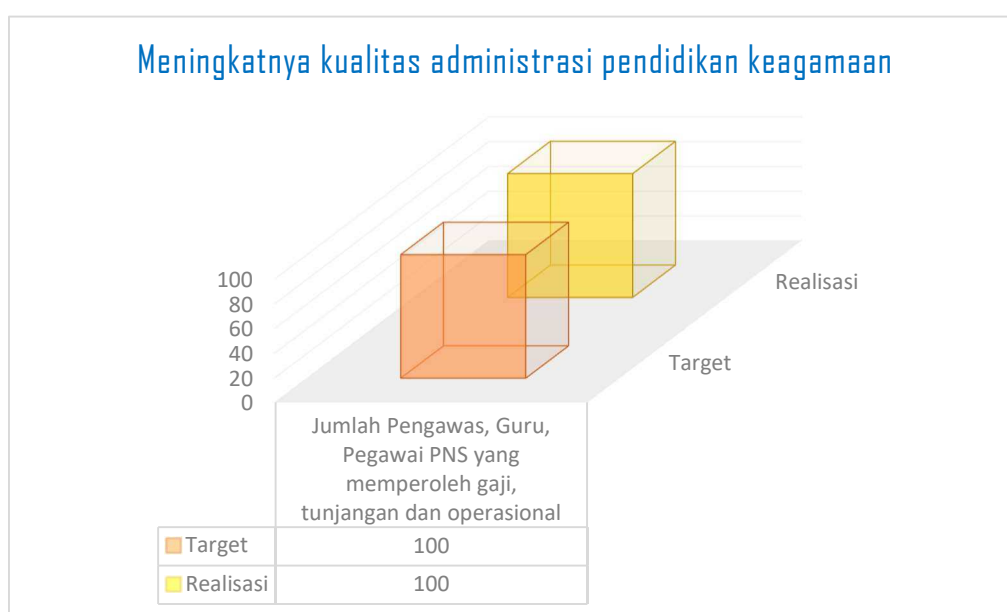
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	1	1	100.00	Baik
Rerata Capaian Sasaran 54					100.00	Baik

Indikator ini diukur dengan membandingkan target dan realisasi yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja dengan hasil realisasi sesuai bahkan melebihi target yang ditetapkan dengan kategori baik. Sasaran kegiatan ini dilihat dari tersalurkannya gaji, tunjangan dan operasional yang tersalurkan kepada penerima baik pegawai negeri ataupun non pegawai negeri. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan melalui pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan pengelolaan sumber daya yang efisien adalah kunci dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik bagi peserta didik, memperkuat pemahaman nilai-nilai keagamaan, dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan.

Jumlah pengawas, guru, dan pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan, dan operasional pada Kementerian Agama Provinsi Aceh merupakan indikator vital dalam mengukur kesejahteraan dan efisiensi administratif di lembaga tersebut. Melalui alokasi dana yang tepat

untuk gaji dan tunjangan, Kementerian Agama dapat memastikan bahwa para tenaga pendidik dan pegawai memiliki insentif yang cukup untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Selain itu, pengalokasian dana operasional yang memadai juga memungkinkan Kementerian Agama untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan dengan efektif, termasuk dalam mendukung pendidikan agama di wilayah Aceh. Dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh sendiri realisasi mencapai 100% dikarenakan secara keseluruhan hanya disalurkan untuk 1 orang penerima, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada kendala yang berarti, asalkan persyaratan sudah terpenuhi sesuai aturan maka dapat dilaksanakan proses pencairan anggaran.

Grafik perbandingan target dan realisasi Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan



C. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu kewajiban bagi sebuah instansi untuk memastikan bahwa informasi keuangan suatu entitas akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini mencakup pencatatan transaksi dengan benar, menyusun laporan keuangan yang jelas, dan menjalani proses audit untuk memverifikasi keakuratan dan kepatuhan, sehingga memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan serta menjaga transparansi dalam pengelolaan sumber daya keuangan entitas tersebut.

Realisasi pelaksanaan anggaran merupakan gambaran praktis dari sejauh mana alokasi dana yang telah disetujui dalam anggaran lembaga atau instansi tertentu telah dimanfaatkan dan dijalankan. Untuk Kementerian Agama Provinsi Aceh, realisasi pelaksanaan anggaran mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan dana untuk gaji

dan tunjangan pegawai, operasional harian, hingga pendanaan program-program pendidikan dan keagamaan.

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	PAGU ANGGARAN AKHIR (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	Persentase
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	47,511,503,000	42,700,872,000	42,443,831,508	99.40 %
	2098 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	50,004,000	-	-	- %
	2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian	476,240,000	464,240,000	459,345,024	98.95 %
	2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	16,145,606,000	12,468,056,000	12,422,538,087	99.63 %
	2101 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	103,640,000	99,100,000	98,048,370	98.94 %
	2102 Pembinaan Administrasi Perencanaan	384,831,000	369,771,000	364,955,339	98.70 %
	2103 Pembinaan Administrasi Umum	6,380,081,000	6,371,898,000	6,365,490,721	99.90 %
	2106 Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	288,300,000	285,540,000	285,379,440	99.94 %
	6708 Dukungan Manajemen Pendidikan	8,354,134,000	9,074,100,000	9,063,462,616	99.88 %
	2125 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	1,531,148,000	1,531,148,000	1,520,405,454	99.30 %
	2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	11,695,564,000	9,965,064,000	9,821,753,572	98.56 %
	2138 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	76,000,000	76,000,000	75,369,133	99.17 %
	5100 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	128,168,000	128,168,000	128,082,100	99.93 %
	2141 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	157,496,000	157,496,000	147,807,232	93.85 %
	5102 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	173,519,000	173,519,000	166,643,005	96.04 %
	2144 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	181,720,000	181,720,000	180,156,422	99.14 %

		Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu				
	2146	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha	25,000,000	25,000,000	23,134,055	92.54 %
	5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	210,000,000	210,000,000	209,702,981	99.86 %
	2150	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah	1,150,052,000	1,120,052,000	1,111,557,957	99.24 %
2	PROGRAM KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA		9,563,374,000	10,595,048,000	10,291,852,308	97.14 %
	5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	507,376,000	507,376,000	498,698,260	98.29 %
	2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	1,432,035,000	1,790,548,000	1,336,750,621	74.66 %
	2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	1,055,000,000	1,055,000,000	1,041,785,590	98.75 %
	2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	981,200,000	1,136,200,000	1,122,331,826	98.78 %
	2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	1,092,660,000	1,222,660,000	1,168,828,020	95.60 %
	2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	554,250,000	534,250,000	534,245,460	100.00 %
	2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	173,519,000	173,519,000	509,153,000	293.43 %
	2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	49,000,000	49,000,000	49,000,000	100 %
	2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	399,000,000	370,250,000	369,726,000	99.86 %
	2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	72,798,000	71,318,000	67,635,376	94.84 %
	2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	63,535,000	60,900,000	60,768,000	99.78 %
	2148	Pembinaan Haji	3,183,001,000	3,624,027,000	3,532,930,155	97.49 %
3	PROGRAM KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN		46,413,162,000	38,746,919,000	38,068,971,975	98.25 %
	4422	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	1,340,350,000	1,340,350,000	1,268,342,062	94.63 %

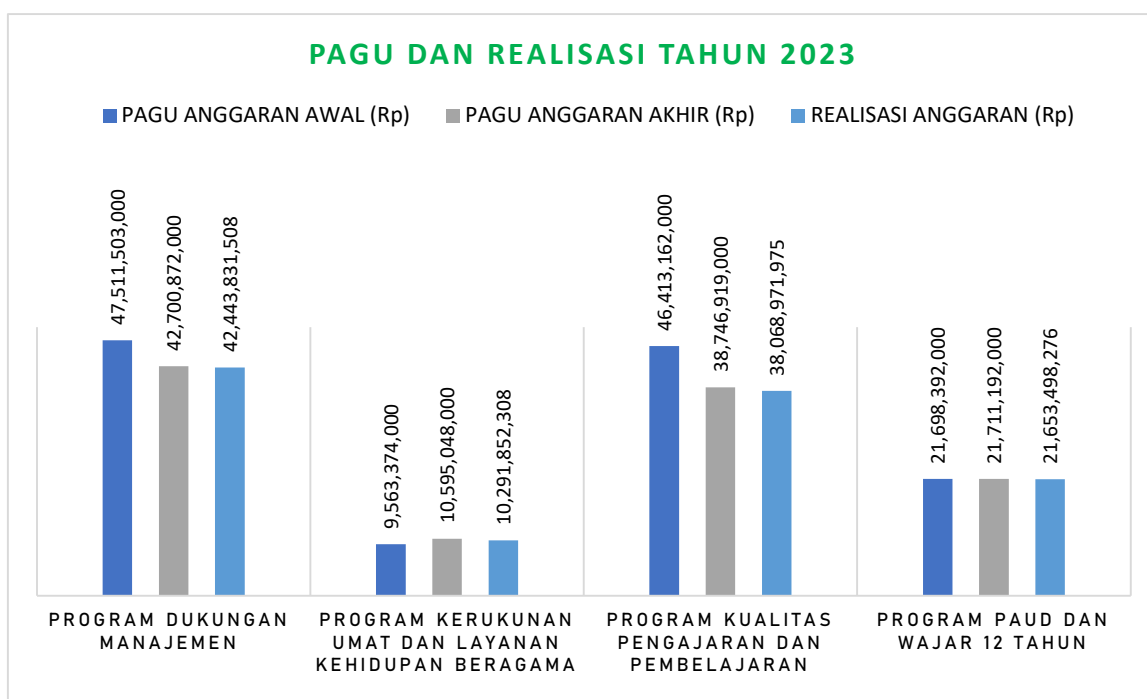
	2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	35,645,154,000	27,841,922,000	27,282,721,000	97.99 %
	4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	1,714,500,000	1,864,500,000	1,864,500,000	100.00 %
	2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	7,262,511,000	7,262,511,000	7,217,492,975	99.38 %
	4434	Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	109,604,000	125,636,000	125,557,300	99.94 %
	4435	Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	160,043,000	131,000,000	130,041,200	99.27 %
	4437	Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	181,000,000	181,000,000	180,317,438	99.62 %
4	PROGRAM PAUD DAN WAJAR 12 TAHUN		21,698,392,000	21,711,192,000	21,653,498,276	99.73 %
	2128	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, Dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	2,970,000,000	2,970,000,000	2,966,158,000	99.87 %
	2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	18,672,392,000	18,672,392,000	18,618,626,233	99.71 %
	4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	56,000,000	68,800,000	68,714,043	99.88 %
Total Anggaran			125,186,431,000	113,754,031,000	112,458,154,067	98.86 %

Dengan memantau realisasi pelaksanaan anggaran, Kementerian Agama Provinsi Aceh dapat mengevaluasi efisiensi pengelolaan keuangan, mengidentifikasi area-area di mana dana dialokasikan dengan baik, serta menemukan potensi perbaikan atau penghematan. Analisis terhadap realisasi anggaran juga memungkinkan lembaga tersebut untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan prioritas strategis mereka, serta menjaga keseimbangan antara pengeluaran operasional dan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur. Dengan demikian, realisasi pelaksanaan anggaran bukan hanya menjadi indikator kinerja keuangan, tetapi juga alat untuk mengarahkan pengambilan keputusan yang lebih bijak dan strategis dalam penyelenggaraan program-program Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Tabel diatas menunjukkan kinerja anggaran pada Kanwil kementerian Agama Provinsi Aceh secara detail perkegiatan. Jika dipersingkat kedalam output kegiatan maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL(Rp)	PAGU ANGGARAN AKHIR (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	Persentase	
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	47,511,503,000	42,700,872,000	42,443,831,508	99.40	%
2	PROGRAM KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	9,563,374,000	10,595,048,000	10,291,852,308	97.14	%
3	PROGRAM KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN	46,413,162,000	38,746,919,000	38,068,971,975	98.25	%
4	PROGRAM PAUD DAN WAJAR 12 TAHUN	21,698,392,000	21,711,192,000	21,653,498,276	99.73	%
Total Anggaran		125,186,431,000	113,754,031,000	112,458,154,067	98.86	%

Apabila dituangkan dalam grafik, dapat dilihat sebagai berikut :



Dalam proses perjalanannya selama tahun anggaran, terjadi beberapa revisi anggaran baik karena kebutuhan internal di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh maupun revisi secara nasional. Proses revisi oleh satker umumnya tidak mengakibatkan terjadinya pengeseran anggaran secara signifikan antar beberapa output kegiatan, akan tetapi apabila adanya revisi anggaran oleh unit eselon 1 kementerian Agama RI pusat maka dapat dipastikan adanya perubahan antar output kegiatan karena beberapa kegiatan harus menyesuaikan kembali dengan program prioritas nasional sesuai dengan perubahan yang ditetapkan dan ditargetkan oleh Pemerintah. Sehingga dari tabel diatas dapat dilihat terjadinya perubahan antara pagu awal yang merupakan DIPA awal dengan Pagu akhir yang

ditetapkan setelah terjadinya beberapa revisi.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

D. Prestasi/capaian Kinerja Lainnya

Prestasi atau capaian kinerja lainnya yang dapat dicerminkan oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh meliputi berbagai hal, mulai dari peningkatan indeks kualitas pendidikan agama, peningkatan partisipasi dalam program-program keagamaan, hingga inovasi dalam metode pembelajaran dan penyelenggaraan acara keagamaan. Selain itu, prestasi juga dapat dilihat dari upaya Kementerian Agama dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan antarumat beragama, partisipasi dalam program-program bantuan sosial dan kemanusiaan, serta dukungan terhadap pengembangan kegiatan-kegiatan keagamaan yang memperkuat moral dan etika dalam masyarakat. Prestasi kinerja lainnya juga dapat terlihat dari pencapaian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi agama, termasuk peningkatan efisiensi dalam penerbitan dokumen keagamaan dan layanan administratif lainnya. Dengan memonitor dan mengevaluasi berbagai prestasi ini, Kementerian Agama Provinsi Aceh dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam memajukan urusan keagamaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Kementerian Agama Provinsi Aceh mencatat berbagai capaian kinerja yang mengesankan dalam berbagai aspek pelayanan agama dan keagamaan. Capaian kinerja lainnya merupakan pencapaian yang tidak dapat diukur atau diatribusikan dengan jelas ke dalam indikator atau parameter tertentu. Capaian kinerja lainnya bisa mencakup berbagai hal yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori kinerja yang lebih spesifik atau terukur. Berikut tabel capaian kinerja lainnya di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Aceh:

No.	Pemberi Penghargaan	Kategori
1	Kementerian Keuangan	Peringkat pertama keuangan kategori Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Besar
		
2	Kementerian Keuangan	Peringkat terbaik 2 hasil penilaian laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W)
		
3	Kementerian Keuangan	Ppenghargaan terbaik III realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satuan Kerja Koordinator Wilayah
		
4	Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI	Koordinasi Terbaik I dengan Pemda



5	Kementerian Agama RI	Humas Kemenag Award 2023 kategori Juara terbaik III Pengelola Medsos Terbaik
---	----------------------	--



6	Acer Indonesia	Acer Smart School Awards dan Special Mention 2023 🏆 Kategori jelajah ilmu 🏆 Acer Special Mention
---	----------------	--



7	Kementerian Agama RI	Indeks Tertinggi Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya
---	----------------------	---



BAB IV PENUTUP



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH**

BAB IV Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Instansi Kementerian Agama Provinsi Aceh memiliki peran krusial dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian tujuan dan kinerja instansi tersebut selama periode tertentu khususnya tahun kegiatan 2023 ini. Melalui Laporan ini Kementerian Agama Provinsi Aceh dapat menyajikan data yang terinci mengenai berbagai program dan kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan serta sejauh mana capaian tersebut mendukung visi dan misi Kementerian Agama secara keseluruhan. Selain itu, LAKIP juga menjadi sarana transparansi yang memungkinkan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas instansi dalam menjalankan tugas dan fungsi agamanya. Dengan demikian LAKIP ini tidak hanya menjadi instrumen pelaporan, tetapi juga menjadi landasan untuk perbaikan terus-menerus dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen di bidang keagamaan.

Dalam hal capaian kinerja, pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mencatatkan kinerja yang cukup baik dari 54 sasaran kinerja yang ditetapkan, 32 target kinerja dapat tercapai 100% atau lebih dan 22 target kinerja masih belum tercapai 100%, dengan capaian akhir realisasi sebesar 108,24%. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh periode 2020-2024. Selain itu, beberapa hal telah diidentifikasi dari pelaksanaan Pencapaian Kinerja tahun ini sebagai bahan perbaikan untuk tahun selanjutnya, antara lain:

Melakukan penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan RSPK sehingga dapat menunjukkan kontribusi terhadap kinerja organisasi

01

02

Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan program dan kegiatan yang dilakukan dapat tercapai

Pemanfaatan sistem informasi secara optimal untuk memudahkan penyusunan dan pemantauan rencana aksi kinerja sehingga seluruh unit kerja dapat terlibat secara aktif

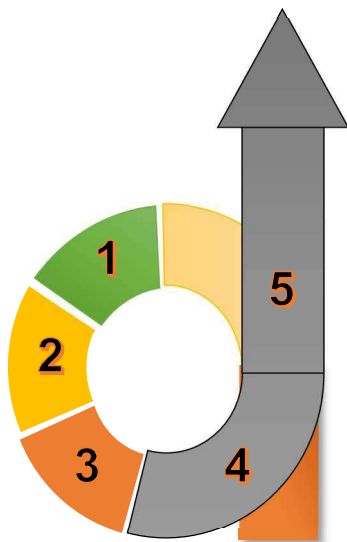
03

04

Perlu dilaksanakan perbaikan secara terus menerus setiap unit kerja dan dilaporkan dalam Laporan Kinerja unit kerja masing-masing secara berkala

Keberhasilan pencapaian akuntabilitas kinerja ini tidak dapat dilepaskan dari komitmen seluruh insan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh serta stakeholders yang senantiasa berkolaborasi dalam meningkatkan akuntabilitas secara lebih baik, terarah, dan tepat sasaran. Laporan Kinerja ini dapat menjadi sebuah referensi pembelajaran bagi setiap insan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam rangka penguatan manajemen kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Catatan baik yang telah dimiliki harus menjadi modal berharga untuk semakin memperkokoh kontribusi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam pembangunan.

Secara garis besar rencana ke depan langkah strategis yang akan dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam upaya untuk meningkatkan kinerjanya adalah sebagai berikut :



1. Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan analisis/telaah kebijakan melalui penajaman substansi kajian/kebijakan. Penajaman substansi dilakukan sejak awal (sebelum tahun berjalan atau pada awal tahun berjalan) dan telah melibatkan stakeholder yang menjadi target penerima manfaat kajian. Selain itu perlunya penguatan SDM khususnya pejabat fungsional analisis kebijakan yang berkompeten di bidang kajian kebijakan untuk dapat mendukung perumusan rekomendasi kebijakan yang berkualitas;
2. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada kegiatan pengkajian kebijakan, inovasi, pengembangan kompetensi, penyelenggaraan pelatihan, pendidikan tinggi dan semua kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kanwil Kemenag Provinsi Aceh;
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan program dan kegiatan yang dilakukan dapat tercapai.
4. Menjalankan fungsi SPIP dalam rangka memaksimalkan dan kontrol kinerja organisasi.
5. Optimalisasi pelaporan dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan berbagai kegiatan



LAMPIRAN

1. PERKIN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH**

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
Jl. Tgk Abu Lam U No. 9
Banda Aceh 23242**

<http://aceh.kemenag.go.id>



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nizar
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan program prioritas Menteri Agama.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama melakukan penyerapan anggaran sampai pada bulan ke-7 (tujuh) dengan target senilai 70% (persen).

Bali, 13 Desember 2022
Pihak Pertama,



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1 Nilai kinerja penyuluh agama	91.4 Nilai
		2 Persentase penyuluh agama yang dibina	85.78 %
		3 Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	1 Orang
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	305 Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100 %
		2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina	360 Orang
		3 Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	5 Desa
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1 Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	6 Lembaga
		2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	56 Kegiatan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100 %
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1 Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	58 %
		2 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	7 Kegiatan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100 %
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1 Persentase rumah ibadah yang ramah	76.6 %
		2 Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	61 %
		3 Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	485 Orang
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	17 Kegiatan
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	1 Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	90 %
		2 Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	71 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	
		3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	52.5 %
		4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	14.5 %
		5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	71 %
		6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	14.5 %
		7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	21.65 %
		8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	21.65 %
		9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	65 %
		10	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;	1634 %
		11	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	40 Kegiatan
		10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1
2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an			4.5 %
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	50 Kegiatan	
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	4 Lokasi	
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	6 Kegiatan	
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	14 Dokumen
		2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	20 Orang
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	35 Unit
		2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	30 Eksemplar

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
		3 Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	68.75 %
		4 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	58 Layanan
		5 Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	35 Lokasi
		6 Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina;	20 Orang
		7 Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	1 Lokasi
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1 Jumlah KUA yang direvitalisasi	5 Lokasi
		2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	15 Lokasi
		3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	8,300 Orang
		4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	3,300 Orang
		5 Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina	165 Orang
		6 Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	220 Orang
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	3,493 Keluarga
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	90 %
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	42.23 %
		2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0.35 %
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1 1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	27 %
		2 2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	87 %
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	96 %
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	97 %
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1 Persentase amil yang dibina	91 %
		2 Persentase lembaga zakat yang dibina	73.51 %
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1 Persentase lembaga wakaf yang dibina	80 %
		2 Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	20 %
		3 Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	16.67 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1 Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	95 %
		2 Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	90 %
		3 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	1 Madrasah
		4 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	1 Madrasah
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1 Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	50.03 %
		2 Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	50.03 %
		3 Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	50.03 %
		4 Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan	1 Orang
		5 Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	1 Orang
		6 Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan	100 %
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1 Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	35 %
		2 Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	35 %
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1 Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	80 %
		2 Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	62 %
		3 Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	61.5 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
		4 Persentase MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	65.5 %
		5 Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	35 %
		6 Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	69 %
		7 Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	28 %
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1 Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	167,309 Siswa
		2 Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;	7,495 Siswa
		3 Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	22 %
		4 Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;	20 %
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1 Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	0.1 %
		2 Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	38 %
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	24,961 Siswa
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;	83.00 %
		2 Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	13.64 %
		3 Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;	12 %
		4 Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;	15 %
		5 Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	57 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	60 %
		2 Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	97.5 %
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1 Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	7 %
		2 Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	85 %
		3 Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	82 %
		4 Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	2.4 %
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1 Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	100 %
		2 Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	95 %
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	180 Lembaga
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1 Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	1 %
		2 Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1 %
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1 Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	87.5 %
		2 Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	80 %
		3 Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	70 %
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1 Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	167 Organisasi
		2 Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	177 Gugus

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase produk hukum yang diterbitkan	95 %
		2 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	95 %
		3 Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	4 Kegiatan
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	93 %
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1 Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	100 %
		2 Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	95 %
		3 Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	25 %
		4 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	50 %
		5 Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	40 %
		6 Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	95 %
		7 Persentase data ASN yang diupdate	90 %
		8 Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	50 %
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1 Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	2 Dokumen
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	98 %
		3 Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	96.59 %
		4 Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	60 %
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1 Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	49.93 %
		2 Persentase tanah yang bersertifikat	40 %
		3 Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN	99 %
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1 Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	85 %
		2 Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	80 %
		3 Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1 Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	95 %
		2 Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	40 Satker
		3 Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	45 Orang
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1 Persentase output perencanaan yang berbasis data	95 %
		2 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	100 %
		3 Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	75 %
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	96 %
		2 Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	75 %
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	90 %
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1 Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	100 %
		2 Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	100 %
		3 Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	100 %
		4 Persentase menurunnya lelang gagal	90 %
		5 Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	90 %
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	90 %
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1 Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	20 Kegiatan
		2 Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	90 %
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1 Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	90 %
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	1 Orang

Nilai Kinerja Anggaran : 95

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	47,511,503,000
	2098 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	50,004,000
	2099 Pembinaan Administrasi Kepegaxwaan	476,240,000
	2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	16,145,606,000
	2101 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	103,640,000
	2102 Pembinaan Administrasi Perencanaan	384,831,000
	2103 Pembinaan Administrasi Umum	6,380,081,000
	2106 Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	288,300,000
	6708 Dukungan Manajemen Pendidikan	8,354,134,000
	2125 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	1,531,148,000
	2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	11,695,564,000
	2138 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	76,000,000
	5100 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	128,168,000
	2141 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	157,496,000
	5102 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	173,519,000
	2144 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	181,720,000
	2146 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha	25,000,000
	5105 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	210,000,000
	2150 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah	1,150,052,000
2	PROGRAM KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	9,900,255,000
	5620 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	507,376,000
	2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	1,432,035,000
	2122 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	1,055,000,000
	2123 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	981,200,000
	2124 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	1,092,660,000
	2137 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	554,250,000
	2140 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	173,519,000
	2143 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	181,720,000
	2145 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	399,000,000
	2126 Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	72,798,000
	2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri	63,535,000
	2148 Pembinaan Haji	3,183,001,000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
3	PROGRAM KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN	46,413,162,000
4422	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	1,340,350,000
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	35,645,154,000
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	1,714,500,000
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	7,262,511,000
4434	Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	109,604,000
4435	Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	160,043,000
4437	Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	181,000,000
4	PROGRAM PAUD DAN WAJAR 12 TAHUN	21,698,392,000
2128	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, Dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	2,970,000,000
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	18,672,392,000
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	56,000,000
Total Anggaran		125,523,312,000

Bali, 13 Desember 2022

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Aceh



Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama RI

